Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA 2023

Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup

untuk transformasi ekonomi indonesia

RENCANA KERJA 2023

Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup

untuk transformasi ekonomi indonesia

RENCANA KERJA
TAHUN 2023

Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja ini, mereka adalah :

Kepala Biro Perencanaan; Kepala Bagian Rencana Program dan Anggaran; Bagian Rencana Program dan Anggaran Biro Perencanaan; Inspektorat Jenderal KLHK; Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari; Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan; Ditjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan; Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Ditjen Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim; Badan Standardisasi Instrumen LHK; Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Dokumen digital Rencana Kerja ini dapat diakses dengan memindai *QR code* berikut:

Disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KESINAMBUNGAN
TEMA PEMBANGUNAN

2020. Adaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah

Tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa dibalik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang.

2021. Menebalkan modal sosial, memperkuat kinerja positif pembangunan LHK

Pengelolaan yang saling sinergi dan tanggap dengan adanya perubahan menjadi modal utama dalam pembangunan yang tangguh. Kementerian LHK optimis melanjutkan dan meningkatkan kinerja dalam melestarikan alam dan mendukung peningkatan ekonomi yang tangguh melalui pendampingan masyarakat dan pemulihan lingkungan.

2022. Memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi birokrasi

Produktivitas masyarakat tingkat tapak untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dengan akses kelola hutan dan pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular.

2023. Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia

Keberdayaan masyarakat merata dan produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor: SK.1173 /MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu disusun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34)

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/ SET.1/6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); dan

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
KEDUA	:	Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
KETIGA	:	Unit Kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait;
KEEMPAT	:	Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2023, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2023; dan
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 November 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth:
Seluruh Pejabat Eselon I untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
SK. 1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

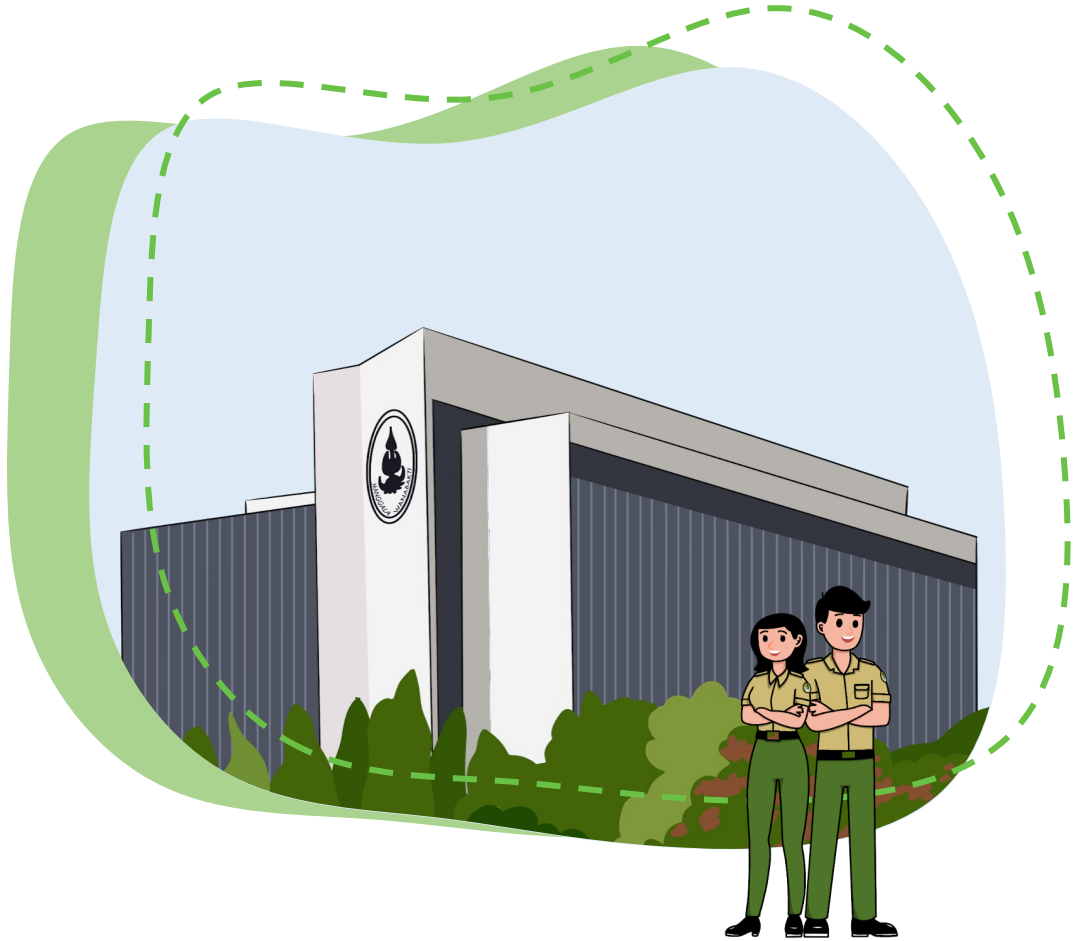

Keterangan :
Komplek Manggala Wanabakti menjadi simbol kemegahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan komplek rimbunnya pepohonan menjadikan Manggala Wanabakti menjadi ruang terbuka hijau kota.

Ilustrasi oleh : M Desby Aditia dan Saraswati W

IKHTISAR EKSEKUTIF

Selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Kementerian pun mengusung tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 dengan narasi ringkas ” Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia ”. Artikulasi ini berangkat dari keberhasilan pemenuhan kinerja tahun 2021 dan hasil pantau pembangunan tahun 2022, yang kami yakini menjadi labuhan atas seluruh aktivitas pembangunan LHK, untuk : ekonomi yang terjaga bahkan tumbuh, kesenjangan antar wilayah yang semakin berkurang, angka pengangguran yang menurun dan proporsi kemiskinan yang semakin dapat dikendalikan.

Dari sini Kementerian ingin menyampaikan pesan bahwa keberdayaan masyarakat merata dan produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah.

Berujung pada harapan baik Kementerian untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk hasil kelola masyarakat sebagai upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya sasaran itu adalah, pertama, Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon.

PLASTIC RECYCLING

Kedua, Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk memeratakan pembangunan wilayah. Ketiga, Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNBP dan meningkatkan kualitas belanja Kementerian, sebagai upaya peningkatan *value for money* termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK. Dan keempat, Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Tentu saja Kementerian menyadari bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan LHK tahun 2023, banyak hal harus dibereskan. Namun perlu diingat bahwa ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi. Justru Kementerian ingin menyampaikan bahwa untuk memenuhi ukuran ekonomi, pilar lain tidak boleh ditinggalkan. Pilar lingkungan dan pilar sosial, masing-masing dibungkus oleh pilar tata kelola tetap diusung dengan semangat perubahan yang bermuara pada : kondisi tapak yang semakin baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi.

Hasil kerja Kementerian akan memberikan dukungan bagi prioritas nasional, yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (4) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Seluruh aktifitas pembangunan Kementerian akan difasilitasi dalam 5 program dengan alokasi anggaran Kementerian sebesar Rp6,91 triliun.

Keberhasilan program telah diidentifikasi dan dirumuskan sasarannya bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Kementerian Keuangan. Terangkum dalam sebuah aplikasi yang kita sebut dengan kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) sebagai basis tunggal perencanaan pembangunan nasional.

Kelima program itu adalah program dukungan manajemen akan menampung jumlah anggaran sebesar Rp3,31 triliun, program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp2,44 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp122,01 miliar, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp860,40 miliar, dan program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp182,47 miliar.

PAGU KLHK 2023

KEMENTERIAN LHK DALAM ANGKA

DUKUNGAN UNTUK PRIORITAS NASIONAL

Rp3.120 Triliun

PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	23%
PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1,4%
PN 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	7,2%
PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	68,4%

ANGKA MENURUT PROGRAM

Rp6.91 Triliun

48,09%	Dukungan Manajemen
34,73%	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
12,70%	Kualitas Lingkungan Hidup
2,71%	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
1,76%	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

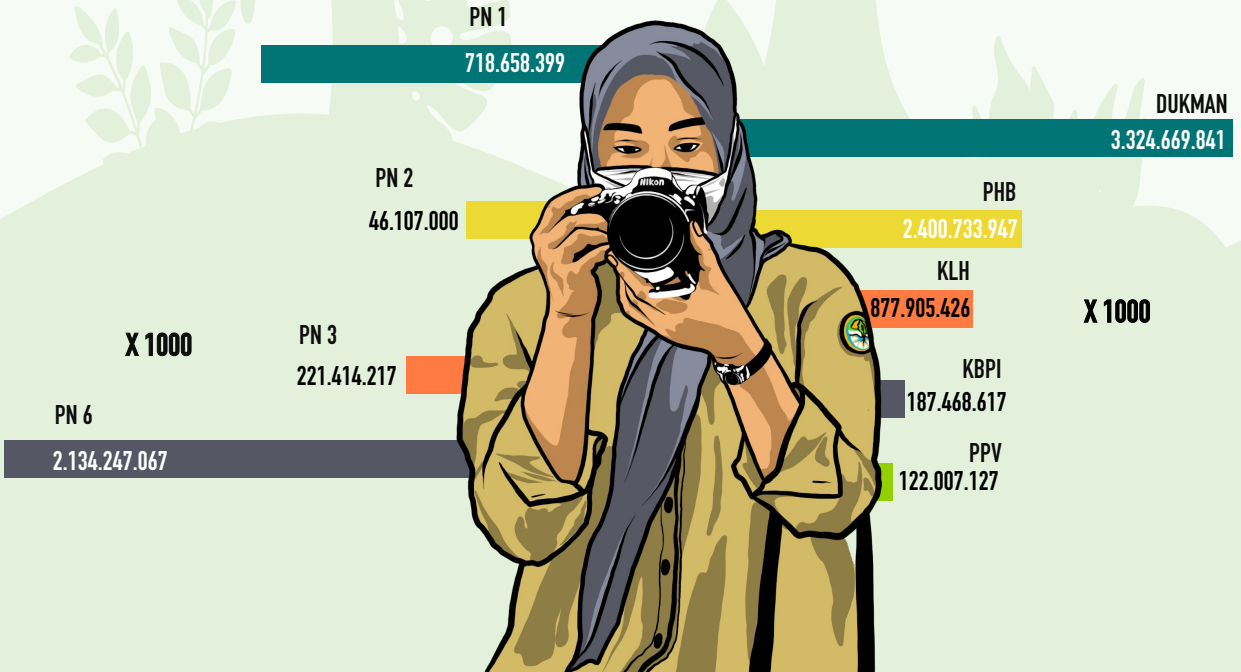

KINERJA UTAMA 2023

Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia

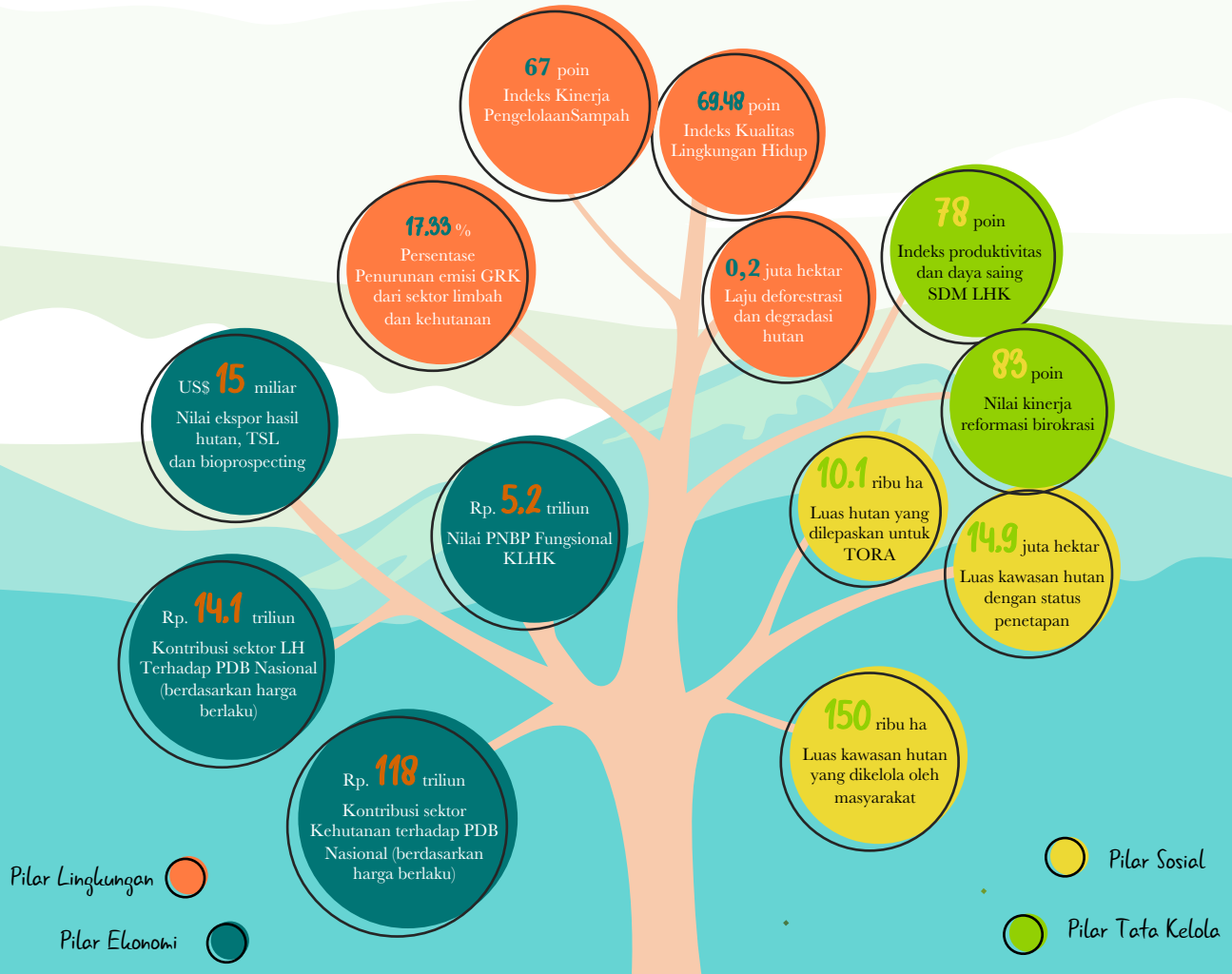

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2023 ini merupakan dokumen yang berisi target kinerja dan anggaran, di tengah upaya untuk terus memperkuat dan meningkatkan kontribusi KLHK dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan rasio gini, sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Harapan utamanya adalah meningkatkan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan menjadi semakin baik secara ekologi, sosial, ekonomi, dan dalam hal tata kelola.

Kondisi masyarakat yang semakin stabil dan wabah pandemi yang berangsur hilang dari bumi pertiwi merupakan modal sosial bagi keberlangsungan pembangunan LHK. Hasil produksi barang dan jasa pada setiap entitas tapak hutan mampu menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar hutan sehingga membentuk pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat memberikan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2023.

Dalam suasana yang semakin kondusif, Kementerian berusaha menggunakannya sebagai momentum untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LHK. Ekspresi nya dapat dilihat dari alokasi anggaran KLHK untuk pemberdayaan masyarakat yang semakin meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar Rp.1,67 Triliun atau naik 211,40% dari angka di tahun 2022 sebesar Rp.537,71 Miliar.

Di tingkat tapak, peningkatan pemberdayaan masyarakat ini meliputi kegiatan : Fasilitasi UMKM untuk Kegiatan SVLK, Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Hutan Lestari, Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan, Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari, Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah IKN dan DAS Sekitarnya (Penanaman), Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah IKN dan DAS Sekitarnya (Pemeliharaan), Penanaman RHL, Pemeliharaan Tanaman RHL P1, Pemeliharaan Tanaman RHL P2, Bibit Berkualitas, Bibit Produktif, Kebun Bibit Rakyat, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pantai, Bangunan Konservasi Tanah dan Air, Pemeliharaan Rehabilitasi Pesisir Tahun-2, Pemeliharaan Rehabilitasi Pesisir Tahun-1, Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif, Unit Kemitraan konservasi yang ditingkatkan usahanya, Pengembangan Kapasitas Pokmas Wisata Alam, Patroli Bersama Masyarakat, Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari), Pemulihan Ekosistem Daratan di kawasan konservasi, ekosistem esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT, Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan Mandiri, Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya, Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal, SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan, Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha, Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bang Pesona dan Alat Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum,

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK, Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas, Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional, Penanganan Sampah di Citarum dan Daerah Prioritas, Motor sampah, Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum, lnstalasi Pengolahan Air Limbah, Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan Rakyat, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut, Pemulihan lahan gambut terdegradasi milik masyarakat, Pemulihan Padang Lamun/Terumbu Karang, Sumur Bor, Sekat Kanal, Revitalisasi Mata Pencaharian dan Ekonomi Masyarakat, Penanaman Rehabilitasi Mangrove, Desa Mandiri Peduli Gambut, Desa Mandiri Peduli Mangrove, Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat, dan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Tentu tidak mudah mewujudkannya. Namun Kementerian ini setidaknya berani mencanangkannya sebagai bagian dari semangat Rencana Kerja ini.

Capaian pembangunan nasional hingga semester pertama tahun 2022 semakin menunjukkan pentingnya dan kuatnya modal sosial untuk memperkuat kinerja positif pembangunan LHK.

Capaian kinerja ekspor hasil hutan kayu tahun 2021 mencapai US$ 14,75 Miliar. Kinerja tersebut meningkat secara signifikan sebesar 33,3% dibandingkan capaian tahun 2020. Perbandingan rencana dan capaian di tahun 2021 menggambarkan kinerja sebesar > 120 % untuk ekspor hasil hutan kayu dari target US$ 9,5 Miliar. Sedangkan untuk ekspor TSL memberikan hasil kinerja sebesar > 120 % dengan capaian mencapai Rp11,79 triliun (US$ 819,95 juta) dengan kurs 1 USD setara dengan Rp14.378,92. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan hingga 9,26%.

Capaian kinerja untuk nilai ekspor hasil hutan dari kedua sektor tersebut sebesar 134,22% atau US$ 15,57 miliar (USD 14,75 miliar + USD 0,82 miliar) dari target US$ 11,6 miliar. Jika dibandingkan dengan target renstra, pada tahun akhir pelaksanaan renstra yaitu pada tahun 2024 diharapkan tercapai sebesar US$ 70 milliar maka pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 39,14 %.

Sementara itu, tercatat sumbangan PDB/produk domestik bruto dari sektor LHK mencapai Rp111,99 triliun (menurut harga berlaku), hasil ini mencapai target 105,7% dari Rp106 triliun atau meningkat 3,09% dari tahun sebelumnya.

Sampai dengan bulan mei tahun 2022, angka ekspor hasil hutan kayu mencapai US$ 5,31 Miliar dan ekspor TSL mencapai Rp2,2 triliun. Sedangkan sumbangan PDB sektor LHK tercatat di angka Rp26,58 triliun.

Dengan modal sosial yang kuat di tahun 2022, Kementerian optimis untuk melanjutkan kinerja positif pembangunan di tahun 2023. Adapun pesan utama pembangunan tahun 2023 adalah produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi indonesia.

Sasaran utamanya adalah, pertama Derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular. Kedua, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak. Dan Ketiga, gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi.

Dalam konteks pembangunan nasional, Kementerian memenuhi 4 dari 7 prioritas nasional. Prioritas nasional yang didukung itu adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1), mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2), meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 3), dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6).

Fasilitasi pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan, Kementerian melaksanakan 5 program, yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan vokasi, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan dukungan manajemen. Keberhasilan pemenuhan sasaran masing-masing program merupakan sinergi antar unit kerja Eselon I dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Guna mendukung Prioritas Nasional dan pelaksanaan program, Pagu Alokasi Anggaran KLHK TA. 2023 yang digulirkan adalah Rp6,91 triliun,- yang bersumber dari RM Rp5,73 triliun, PNBP Rp900 miliar, HLN Rp253,25 miliar, dan SBSN Rp26,98 miliar.

Dokumen ini mencatat berbagai langkah kerja dan sasaran capaian untuk menjadi pedoman kerja sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Semoga dokumen Rencana Kerja Kementerian Tahun 2023 ini bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT.

Jakarta, 23 November 2022
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

DAFTAR ISI

01 Pendahuluan

02 Capaian Kinerja Pembangunan LHK

03 Rencana 2023

04 Penutup

I. PENDAHULUAN

Mengatasi tantangan global dan menghadirkan pesan damai, sembari terus berinovasi membawa langkah Kementerian menjemput peradaban Indonesia maju.

Milestone Pembangunan LHK

Dua tahun sudah dunia ini dilanda pandemi tidak terkecuali negara Indonesia. Dampak pandemi terasa di seluruh sendi kehidupan khususnya sosial ekonomi masyarakat. Mandegnya perekonomian berakibat pada pemutusan hubungan kerja serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, demi mengatasi dampak pandemi, pada tahun 2020 di awal pandemi, Kementerian LHK mampu beradaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa dibalik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang.

Selanjutnya pada tahun 2021, Kementerian LHK terus berupaya untuk menebalkan modal sosial, dan memperkuat kinerja positif pembangunan LHK. Pengelolaan yang saling sinergi dan tanggap dengan adanya perubahan menjadi modal utama dalam pembangunan yang tangguh. Kementerian LHK optimis melanjutkan danmeningkatkan kinerja dalam melestarikan alam dan mendukung peningkatan ekonomi yang tangguh melalui pendampingan masyarakat dan pemulihan lingkungan.
Kondisi masyarakat yang semakin stabil dan wabah pandemi yang berangsur hilang dari bumi pertiwi merupakan modal sosial bagi keberlangsungan pembangunan LHK. Bercermin pada tahun 2021, arah pembangunan LHK tahun 2022 adalah memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi birokrasi.

Pemanfaatan ragam hayati secara aktual oleh masyarakat seperti menemukan momentumnya di masa pandemi. Di sini, Kementerian menyebutnya sebagai upaya membangun transformasi keunggulan ragam hayati dan produktivitas masyarakat tingkat tapak untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dengan akses kelola hutan dan pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular.

Akhirnya, tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik sumbangsih Kementerian LHK bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. Ukuran keberhasilannya yakni keberdayaan masyarakat merata dan produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah. Makro ekonomi pembangunan LHK tahun 2023 sebagai arah pembangunan LHK tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Makro Ekonomi Pembangunan LHK

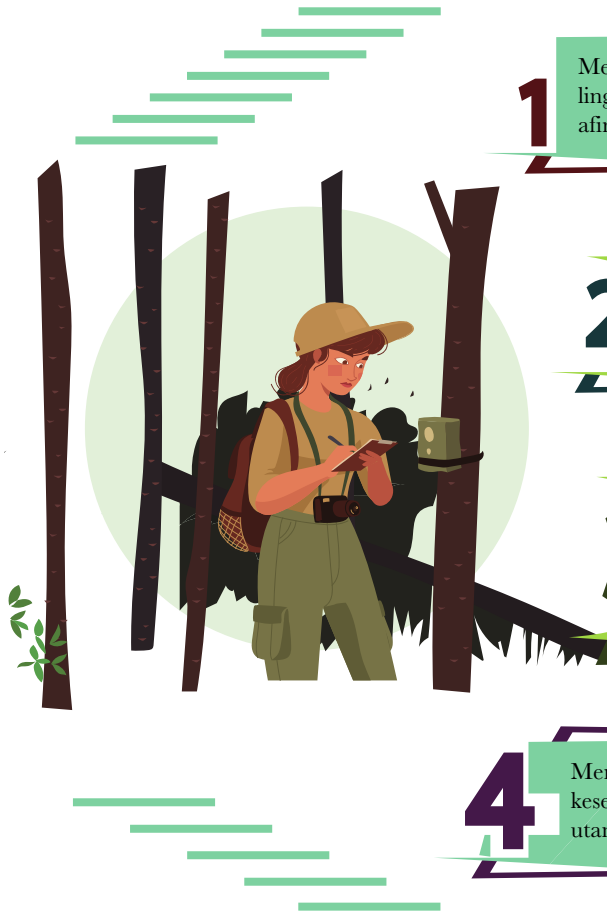

1. Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon

2. Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk memeratakan pembangunan wilayah

3. Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNBP dan meningkatkan kualitas belanja dan sinergi pendanaan Kementerian, sebagai upaya peningkatan *value for money* termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK

4. Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu

Ibu Kota Negara Nusantara

Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.

Ide Pemindahan Ibu Kota Negara

Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru (TEMPO Co).

Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. ***Pertama***, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020).

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari "beban" yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI

Transformasi Menuju Ekonomi Hijau

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan berpotensi menjadi salah satu yang paling terdampak. Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah adanya tren kenaikan suhu. Risiko kenaikan permukaan laut mengancam Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Dari tahun 1981-2018, kenaikan suhu Indonesia sekitar 0,03°C per tahun. Konsekuensinya, telah terjadi bencana kenaikan permukaan laut 0,8-1,2 cm/tahun, padahal sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir.

Perubahan iklim juga meningkatkan bencana hidrometeorologi yang saat ini mencapai 80% (NDC, 2016). Mengacu ke Roadmap *Nationally Determined Contribution* (NDC) adaptasi tahun 2020, potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66 persen sampai dengan 3,45 persen terhadap PDB pada tahun 2030. Potensi kerugian tersebut dapat muncul dari : (1) risiko kelangkaan air, yang dibarengi meningkatnya risiko banjir dan kekeringan yang parah; (2) kerusakan ekosistem lahan akibat kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya ekosistem, keanekaragaman hayati, dan perubahan biomassa; (3) kerusakan ekosistem lautan sebagai dampak naiknya suhu permukaan laut menyebabkan punahnya terumbu karang, rumput laut, mangrove, beberapa keanekaragaman hayati dan ekosistem laut; (4) penurunan kualitas Kesehatan dan berbagai dampak lain termasuk risiko kelangkaan pangan.

Mengacu pada latar belakng tersebut, transisi menuju ekonomi hijau menjadi penting dan wajib dilakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia lintas generasi. Di banyak negara, transisi menimbulkan banyak tantangan dan tidak selalu dapat dilewati dengan sempurna khususnya terkait isu stabilitas energi yang menimbulkan kenaikan biaya hidup terutama di periode awal transisi. Karenanya manajemen transisi yang terukur dan terencana menjadi sangat penting. Pemerintah menyatakan komitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang sudah diperbaharui di tahun 2021. Sedangkan dalam jangka panjang, Pemerintah juga sudah menyampaikan dokumen *Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050 serta *Net Zero Emission* (NZE) 2060 atau lebih cepat.

Folu Net Sink 2030 merupakan bagian strategi Indonesia untuk menjamin tercapainya tujuan *Paris Agreement*. Langkah yang dilakukan adalah menahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Folu Net Sink 2030 ini juga menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim. Folu Net Sink 2030 ini juga merupakan bagian dari aspirasi Indonesia menuju *Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) pada 2050.

Berikut sektor-sektor yang menjadi sasaran penurunan emisi GRK : (1) Sektor Energi melalui penerapan efisiensi energi, penggunaan energi baru terbarukan, dan penerapan teknologi energi bersih; (2) Sektor kehutanan melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, peningkatan peranan konservasi, dan pengelolaan lahan gambut; (3) Sektor limbah melalui pengolahan limbah padat kota melalui operasionalisasi TPA, pengolahan limbah cair domestik, pengolahan limbah padat industri, pengolahan limbah cair industri; (4) Sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU) melalui pengurangan "*clinker to cemen ratio*" di industri semen, peningkatan efisiensi industri amonia, dan penambahan aksi mitigasi lainnya; dan (5) Sektor pertanian melalui penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah, penerapan sistem pengairan sawah, pemanfaatan limbah ternak untuk biogas, dan perbaikan suplemen pakan ternak.

Biaya untuk menurunkan emisi berbeda-beda untuk setiap sektor. Dengan segala komitmen tersebut, target penurunan emisi GRK dengan upaya sendiri per sektor mencapai 497 juta ton dari sector kehutanan (60 persen dari total target), 314 juta ton dari sektor energi dan transportasi (38 persen), dan sisanya sekitar 2 persen ada di sektor pertanian (11 juta ton CO2), limbah (9 juta ton CO2), dan industri (3 juta ton CO2). Biaya untuk menurunkan emisi di masing-masing sector akan sangat berbeda teregantung dari sifat alaminya. Sektor kehutanan membutuhkan biaya berkisar antara USD3-8 per ton CO2. Di sisi lain, penurunan 1 (satu) ton emisi di sektor energi mencapai USD80 per ton CO2.

Kebutuhsn pendanaan untuk mencapai target NDC 2030 diperkirakan mencapai USD247,2 miliar atau sekitar Rp3.461 triliun, setara dengan 266,2 triliun per tahun. Dari sisi kapasitas pendanaan Pemerintah, rata-rata belanja APBN untuk penanganan perubahan iklim dalam lima tahun terakhir sebesar Rp89,6 triliun per tahun, atau sekitar 34 persen dari total kebutuhan dana. Kapasitas fiskal yang terbatas, mengharuskan investasi swasta perlu didorong agar pencapaian target NDC dapat tercapai. Selain itu, untuk mencapai 41 persen penurunan emisi secara *conditional*, komitmen negara-negara maju sangat diperlukan.

Meskipun secara kapasitas fiskal terbatas, kebijakan fiskal saat ini juga telah diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau. Pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi bersih. Penguatan belanja K/L melalui penerapan *Cilmate Budget Tagging* dan juga penerapan *Mainstreaming Cilimate Budget Tagging* dalam APBD. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penguatan transfer fiskal berbasis ekologi dan penerbitan Indonesia's *Green Bond/Sukuk Framework*.

Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi hijau secara inklusif dan berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut meliputi : (1) penyiapan instrument fiskal terkait pungutan atas karbon (pajak karbon); (2) penyusunan *Climate Change Fiscal Framework* (*updating mitigation fiscal framework*); (3) integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan MRV perubahan iklim nasional; dan (4) bauran kebijakan pajak karbon, pasar karbon dan mekanisme transisi energi.

Sejalan dengan bauran kebijakan tersebut, Pemerintah mencoba mengoptimalkan peluang dari Potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk sektor kehutanan Forest and Other Land Use/FoLU), dipekirakan akan melampaui target NDC di 2030 sekaligus mencapai *net zero emission* (net-sink) di tahun 2030.

Target tersebut diantaranya melalui pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan restorasi tata air gambut. Seraya mencapai target Net-Sink di 2030, sector kehutanan sebenarnya masih berpeluang untuk menghasilkan pengurangan emisi lebih jauh. Ini disebut sebagai "*beyond NDC*". Kredit karbon dari "*beyond NDC*" diperkirakan cukup besar dan dapat diperdagangkan di pasar global. Per saat ini sebenarnya sudah ada nilai potensi ekspor karbon kredit dari proyek-proyek "*beyond NDC*" sekitar Rp2,6 triliun per tahun dengan luas hutan sebesar 434.811 Ha. Kesepakatan COP26 akan semakin meningkatkan pemintaan global terhadap karbon kredit dan harganya akan semakin tinggi. Hutan kita yang sangat luas berpotensi menghasilkan karbon kredit yang dapat dibeli oleh global untuk pencapaian target penurunan emisi mereka.

Merujuk pada dokumen NDC, Pemerintah menjalankan strategi "*beyond NDC*" yang lain seperti pemanfaatan ekosistem *blue carbon* pesisir yang meliputi hutan bakau, padang lamun serta terumbu karang. Ekosistem *blue carbon* Indonesia menyimpan 75-80 persen dari jumlah karbon dunia yang berarti bahwa kita memiliki potensi ekonomi besar dari ekosistem pesisir, yang juga akan menghasilkan kredit karbon.

Secara umum, pemanfaatan skema NEK dapat dilakukan melalui perdagangan karbon (*carbon trading*), pengimbangan karbon (*carbon offset*), pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*) serta pungutan atas karbon.

COP-4 Minamata Tentang Merkuri, Dari Indonesia Untuk Dunia

Kementerian LHK telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan akibat penggunaan dan emisi merkuri. Upaya tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM), yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019. Sejak implementasi RAN PPM dilakukan, Indonesia telah berhasil menurunkan penggunaan merkuri sebanyak 374,4 kg di sektor industri lampu dan baterai, mengendalikan 710 kg emisi merkuri dari pembakaran pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara sebagai sumber energinya, mengurangi 4.700 kg merkuri pada sektor kesehatan melalui penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri dari fasilitas Kesehatan. Khusus untuk sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), melalui pelarangan penggunaan merkuri pada PESK dan pembangunan fasilitas pengolahan emas non-merkuri, jumlah penggunaan merkuri yang berhasil diturunkan mencapai 12,4 ton. Upaya ini juga diikuti dengan pelarangan impor dan distribusi merkuri kepada para penambang emas skala kecil, mengembangkan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri yang lebih efektif dan ekonomis, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal melalui upaya alih mata pencaharian bagi penambang.

Lebih jauh, sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan pencemaran merkuri di masa depan, Indonesia telah membangun laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan, guna mendukung program pengurangan dan penghapuusan merkuri melalui pengujian dan penelitian. Kedepannya, fasilitas laboratorium ini akan menjadi salah satu "*centre of excellence of mercury*" tidak hanya di regional Asia Tenggara, tetapi di Asia Pasifik. Harapannya, dengan berbagai upaya holistik yang telah dan akan dilakukan, Indonesia bisa terbebas dari merkuri pada tahun 2030. Pada COP 4.2 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 21-25 Maret 2022, Pemerintah Indonesia mengusulkan suatu Deklarasi (*non-legally binding declaration*) yang mengangkat isu perdagangan ilegal Merkuri berjudul "*Declaration on Combating Global Illegal Trade of Mercury*" yang memuat 4 pokok muatan yaitu : (1) Mendorong kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pengawasan; (2) Mempromosikan Pendidikan, penelitian dan studi; (3) Mendorong kebijakan, peraturan dan tindakan internal lainnya yang kondusif dan memungkinkan; dan (4) Mempromosikan kerja sama pihak ketiga seperti donor, *e-commerce*, peningkatan kapasitas, serta bantuan teknis.

G20 Jadi Katalis Global Pencapaian SDGs dan Pemulihan Lingkungan

Pandemi Covid-19 telah merintangi upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) dari masing-masing negara di dunia. Oleh karena itu, ke depan negara-negara anggota G20 sebagai 20 kekuatan terbesar dunia diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih ambisius. Begitu juga negara-negara G20 dapat menyelesaikan tantangan-tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif berdasarkan keadaan dan prioritas kebangsaan masing-masing. Apalagi jika G20 dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Seluruh negara anggota G20 memiliki tanggung jawab menjadi katalis global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pemulihan berkelanjutan melalui contoh-contoh konkrit.

Indonesia tidak hanya mengajak, namun juga telah mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai SDG melalui aksi-aksi konkrit Kementerian LHK yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional. Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020. Aksi-aksi konkrit lain diantaranya yaitu program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi. Target pada tahun 2030 dapat tercapai *net zero land degradation*. Untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem, Indonesia telah merehabilitasi lahan kritis secara signifikan, antara lain selama 5 tahun terakhir, seluas 1,42 juta hektar telah dipulihkan dan tambahan target 600 ribu hektar mangrove hingga tahun 2024, Indonesia juga tengah mengatur ekosistem karbon biru melalui peningkatan pengelolaan *Indonesian Seas Large Marine Ecosystem* (ISLME). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Dari aspek sirkular ekonomi, Indonesia telah mendorong pengembangan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta mendorong perusahaan manufaktur untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah. Diharapkan 100% sampah kita bisa dikelola dengan baik pada tahun 2025, yaitu 30% dikurangi dan 70% dikelola secara sistematis, Di sisi pembiayaan, Indonesia telah mengembangkan Roadmap "Keuangan Berkelanjutan 2025". Selanjutnya selama 3 (tiga) tahun belakangan, Indonesia telah memperkenalkan instrumen keuangan inovatif untuk alam, ekonomi, dan masyarakat, seperti Sukuk Hijau, SDG Bond dan Sukuk SDG. Demikian juga keuangan campuran SDG Indonesia One, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi SDG dan pemulihan bencana di Indonesia.
Ke depan, upaya-upaya konkrit dalam pencapaian SDGs dan pemulihan lingkungan harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

II. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN

Langkah korektif yang semakin menunjukkan produktivitas lingkungan hidup dan kehutanan bagi pembangunan nasional

PROFILE PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021 (%)

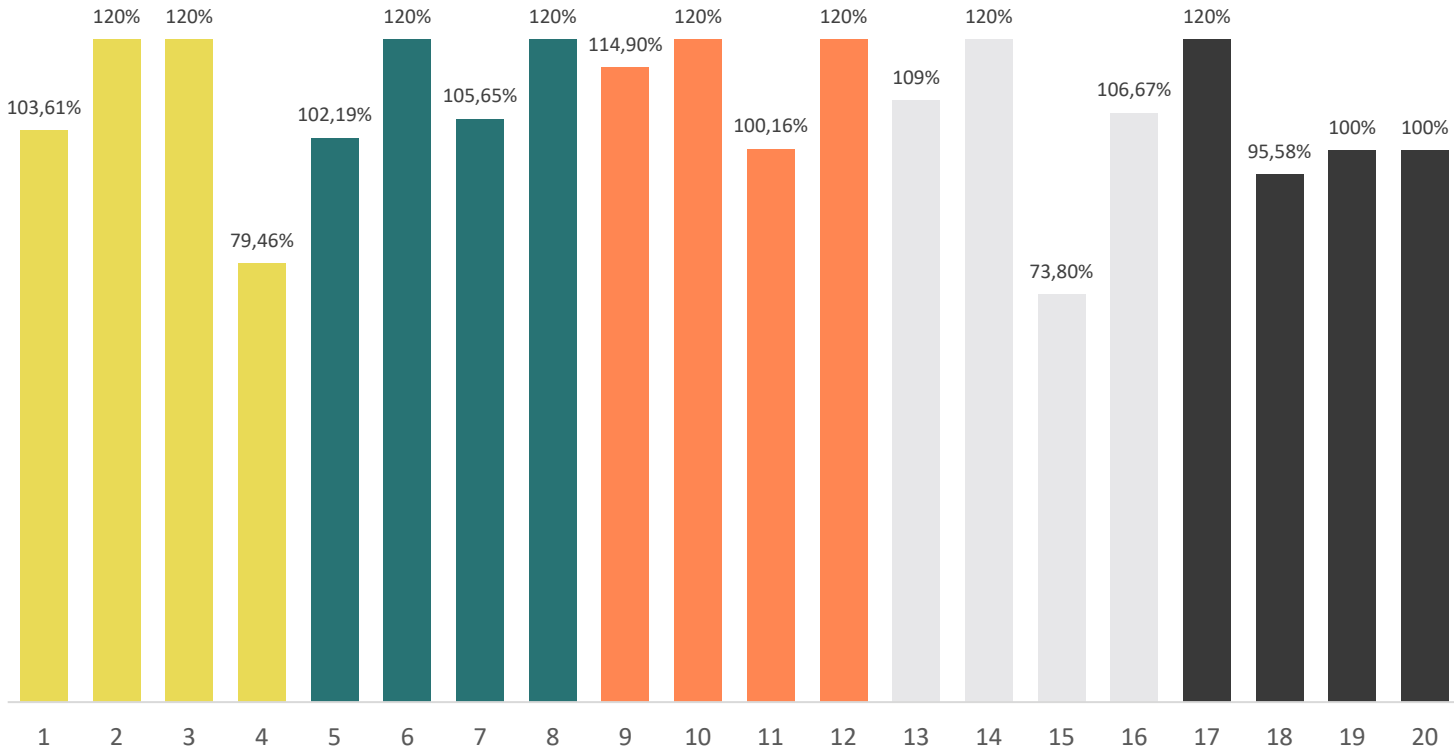

No.	Keterangan
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
2.	Penurunan emisi (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah
3.	Penurunan laju deforestasi
4.	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)
5.	Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya
6.	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi
7.	Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional
8.	Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting
9.	Nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional KLHK
10.	Luas kawasan hutan dengan status penetapan

No.	Keterangan
11.	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA
12.	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
13.	Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan
14.	Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum
15.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
16.	Hasil litbang yang inovatif dan/atau implementatif
17.	Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
18.	Nilai kinerja reformasi birokrasi
19.	Opini WTP atas laporan keuangan KLHK
20.	Level maturitas SPIP KLHK

Melanjutkan pencapaian di tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan target kinerja di tahun 2022 dengan menggunakan 19 IKU berdasarkan kesepakatan tiga pihak yaitu antara Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun target kinerja yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2022 yaitu :

No IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2022	Satuan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,22	Poin
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	17,22	%
3	Penurunan Laju Deforestasi	0,2	Juta ha
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	65	Poin
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	35.000	Hektar
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values*)	11,5	Juta ha
7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	109	Rp Triliun
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	14	US Milyar
9	Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	4,9	Rp. Triliun
10	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	2,5	Juta ha
11	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	94,7	Ribu ha
12	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	200	Ribu ha
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	2,3	Poin
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	1.041	Kasus
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60	Poin
16	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	75	Poin
17	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	81	Poin
18	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	4	Poin (WTP)
19	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. Nilai Indeks tersebut menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

IKLH juga digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH nasional adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional.

Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup per Tahun

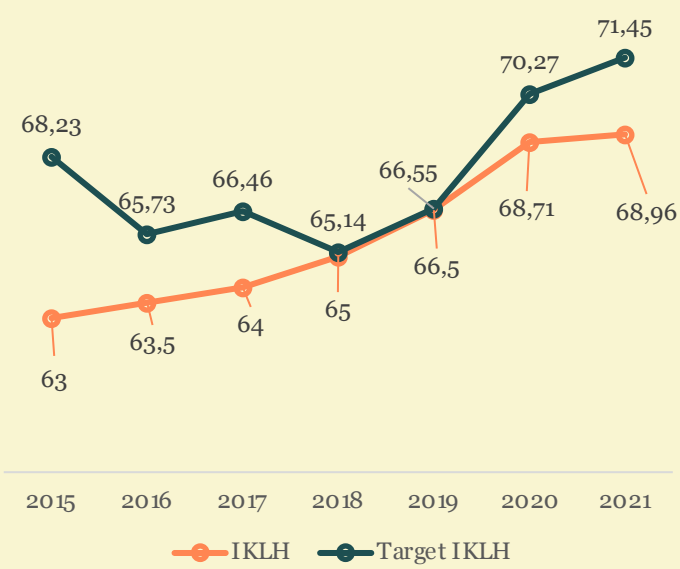

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021

Indeks Kualitas Air (52,82)

Indeks Kualitas Udara (87,36)

Indeks Kualitas Lahan (60,72)

Indeks Kualitas Air Laut (81,04)

Peta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2021

CAPAIAN IKLH PER PROVINSI 2021

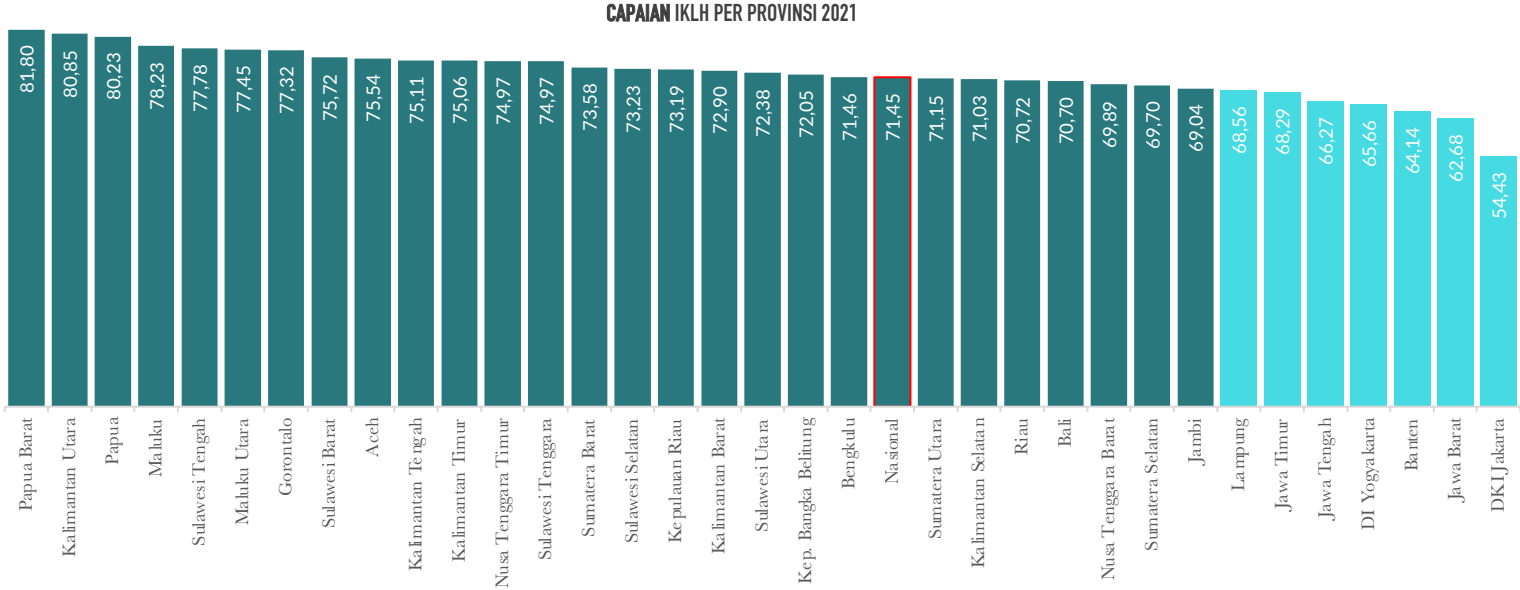

Berdasarkan nilai IKLH dari masing-masing provinsi pada tahun 2021, didapatkan hasil nilai IKLH tertinggi pada Provinsi Papua Barat dengan nilai IKLH sebesar 81,80, sedangkan provinsi dengan nilai IKLH terendah adalah DKI Jakarta dengan nilai IKLH sebesar 54,43. Provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Jawa mendapatkan nilai IKLH di bawah nilai IKLH nasional. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi perbaikan pada provinsi-provinsi tersebut.

Sementara itu provinsi yang terdapat pada wilayah Maluku dan Papua mendapatkan nilai IKLH di atas nilai IKLH nasional.
Berdasarkan data IKLH yang didapatkan, menunjukkan bahwa provinsi dengan IKLH di bawah IKLH nasional perlu menjadi prioritas dalam strategi peningkatan nilai IKLH

PARAMETER INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PER PROVINSI TAHUN 2021

No.	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
1	Aceh	57.14	89.63	76.52	76.51	75.54
2	Sumatera Utara	53.72	89.55	48.84	81.43	71.15
3	Riau	52.25	90.13	50.22	77.73	70.72
4	Kepulauan Riau	55.15	90.91	60.39	75.68	73.19
5	Jambi	48.96	87.08	51.47	83.58	69.04
6	Bengkulu	49.81	90.81	55.52	83.61	71.46
7	Sumatera Barat	52.55	90.22	66.24	83.75	73.58
8	Sumatera Selatan	58.25	86.28	41.25	75.53	69.70
9	Kepulauan Bangka Belitung	58.37	90.39	40.10	82.71	72.05
10	Lampung	57.77	85.46	33.54	79.56	68.56
11	Banten	54.95	74.14	39.21	85.92	64.14
12	DKI Jakarta	44.19	66.52	26.25	75.18	54.43
13	Jawa Barat	43.09	79.34	40.78	87.42	62.68
14	Jawa Tengah	47.94	84.60	41.51	83.23	66.27
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	45.73	88.59	29.66	83.35	65.66
16	Jawa Timur	53.57	83.20	47.36	82.46	68.29
17	Bali	54.29	89.28	42.11	85.14	70.70
18	Nusa Tenggara Barat	45.10	88.52	65.59	80.22	69.89
19	Nusa Tenggara Timur	58.28	90.51	58.65	87.07	74.97
20	Kalimantan Barat	54.35	90.71	59.35	77.83	72.90
21	Kalimantan Tengah	55.34	90.39	75.43	76.52	75.11
22	Kalimantan Selatan	54.75	89.15	50.26	76.45	71.03
23	Kalimantan Timur	51.92	88.84	82.21	85.40	75.06
24	Kalimantan Utara	57.34	93.43	99.96	81.52	80.85
25	Sulawesi Selatan	56.82	89.13	55.40	84.82	73.23
26	Sulawesi Tenggara	53.26	90.89	74.34	81.60	74.97
27	Sulawesi Tengah	55.84	91.33	83.10	87.36	77.78
28	Sulawesi Barat	56.04	90.97	72.66	81.52	75.72
29	Gorontalo	53.46	93.96	79.21	84.80	77.32
30	Sulawesi Utara	49.69	91.27	61.94	82.65	72.38
31	Maluku	55.56	90.70	90.21	86.07	78.23
32	Maluku Utara	53.08	91.64	86.58	87.55	77.45
33	Papua	57.83	94.02	100.00	70.34	80.17
34	Papua Barat	54.44	95.60	100.00	81.12	80,76
Nasional		**52.82**	**87.36**	**60.72**	**81.04**	**71.45**

2. Penurunan emisi (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah

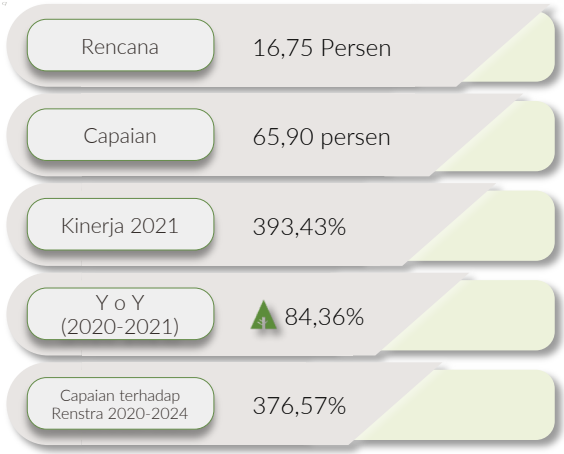

Penurunan Emisi GRK Berdasarkan Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK dengan Baseline (BAU) Tahun 2020 pada Sektor Kehutanan dan Limbah

	Limbah	Kehutanan	Total Kehutanan + Limbah
Baseline (BAU) (Juta ton CO_2e)	145,71	764,05	909,76
CM1 (Juta ton CO_2e)	143,99	447,07	591,06
Inventory (Juta ton CO_2e)	126,80	183,43	310,23
Penurunan emisi (Juta Ton CO2e)	18,91	580,61	599,53
Persentase emisi (Capaian terhadap BAU) (%)	12,98%	75,99%	65,90%

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan komitmen nasional yang dilaksanakan pada 5 (lima) sektor yaitu : sektor energi, sektor *industrial process and product use* (IPPU), sektor pertanian, serta sektor kehutanan dan limbah. Komitmen nasional dalam menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 dengan tanpa syarat (*unconditional*) dan sampai 41% dengan syarat (*conditional)*.

Kementerian LHK mengemban amanah sebagai koordinator atau *national focal point* (NFP) untuk penurunan emisi GRK pada 5 sektor, juga sebagai pelaksana penurunan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan.

Target yang ditetapkan untuk penurunan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan pada tahun 2021 adalah sebesar 16,75 persen. Angka penurunan 16,75 persen merupakan angka perbandingan antara emisi aktual hasil inventory GRK sektor limbah dan kehutanan dengan emisi baseline (BAU) penurunan GRK dalam NDC pada sektor limbah dan kehutanan. Nilai yang digunakan untuk capaian 2021 merupakan nilai hasil inventory tahun 2020 yang dilakukan pada 2021 (perhitungan dilakukan T-1)

Hasil perhitungan emisi GRK, menunjukkan bahwa angka **penurunan emisi GRK** pada sektor limbah dan kehutanan berada pada angka **65,90 persen** atau terjadi penurunan emisi sebesar **599,52 juta ton CO2e.** Angka tersebut merupakan perbandingan dari hasil inventory sebesar 310,23 juta ton CO2e dengan baseline (BAU) 909,76 juta ton CO2e.

Penurunan GRK pada sektor kehutanan sebesar 580,61 juta ton CO2e atau sebesar 75,99 persen dari target baseline sebesar 764,05 juta ton CO2e sedangkan penurunan GRK pada sektor limbah sebesar 12,98 persen atau 18,91 juta ton CO2e dari target baseline 145,71 juta ton CO2e.

Dari angka penurun sebesar 65,90 persen terhadap BAU tersebut, maka persentase capaian indikator kinerja utama (IKU) penurunan emisi gas rumah kaca sebesar **393,43%** dari target kinerja sebesar 16,75 persen

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian 65,90 persen tersebut mengalami peningkatan sebesar 84,36% dimana tingkat penurunan emisi GRK pada tahun 2020 (hasil inventory tahun 2019) sebesar 1058,97 juta ton CO2e atau -18,46 persen) dari target BAU sebesar 894,01 juta ton CO2e .

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian pada akhir tahun Renstra yaitu pada 2024 dengan target penurunan 17,50 persen, maka capaian yang diperoleh sebesar 376,57%.

Adanya peningkatan angka penurunan emisi GRK tidak lepas dari peran Kementerian LHK dalam melaksanakan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim baik di tingkat tapak, nasional maupun global

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA TAHUN 2020 PADA 5 SEKTOR

Tabel Perhitungan penurunan Emisi GRK Nasional

	TAHUN																				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baseline (BAU) - Juta tCO2e	1.318	1.476	1.508	1.540	1.582	1.620	1.682	1.752	1.827	1.908	1.999	2.031	2.104	2.182	2.266	2.358	2.452	2.552	2.652	2.756	2.870
CM 1 - Juta tCO2e	1.318	1.321	1.331	1.342	1.361	1.377	1.404	1.439	1.474	1.513	1.556	1.543	1.575	1.607	1.642	1.684	1.747	1.817	1.887	1.960	2.036
ER CM 1 - Juta tCO2e	0	155	177	198	220	243	278	313	353	396	442	488	530	575	623	674	704	734	765	797	833
ER CM 1 - %	0,0	10,5	11,7	12,9	13,9	15,0	16,5	17,9	19,3	20,7	22,1	24,0	25,2	26,4	27,5	28,6	28,7	28,8	28,9	28,9	29,0
Hasil Inventory - Juta tCO2e	810	1.054	1.245	1.331	1.509	2.374	1.336	1.354	1.637	1865	1050										
Capaian ER - %	38,54	28,59	17,45	13,56	4,61	-46,54	20,61	22,73	10,39	2,27	**47,45**										

Grafik Perbandingan hasil inventory dengan BAU dan CM1

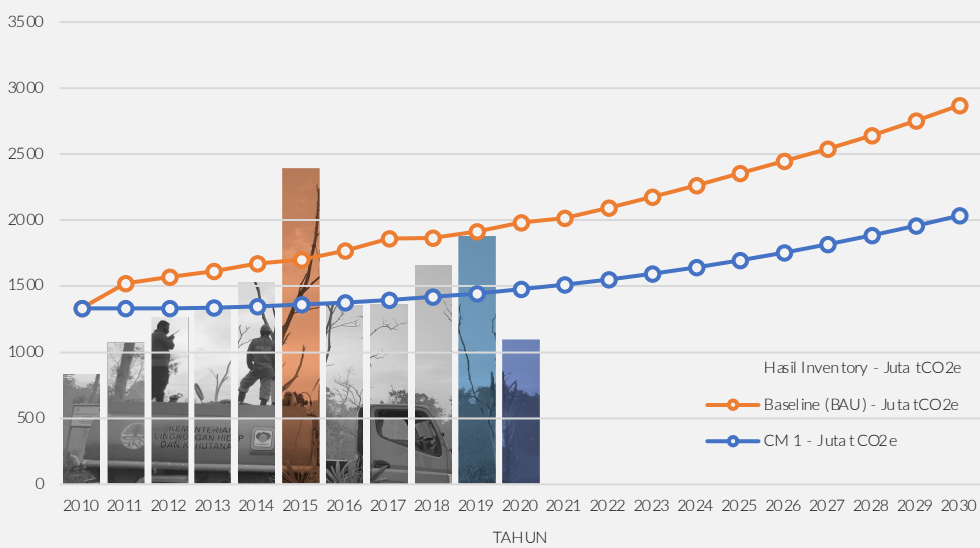

Perbandingan Emisi tahun 2019 dan 2020 per sektor

Sektor	Tahun (Mton CO_2e)		% penurunan*
	2019	2020	
Energi	638,81	584,28	8,5%
IPPU	58,91	57,19	2,9%
Limbah	133,58	126,80	5,1%
Pertanian	108,59	98,70	9,1%
FOLU	924,85	183,43	80,2%
Total	1.864,74	1.050,4	43,67%

*Persen penurunan pada table ini adalah penurunan jumlah emisi hasil inventory dari 2020 ke 2021

3. PENURUNAN LAJU DEFORESTRASI

Laju deforestasi mengalami penurunan yang drastis dari 3,51 juta hektar pada tahun 1996-2000, kemudian 1,09 juta hektar pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2016-2017, mengalami penurunan kembali menjadi 0,479 juta hektar dan menjadi 0,440 juta hektar pada tahun 2017-2018. Nilai tersebut berada di bawah target penurunan deforestasi yang ditetapkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC), yaitu sebesar 0,450 juta hektar sampai dengan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2030 target tersebut diprediksi akan menjadi 0,325 juta hektar.

Luas deforestasi selama beberapa periode terakhir mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK sebagai bentuk *corrective action* telah menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan gambut, pengendalian perubahan iklim, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), penyelesaian konflik hutan dan lahan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH/TORA), pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan Deforestasi tertinggi terjadi pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan mengalami penurunan pada periode selanjutnya. Pengukuran laju deforestasi dilakukan setiap periode 2 (dua) tahun. Periode pengukuran laju deforestasi yang terakhir adalah di tahun 2018-2019 dengan hasil angka deforestasi bruto indonesia tahun 2018-2019 sebesar 0,47 juta hektar. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2019-2020 menjadi seluas 0,12 juta hektar. Sementara itu, setelah dikurangi reforestasi pada masing-masing periode, angka deforestasi netto tahun 2018-2019 menjadi sebesar 0,46 juta hektar. Pada tahun 2019-2020 menjadi seluas 0,12 juta hektar.

Dari data yang didapatkan, laju deforestasi tahunan menurun kembali menjadi 0,48 juta hektar. Pada tahun 2016 hingga 2017, luasan deforestasi di kawasan hutan mencapai 0,30 juta hektar (61,9 persen dari total). Angka tersebut menurun dari angka 0,43 juta hektar yang tercatat pada tahun 2015 hingga 2016. Demikian pula pada tahun 2016 hingga 2017, luasnya deforestasi di lahan publik (kawasan bukan hutan) yang diperuntukkan bagi tujuan lain (Area Penggunaan Lain/APL) juga menurun menjadi 0,18 juta hektar (38,1 persen dari total). Dalam kurun waktu 2017 hingga 2018, total deforestasi bersih kembali turun menjadi 0,44 juta hektar. Hal ini pada keseimbangan yang relatif sama antara deforestasi di kawasan hutan dan APL.

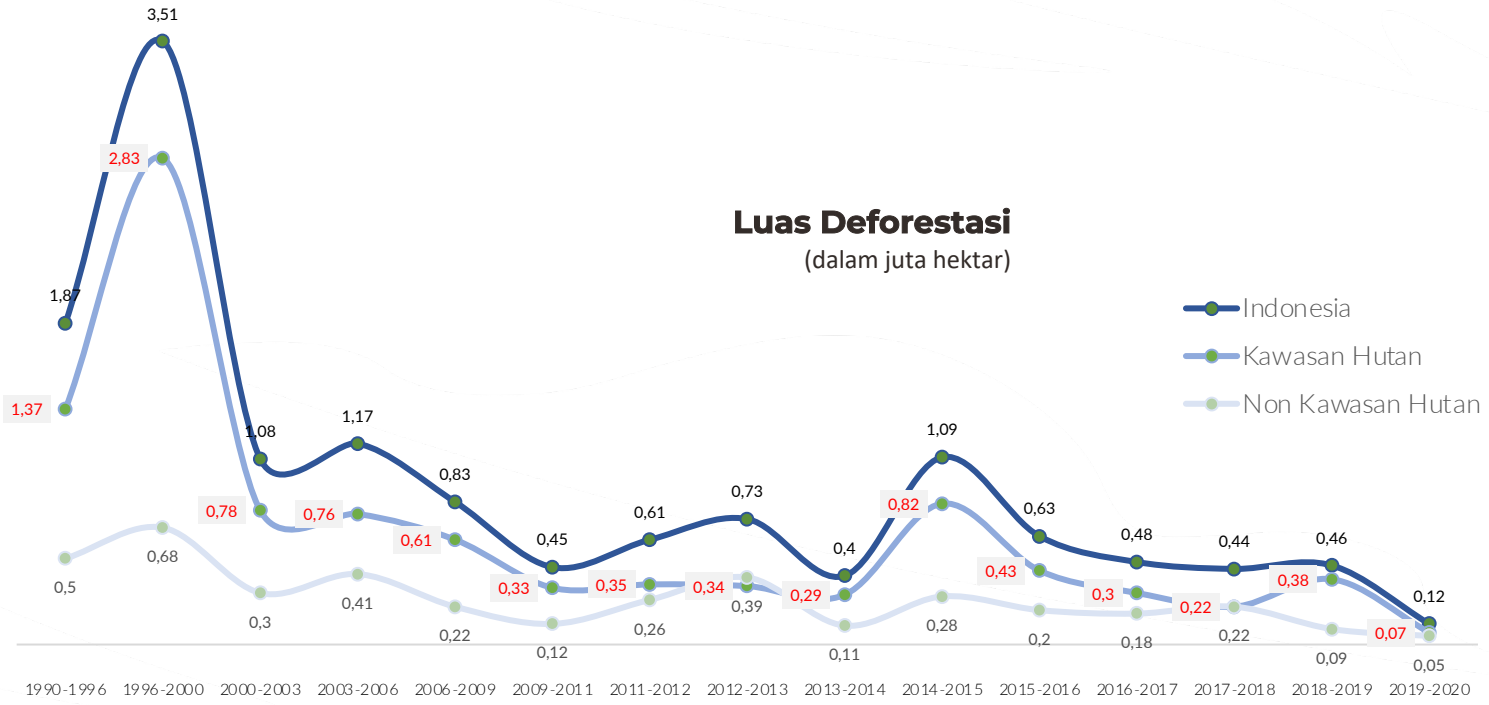
Luas Deforestasi
(dalam juta hektar)
Indonesia
Kawasan Hutan
Non Kawasan Hutan
1,87
3,51
1,08
1,17
0,83
0,45
0,61
0,73
0,4
1,09
0,63
0,48
0,44
0,46
0,12
1,37
2,83
0,78
0,76
0,61
0,33
0,35
0,34
0,29
0,82
0,43
0,3
0,22
0,38
0,07
0,5
0,68
0,3
0,41
0,22
0,12
0,26
0,39
0,11
0,28
0,2
0,18
0,22
0,09
0,05
1990-1996
1996-2000
2000-2003
2003-2006
2006-2009
2009-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

4. INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

Rencana	63 poin
Capaian	50,06 poin
Kinerja 2021	79,46%
Y o Y (2020-2021)	▲ 1,25%
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	71,51%

Kinerja pengelolaan sampah sangat menentukan wajah suatu kota/kabupaten dan provinsi hingga akhirnya penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah secara nasional. Sistem kinerja pengelolaan persampahan yang baik dapat meningkatkan kebersihan dan kesehatan kota. Sebaliknya, sistem kinerja pengelolaan persampahan yang buruk akan menyebabkan buruknya tingkat kebersihan dan kesehatan kota tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah. Selain itu, sistem kinerja pengelolaan persampahan juga merupakan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah/IKPS tahun 2021 sebesar 50,06 poin dari target 63 poin. Nilai Indeks baru terealisasi sebesar 79,46% dan belum mencapai target karena adanya beberapa kendala, antara lain: (1) Kabupaten/Kota yang telah melaporkan dan mengisi data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional/SIPSN kurang dari 50%, dimana, hal ini mempengaruhi rasio capaian terhadap target dan kapasitas, (2) Kabupaten/Kota yang menyampaikan kebijakan (Perda RPJMD,

Perda Pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Jakstrada (Kebijakan Strategis Daerah), dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Pengurangan Sampah, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Penanganan Sampah, serta Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Pembatasan Sampah melalui SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) hanya sebesar 55,25%, dan terakhir (3) Indikator outcome dan dampak, kabupaten/kota yang menyampaikan data hanya sekitar 70%.

Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Sampah

2020 = 49,44

2021 = 50,06

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penanganan sampah di daerah adalah melalui intervensi fisik berupa infrastruktur fasilitas penanganan sampah. Pada tahun anggaran 2021 telah dibangun PDU Kapasitas 10 ton/hari di Kota Metro, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Pariaman, dan Kabupaten Kudus dan Rumah Kompos Kapasitas 2 Ton/hari di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Magelang. Diperkirakan sampah yang akan tertangani dari PDU sebesar 14.400 ton dan dari Rumah Kompos sebesar 1.440 Ton. Dari intervensi fisik tersebut, diharapkan sampah yang ditangani melalui PDU dapat menjadi bahan baku oleh produsen kertas atau plastik dan dapat mendukung penanganan sampah di Destinasi Wisata melalui Rumah Kompos.

Pada tahun 2021 juga telah ditetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular sesuai mandat Pasal 7 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini mendorong sinergitas pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Selain itu dalam upaya pengurangan sampah, pemerintah mendorong produsen untuk melakukan pengurangan sampah antara lain dengan cara : (a) membatasi timbulan sampah dengan menggunakan produk kemasan atau wadah yang mudah diurai oleh alam dan meminimalkan timbulnya sampah, (b) mendaur ulang sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang, serta menarik kembali sampah dan produk kemasan atau wadah dari konsumen untuk didaur ulang, serta (c) Memanfaatkan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan kembali, menarik kembali kemasan produk atau wadah dari konsumen untuk digunakan kembali.

Pengurangan sampah oleh produsen juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengurangan jumlah timbulan sampah. Kelompok produsen yang tersebut antara lain: (a) bidang manufaktur seperti produsen makanan dan minuman, kebutuhan pokok sehari-hari, kosmetik serta kebutuhan pribadi. Jenis sampah yang dihasilkan antara lain botol PE, botol PET, produk kemasan atau wadah berbahan PS dan PVC, sedotan plastik, kemasan kaleng aluminium, kemasan kaca dan kemasan kertas atau karton; (b) bidang ritel meliputi toko modern, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat. Jenis sampah yang diatur adalah kantong plastik sekali pakai berbahan plastik PE yang dikenal sebagai kantong kresek; (c) bidang jasa makanan dan minuman seperti restoran, kafe, hotel, hingga jasa katering. Jenis sampah yang diatur antara lain plastik sekali pakai berbahan PS, PP, dan PE seperti sedotan plastik, alat makan, botol minum, serta peralatan makan sekali pakai berbahan kertas.

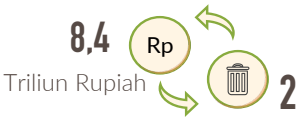

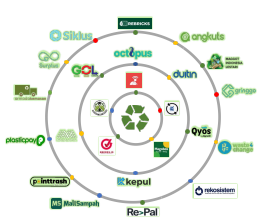

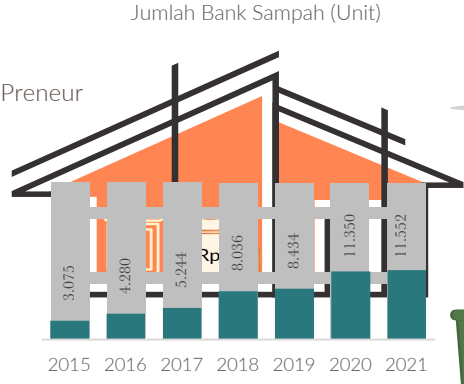

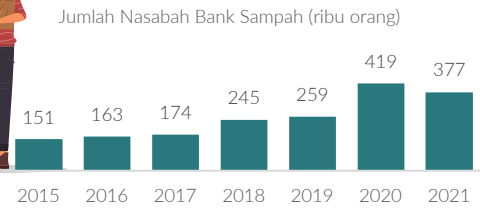

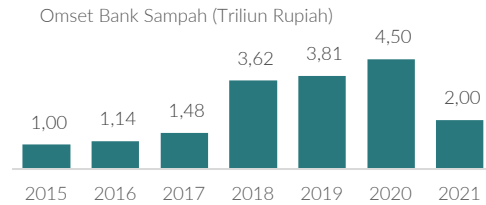

Keterangan :
Mesin Pencacah Sampah yang berada di Desa Mulyoagung Kabupaten Malang. Saat ini, TPST 3R Mulyoagung Bersatu dikelola oleh masyarakat melalui wadah kelompok swadaya masyarakat Mulyoagung yang mampu mengelola sampah 20.160 kg/hari dari 12 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 48.000 jiwa. Reduksi sampah dihasilkan mencapai 70-80%, sehingga residu sampah yang dibawa ke TPA sebesar 20%. Pendapatan yang dikelola di TPST 3R Mulyoagung sekitar Rp270.000.000,- per bulan.

Foto : Azan Akbar Senga
Ilustrasi oleh : M Desby Aditia dan Saraswati W

5. LUAS LAHAN DALAM DAS YANG DIPULIHKAN KONDISINYA

Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya pada tahun 2021 seluas 151.073 ha. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 269,77% dengan target 56.000 ha. Capaian terhadap renstra yaitu 41,19%. Luas kawasan hutan tediri dari kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, persemaian permanen, bibit produktif, rehabilitasi DAS dan reklamasi.

Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

DAS yang dipulihkan (Hektare)

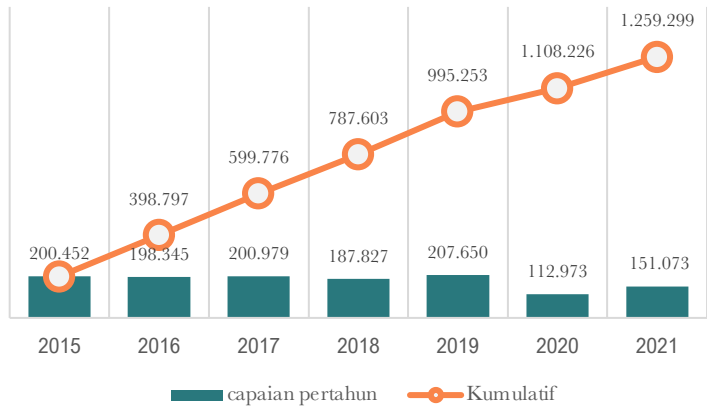

Bangunan KTA (unit)

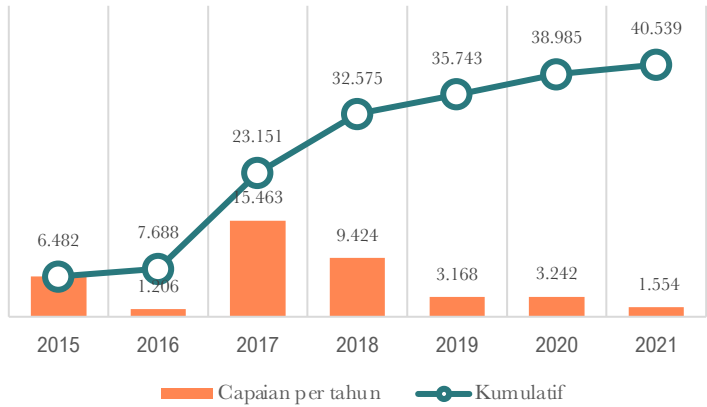

Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air secara vegetatif (tidak termasuk rehabilitasi mangrove). Capaian lahan dalam DAS yang dipulihkan selama periode tahun 2015-2021* secara kumulatif seluas 1,26 juta Ha. Dari target Perjanjian Kinerja 2021 sebesar 56.000 Ha. Pelaksanaan RHL pada tahun 2020-2021 seluas 266.981 Ha sedangkan secara sipil teknis telah terbangunan sebanyak 1.554 unit (dam penahan dan gully plug).

Lahan DAS Yang dipulihkan

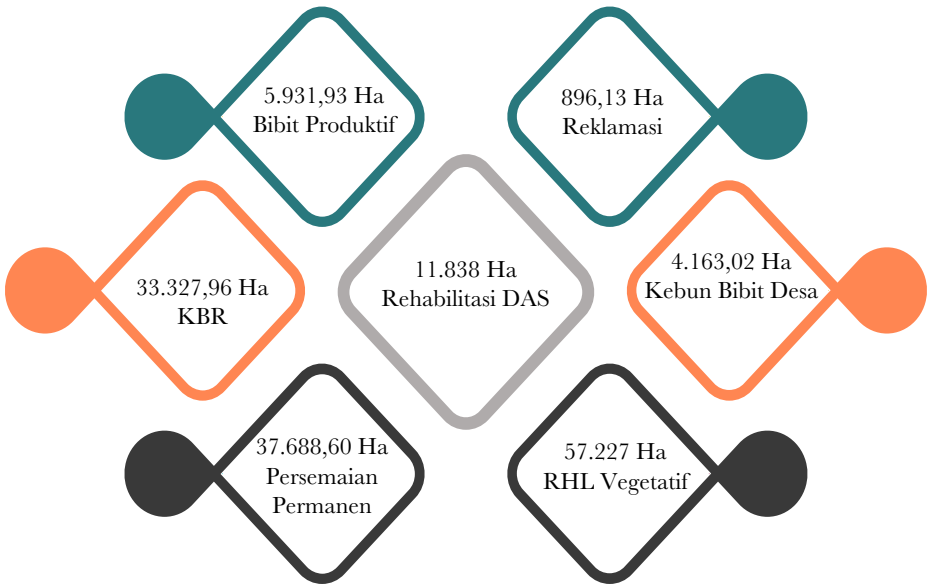

Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air 189.278.753 hektare, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya.

Luas DAS yang dipulihkan tahun 2021 adalah sebesar 151.073 Ha (269,77%) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PDASRH sebesar 56.000 Ha

Keterangan :
Monumen "Forest for People", sebuah karya seni terbuat dari tembaga yang menggambarkan tema Kongres Kehutanan Sedunia ke-8, yakni hutan untuk rakyat (Forest for People) yang berada di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc. Komplek Manggala Wanabakti.

Ilustrasi oleh : M Desby Aditia dan Saraswati W

6. LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*/HCV) adalah luas kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial. Entitas yang diukur adalah luasan kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati yang tinggi secara partisipatif di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Inventarisasi dan verifikasi ruang-ruang perlindungan keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024 mengamanatkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan yang diduga memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) seluas 27 Juta hektare dan 43 Juta hektare.

Pada tahun 2021, telah ditetapkan luasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 7,3 juta hektar sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target tahun 2021 mencakup luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di dalam kawasan konservasi seluas dan luas kawasan 2,9 juta hektar dan di luar kawasan konservasi seluas 4,4 juta hektar. Tahun 2021 telah dilakukan verifikasi kawasan sebagai perlindungan hayati seluas **10.655.955,99** hektar, yang terdiri atas luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi seluas **1.723.896,39** Ha dan di luar kawasan konservasi seluas **8.932.059,60** ha. Capaian Indeks Kinerja Utama tahun 2021 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar **145,97%**, namun apabila dilihat dari target lokasi di dalam dan diluar kawasan konservasi maka capaian luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

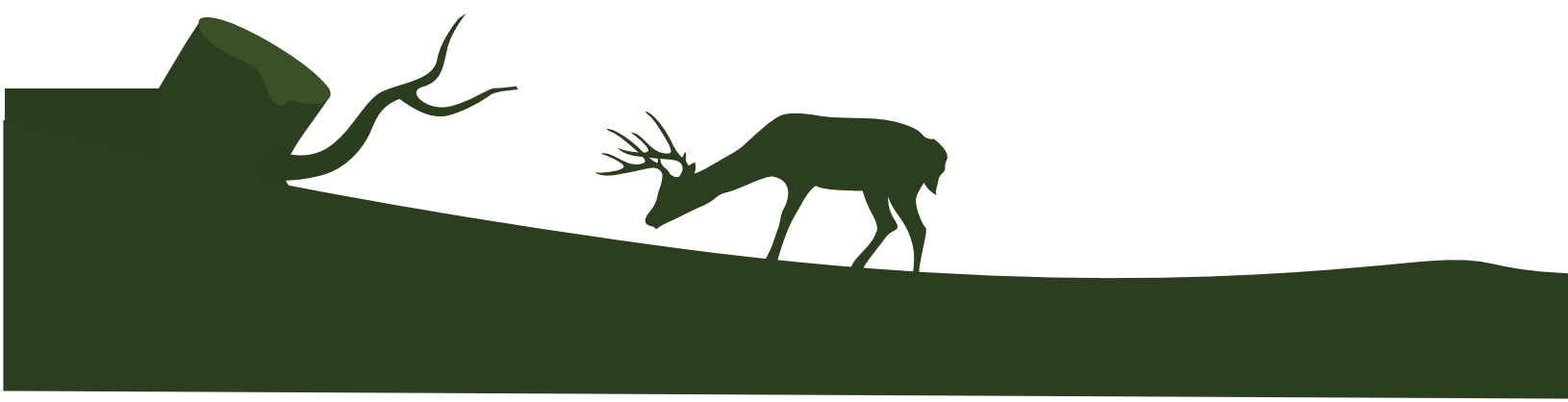

Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Dalam Kawasan Konservasi

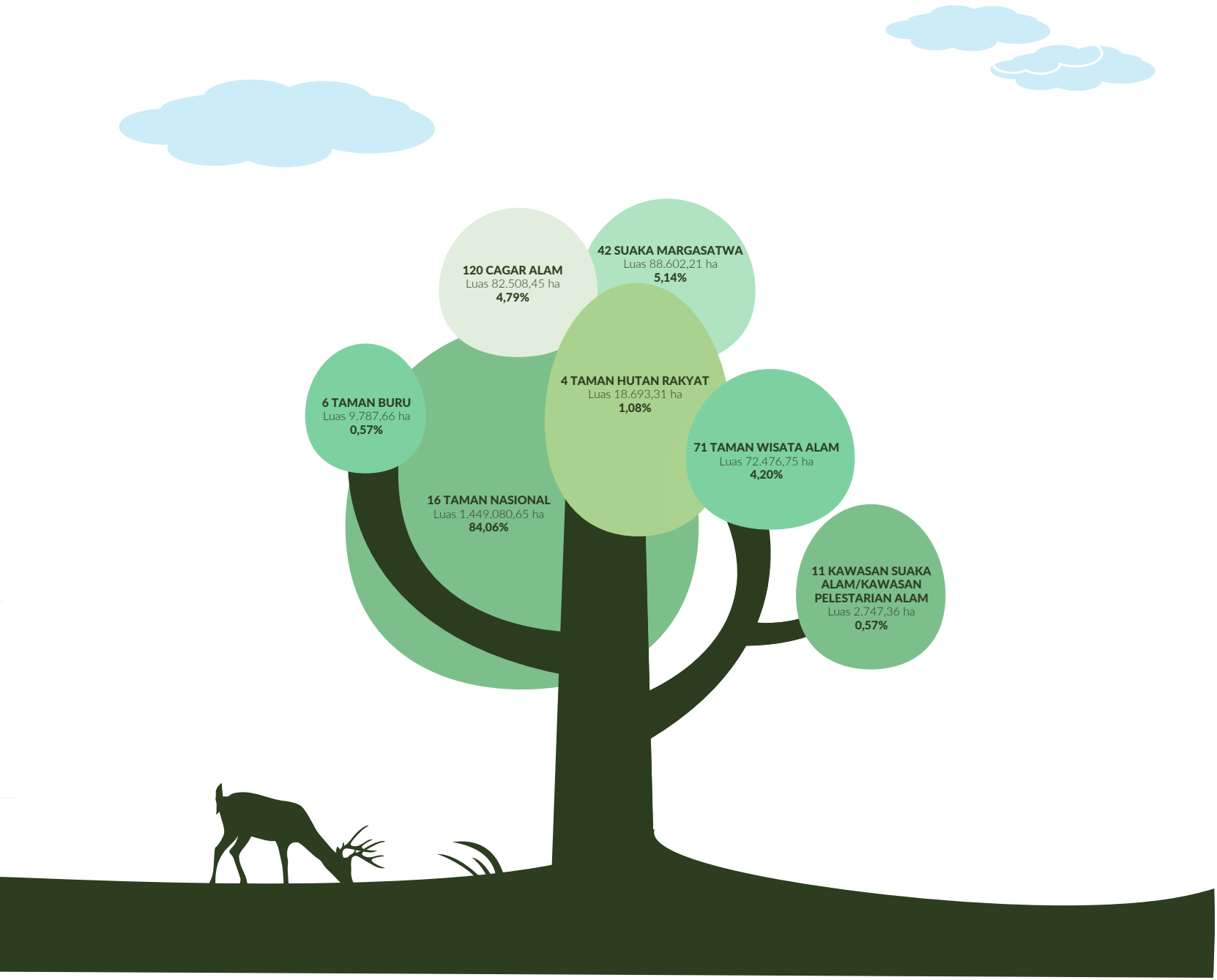

7. KONTRIBUSI SEKTOR LHK TERHADAP PDB NASIONAL

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara pada suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDB Subsektor Kehutanan & Penebangan Hutan 2021

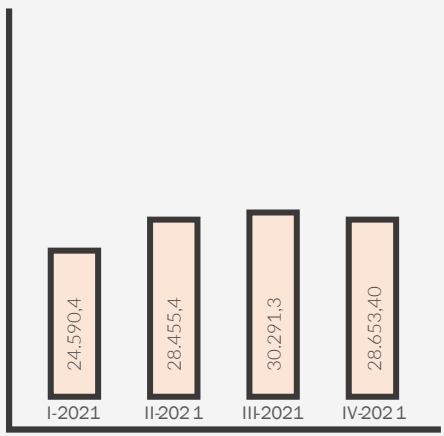

PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 per Triwulan (miliar Rp)

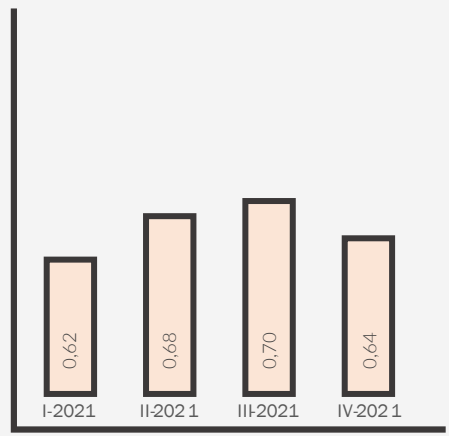

Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 per Triwulan (%)

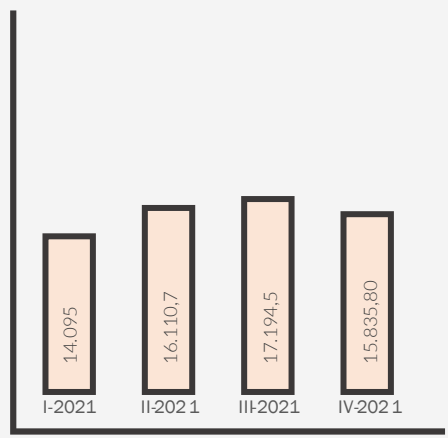

PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 per Triwulan (miliar Rp)

Entitas pengukuran PDB sektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Serta mencakup jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yg dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yg berasal dari hutan rimba, maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya, tercakup juga adalah jasa penunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yg dilakukan atas dasar kontrak.

Selanjutnya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk sektor kehutanan meliputi : (1) KBLI 021, terdiri atas pengusahaan Hutan yang berasal dari pengusahaan Hutan Tanaman, Hutan Alam, dan HHBK; (2) KBLI 022 dalam bentuk penebangan dan pemungutan kayu; (3) KBLI 023 meliputi pemungutan HHBK; dan, (4) KBLI 024 meliputi jasa penunjang kehutanan.

Pada tahun 2021 ini Indonesia masih melawan pandemi Covid 19 dan berjuang menguatkan perekonomian. Meskipun keadaan ekonomi yang belum stabil, PDB sektor LHK mencapai 111,99 triliun rupiah (menurut harga berlaku), hasil ini mencapai target 105,7% dari 106 triliun rupiah. Kinerja tahun 2021 meningkat 3,09% dari tahun 2020 meskipun tahun ini Indonesia mengalami dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Dari target Renstra 2020-2024 (PDB kehutanan menurut harga berlaku), pada tahun ini baru mencapai 38,28%. Sedangkan untuk PDB sektor kehutanan menurut harga konstan juga mengalami peningkatan meskiun sedikit. Pada tahun 2021 ini meningkat 0,06% dari tahun 2020 dengan capaian 63,23 triliun rupiah.

Merebaknya Varian Delta pada Triwulan 3-2021 secara umum menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi, namun situasi perekonomian global pada Triwulan 4 2021 memberikan kinerja yang lebih positif dan membaik.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46 persen; Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,84 persen.

8. PENINGKATAN NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL DAN BIOPROSPECTING

Perolehan Nilai Ekspor hasil hutan disumbangkan dari produk kayu olahan dan TSL. Kinerja ekspor kayu olahan tahun 2021 mencapai US$ 14,75 Miliar. Kinerja tersebut meningkat secara signifikan sebesar 33,3% dibandingkan capaian tahun 2020. Perbandingan rencana dan capaian di tahun 2021 menggambarkan kinerja sebesar > 120 % untuk ekspor kayu olahan dari target US$ 9,5 Miliar. Sedangkan untuk ekspor TSL memberikan hasil kinerja sebesar > 120 % dengan capaian mencapai Rp. 11,79 triliun (US$ 819,95 juta) dengan kurs 1 USD setara dengan Rp. 14.378,92. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan hingga 9,26%.

Capaian kinerja untuk nilai ekspor hasil hutan dari kedua sektor tersebut sebesar 134,22% atau US$ 15,57 miliar (USD 14,75 miliar + USD 0,82 miliar) dari target US$ 11,6 miliar. Jika dibandingkan dengan target renstra, pada tahun akhir pelaksanaan renstra yaitu pada tahun 2024 diharapkan tercapai sebesar US$ 70 milliar maka pada tahun 2020 telah tercapai sebesar 39,14 %.

Kinerja Ekspor Hasil Hutan Kayu

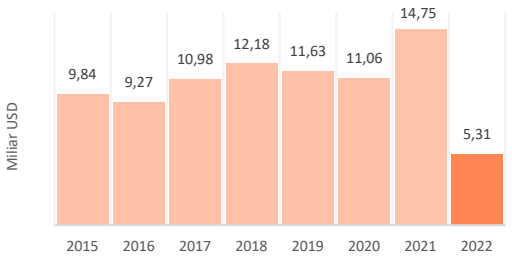

Kinerja Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar

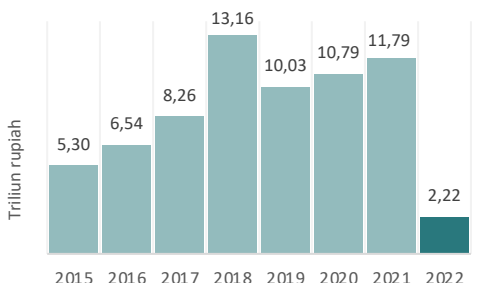

*Capaian hingga bulan Mei 2022

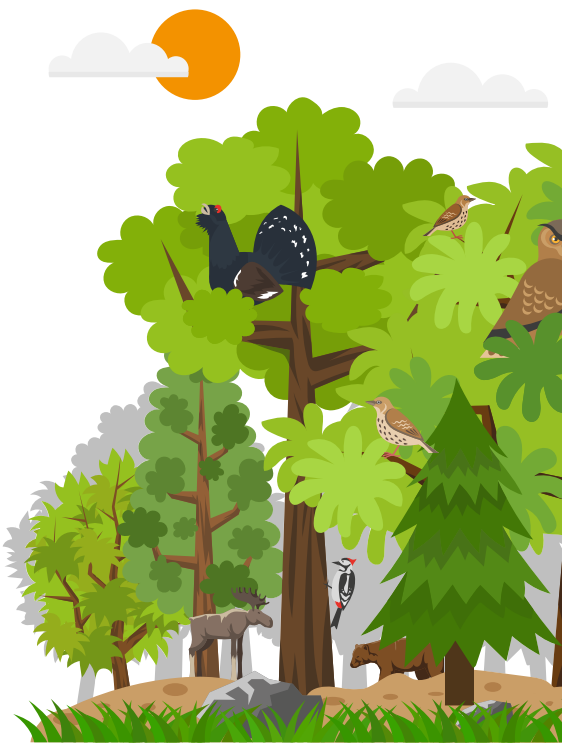

Tren Kinerja Ekspor Hasil Hutan Kayu dari Jan 2020 – Des 2021

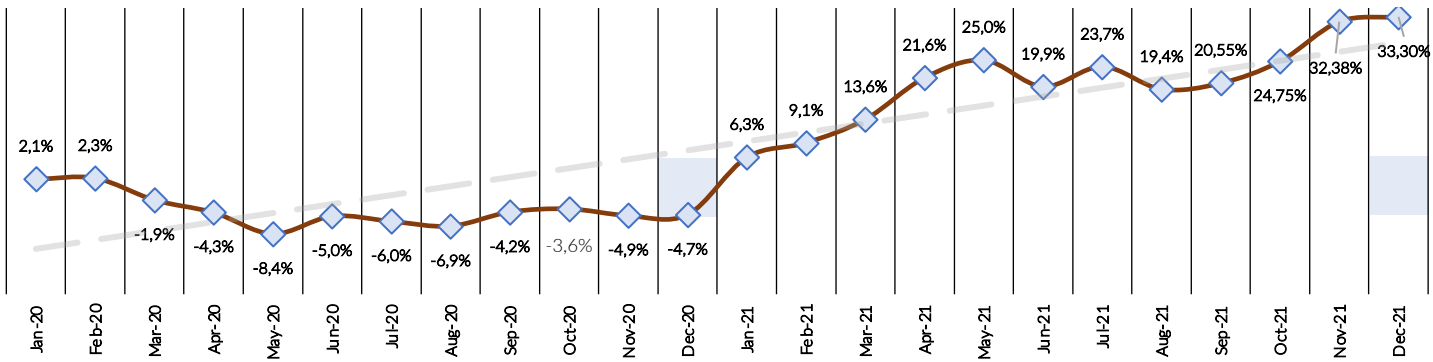

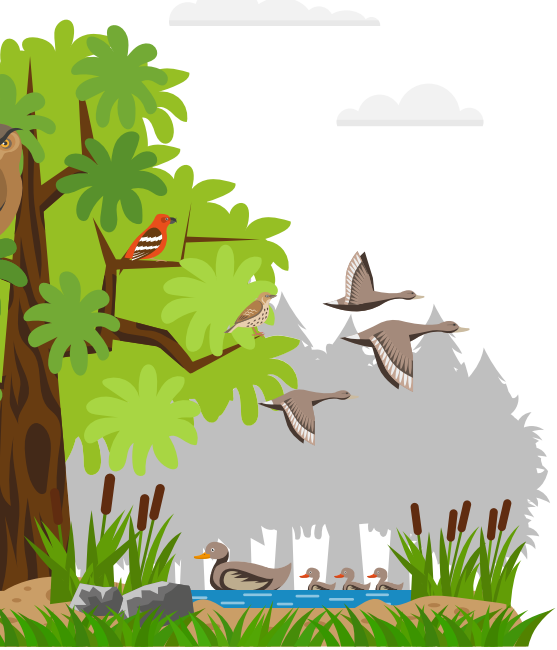

Di tengah sulitnya masa pandemi Covid-19 ini, hampir seluruh aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 turut memberikan tekanan berat terhadap kinerja sektor usaha kehutanan, pasalnya negara utama tujuan ekspor kayu olahan Indonesia yakni China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea Selatan turut terdampak dari pandemi, sehingga harus melakukan pembatasan transportasi antar negara termasuk ekspor impor.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri kehutanan di hulu antara lain mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan pengembangan *Agroforestry* di areal kerja IUPHHK-HTI, Kemudian mewujudkan pembangunan multiusaha di areal IUPHHK, serta penyederhanaan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan hutan produksi.

Pada industri di hilir, beberapa upaya yang dilakukan adalah peningkatan luas penampang produk ekspor industri kehutanan, memperluas keberterimaan pasar dengan memperkokoh penerapan SVLK, serta fasilitasi sertifikasi SVLK untuk Usaha Kecil Menengah.

Tren kinerja Positif ekspor hasil hutan setidaknya telah membangkitkan ekonomi di masa pandemi, pada Desember 2021 nilai ekspor hasil hutan kayu sebesar 14,75 Miliar USD, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 33,3%. Produk *woodchip*, *veneer* dan panel menjadi jenis dengan peningkatan produksi tertinggi. Kementerian LHK akan terus berusaha menjaga tren positif ini dengan updaya dan kebijakan yang sesuai dengan kedaan di lapangan.

Nilai Ekspor Kayu Olahan
Berdasarkan Jenis Produk 2021 (US$ Miliar)

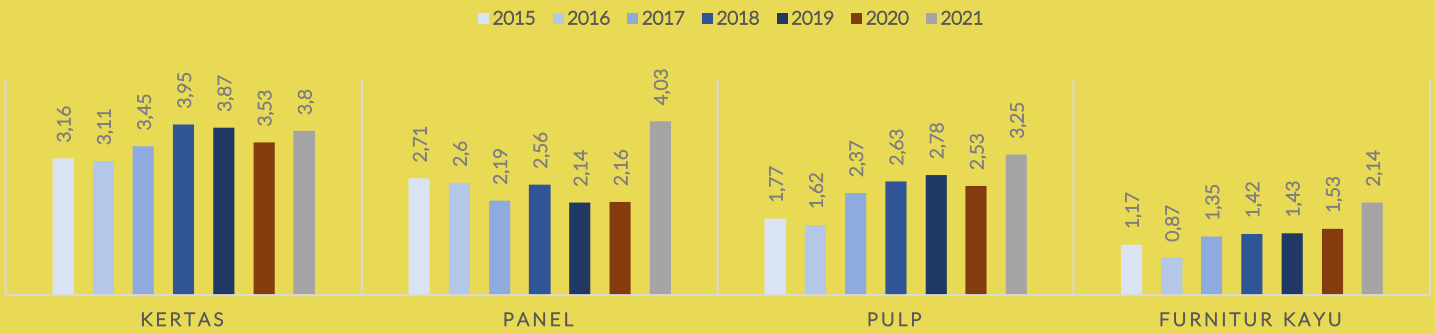

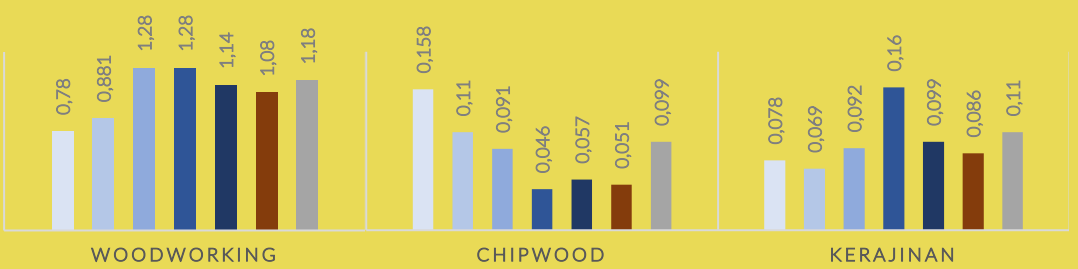

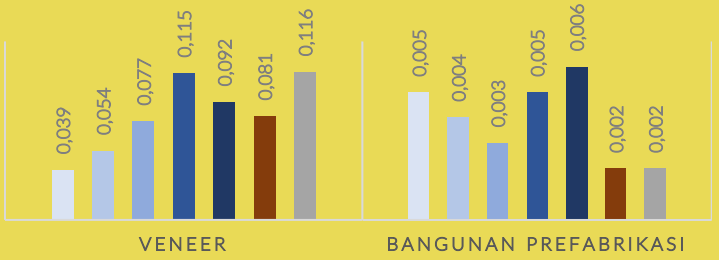

Netto Ekspor Kayu Olahan
Berdasarkan Jenis Produk 2021 (Juta Ton)

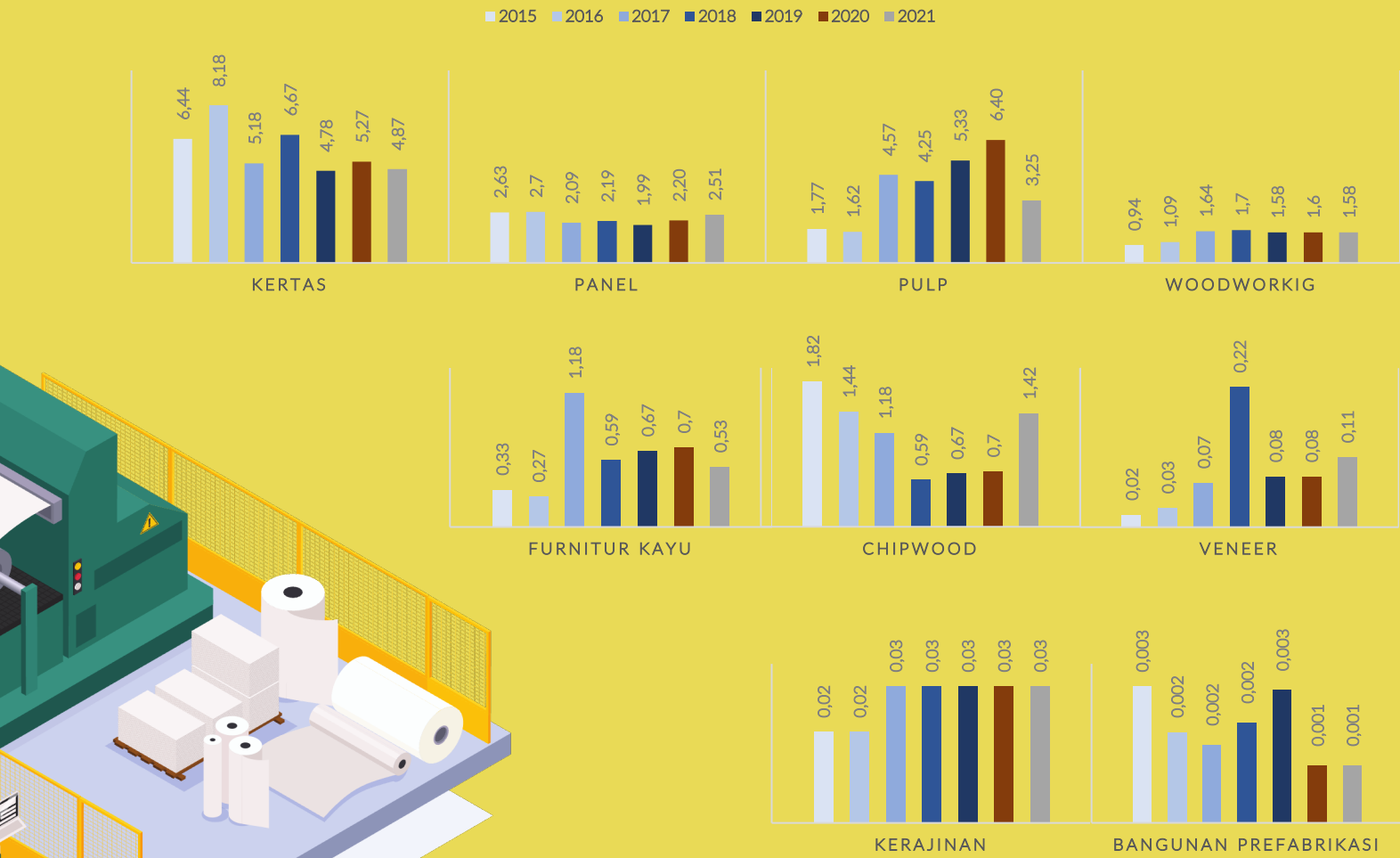

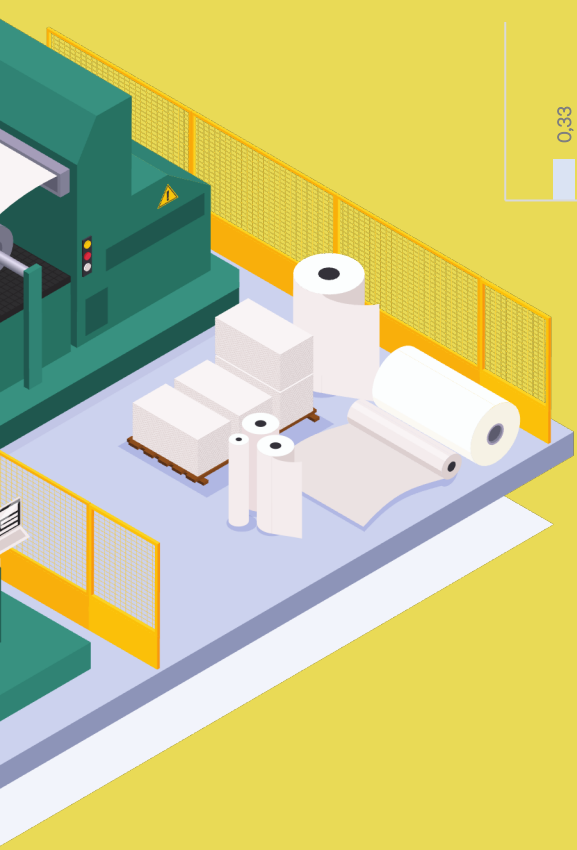

Nilai Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar per Komoditi (miliar rupiah)

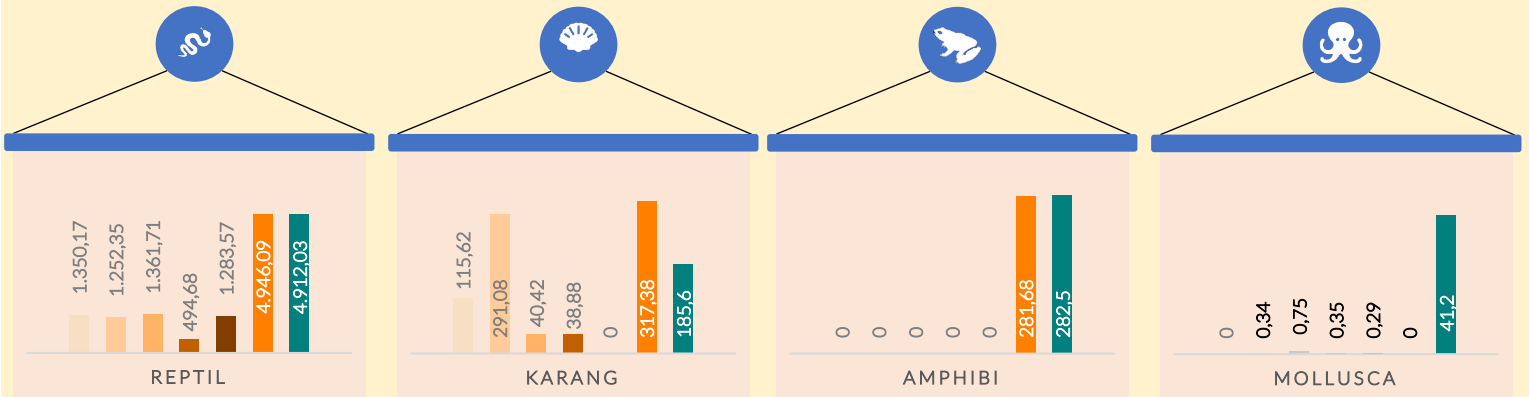

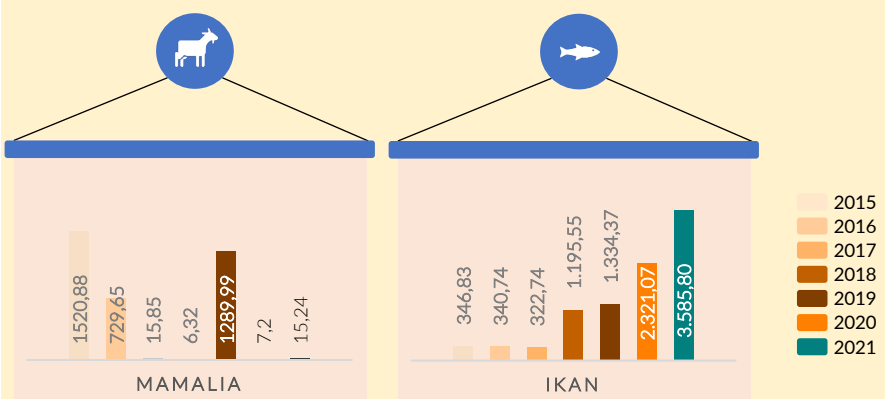

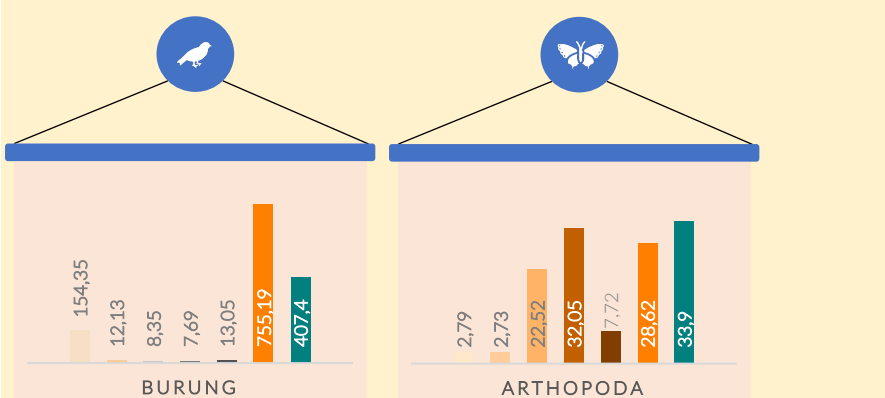

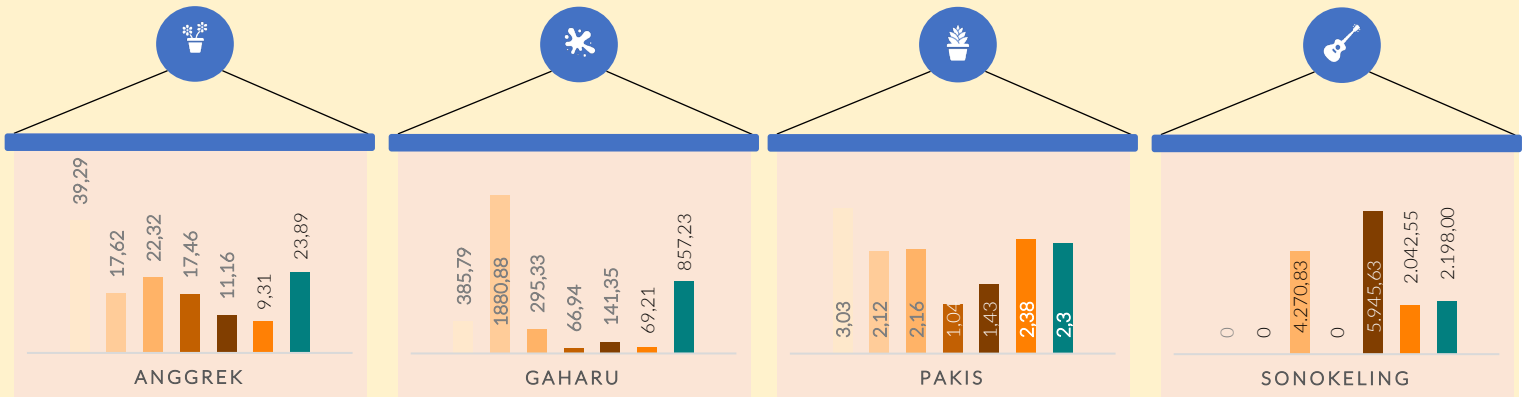

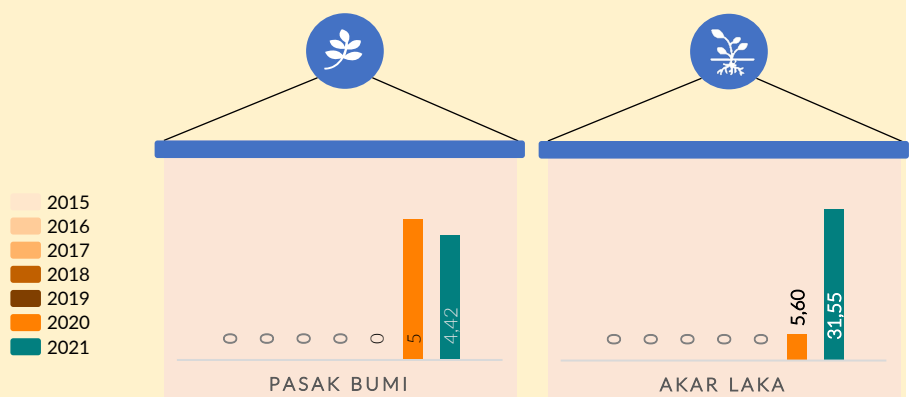

Kinerja ekspor TSL pada tahun 2021 secara total mencapai Rp. 11.795.822.273.144. Capaian ini merupakakan hasil ekspor TSL yang berasal dari habitat alam dan penangkaran. Sebanyak Rp 7.595.336.067.013 atau 64,4% berasal dari komoditas hasil habitat alam sementara sisanya Rp 4.200.486.206.131 atau 35,6% berasal dari komoditas hasil penangkaran .

Nilai ekspor TSL pada tahun 2021 dihasilkan dari 8 (delapan) komoditas satwa dan 6 (enam) komoditas tumbuhan liar. Capaian nilai ekspor yang berasal dari hasil ekspor satwa liar sebesar Rp 8.678.191.588.646 (73,57%), dengan reptil sebagai komoditas ekspor terbesar. Sementara capaian yang berasal dari ekspor tumbuhan liar sebesar Rp 3.117.630.684.498 (26,43%) dengan Sonokeling sebagai komoditas ekspor terbesar.

9. PENINGKATAN NILAI PNBP FUNGSIONAL LHK

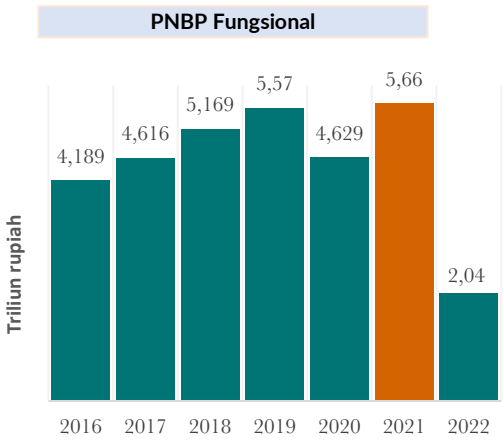

*Capaian hingga bulan Mei 2022

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. KLHK sebagai satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang menjadi penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

Entitas pengukuran mencakup PNBP fungsional dan PNBP umum. Adapun yang dimaksud dengan PNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan PNBP Umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, melainkan berasal dari sumber-sumber sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan, seperti: (1) pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan, (2) pendapatan dari penjualan tanah, gedung, bangunan; pendapatan dari KSP tanah, gedung, bangunan, (3) pendapatan dari pemindahan BMN, (4) pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), (5) pendapatan penjualan peralatan dan mesin, (6) pendapatan ganti kerugian Negara, dan (7) pendapatan anggaran lain-lain; dan sebagainya.

Penerimaan negara bukan pajak sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara. Penerimaan negara dari produksi kayu bulat dan pendapatan jasa lingkungan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya melalui kunjungan wisata telah melahirkan devisa negara sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Meskipun dengan adanya pandemi Covid-19 ini beberapa kegiatan wisata yang terpaksa harus ditutup untuk mengurangi penyebaran virus Kembali dibuka dengan protokol Kesehatan yang ketat. Sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan negara khususnya di sektor pariwisata. Selain itu juga kembali dibukanya akses beberapa negara seperti pelabuhan dan bandara sebagai pintu ekspor kayu olahan dari Indonesia, juga turut menyumbang pertumbuhan ekonomi dan PNBP khususnya KLHK.

Pada tahun 2021, capaian PNBP fungsional KLHK mencapai 5,66 triliun rupiah. Bila dibandingankan dengan tahun 2020 kinerjanya meningkatn sebesar 22,27%. Sedangkan berdasarkan target Renstra 2020-2024 sudah mencapai 38,75%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional dari Jenis Pendapatan

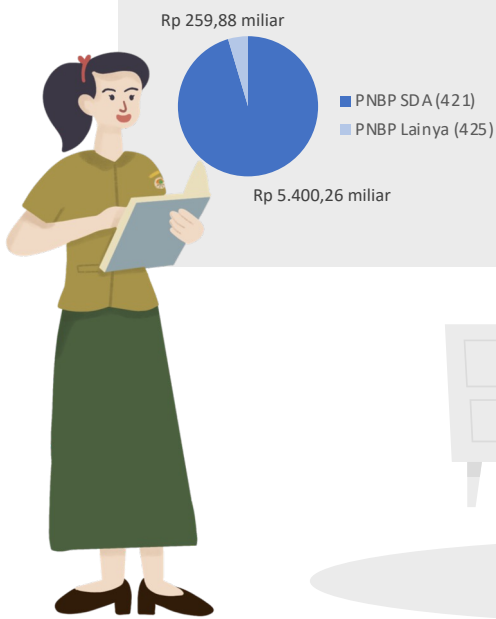

Pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penerimaan bukan pajak fungisonal yang terdiri dari Pendapatan Kehutanan (4214), Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasaran (4251), Pendapatan Perizinan di Bidang LHK (4252), Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Teknologi (4254), Pendapatan Wisata Alam (4256), Pendapatan Hasil lelang Kayu Temuan dan Lelang TSL yang tidak dilindungi (4256), dan Pendapatan Denda (4258).

Kunjungan Wisatawan di Kawasan Konservasi

TOTAL PENGUNJUNG TAHUN 2021
2.947.971 orang

Kunjungan wisatawan di kawasan konservasi terdiri dari pengunjung dari dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun 2021 ini kunjungan wisatawan masih mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan di pertengahan tahun 2021 Kembali merebaknya pandemi Covid-19 Varian Delta, sehingga banyak Kawasan Konservasi yang Kembali ditutup untuk mencegah terjadinya penularan virus yang semakin luars.

Wisatawan Nusantara

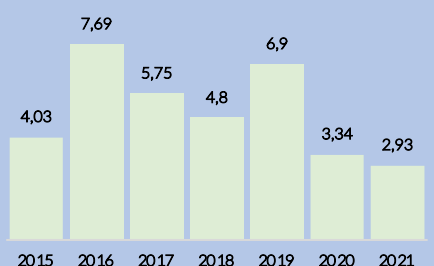

Juta Orang

Wisatawan Mancanegara

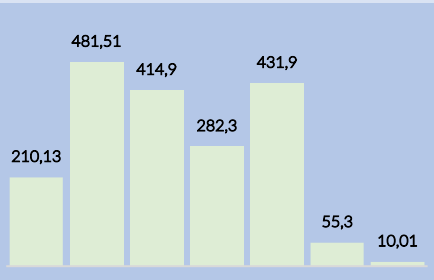

Ribu Orang

10 Taman Nasional dengan Kunjungan Tertinggi

1.	TN Gunung Ciremai	: 326.923 orang
2.	TN Bantimurung Bulusaraung	: 186.764 orang
3.	TN Gunung Gede Pangrango	: 155.937 orang
4.	TN Bromo Tengger Semeru	: 139.062 orang
5.	TN Gunung Halimun Salak	: 117.175 orang
6.	TN Alas Purwo	: 101.977 orang
7.	TN Gunung Merbabu	: 69.005 orang
8.	TN Komodo	: 64.723orang
9.	TN Bali Barat	: 43.429 orang
10.	TN Baluran	: 30.672 orang

Kawasan konservasi di Indonesia selain menyimpan potensi keanekaragaman hayati, akan tetapi juga menyimpan potensi keindahan alam yang dapat dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata alam. Kedua potensi tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang pemanfaatannya sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku dan tetap harus memperhatikan kelestariannya. Namun di tengah pandemi ini, sektor wisata masih berusaha keras untuk bangkit dari keterpurukan dengan adanya reaktivasi kawasan yang tidak lupa tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Beberapa isu terkait pemanfaatan jasa lingkungan sedang dilakukan pembahasan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di bidang pariwisata dengan penyesuaian kebijakan di tengah merebaknya pandemi Covid-19 ini.

10. PERHUTANAN SOSIAL

Program perhutanan sosial (PS) bertujuan- untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan.

Program PS membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses Kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 juta hektar luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini hingga akhir tahun 2021, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 4,90 Juta Hektar dengan capaian tahun 2021 ini seluas 475.135 hektar.

Program perhutanan sosial secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengembangan pengelolaannya. Pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial, hingga 2021 sebanyak ±1.049.185 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih lagi masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari hasil budidaya tanaman dan jangka panjangnya masyarakat mendapatkan bukti kepemilikan lahan yang sah dalam bentuk SK Hijau (SK perhutanan Sosial)

Penerbitan SK perhutanan sosial menjadi bukti bagi masyarakat dalam hak pengelolaan hutan sosial. Penerbitan SK perhutanan sosial hingga tahun 2021 ini sejumlah 7.479 unit SK, dengan jumlah SK yang diterbitkan tahun ini sejumlah 735 unit SK. Penerbitan SK perhutanan Sosial bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi semangat masyarakat dalam menjaga kelestarian Kawasan hutan siring dengan manfaat ekonomi yang akan diperoleh.

Realisasi Luas Perhutanan Sosial per Tahun (Juta Hektar)

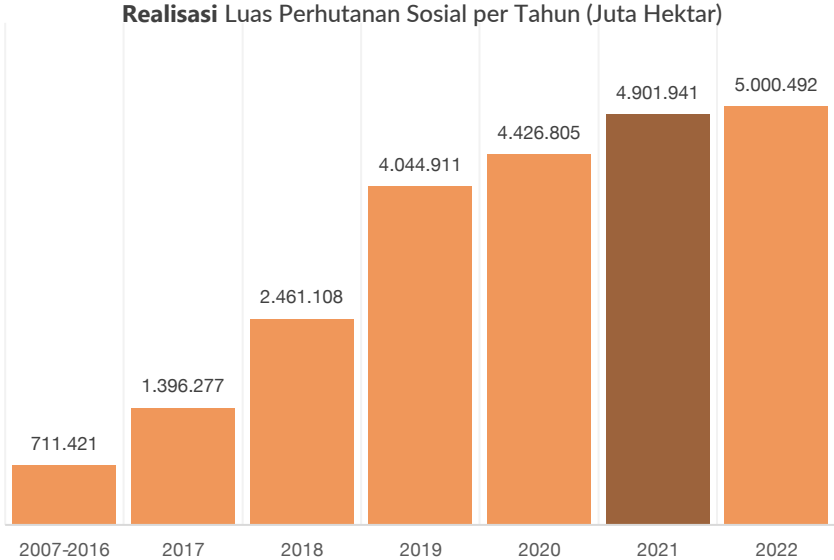

Jumlah Rincian Luas PS
5 Juta Hektar

LUAS (HA)	SKEMA
1.987.661,21	Hutan Desa (HD)
900.420,54	Hutan Kemasyarakatan (HKM)
353.391,08	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
594.597,95	Kemitraan Kehutanan
1.164.422	Hutan Adat (HA)

PETA SEBARAN PERHUTANAN SOSIAL

Luas Total PS: **4.901.941,64 Ha**
Jumlah KK: **1.049.185 KK**
Jumlah SK: **7.479 Unit**

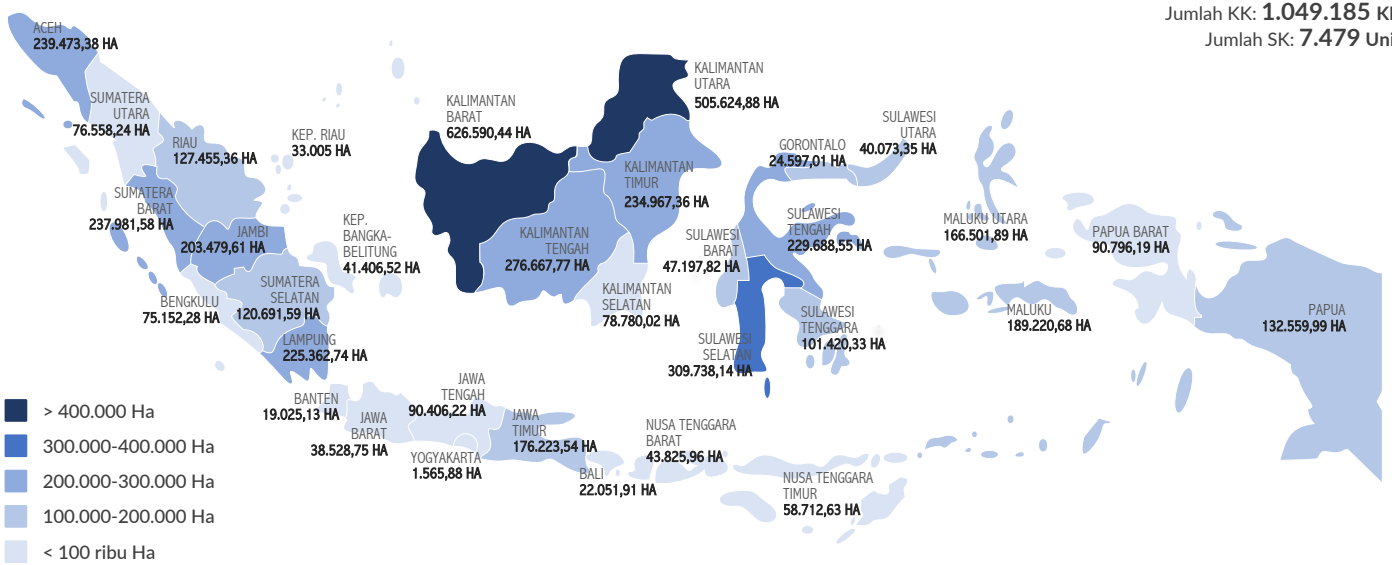

Luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK), namun harus bergulir sebagai perekonomian yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kepala keluarga yang telah memperoleh akses kelola Kawasan hutan, maka dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Capaian KUPS yang telah terbentuk hingga tahun 2021 sejumlah 8.154 KUPS. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena masyarakat di daerahnya masing-masing dapat merasakan manfaat pembentukan perhutanan sosial secara langsung.

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

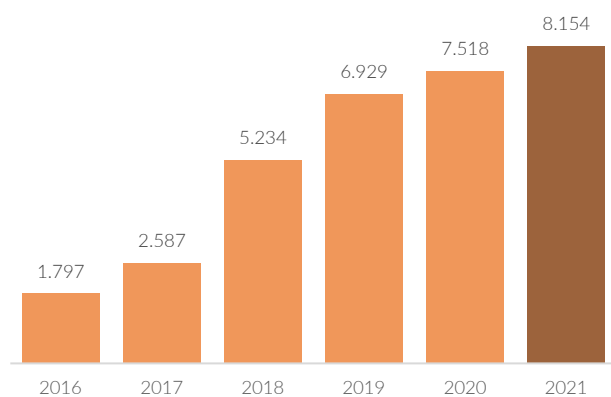

KUPS memiliki empat klasifikasi yaitu Kategori Biru, Kategori Perak, Kategori Emas dan Kategori Platinum. Persentase KUPS berdasarkan kategori tertinggi adalah kategori Biru sebesar 53% atau sejumlah 4.315 KUPS, kategori Perak sebesar 40% atau sejumlah 3.255 KUPS, kategori Emas sebesar 6% atau sejumlah 535 KUPS dan kategori platinum sebesar 1% atau sejumlah 49 KUPS. Apabila di gambarkan maka akan terlihat seperti piramida dengan dasarnya adalah kategori Biru yang terbanyak, sedangkan puncaknya kategori platinum.

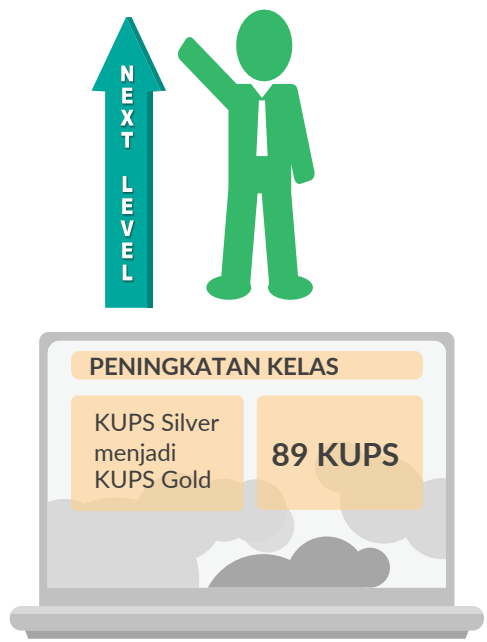

11. LUAS KAWASAN DENGAN STATUS PENETAPAN

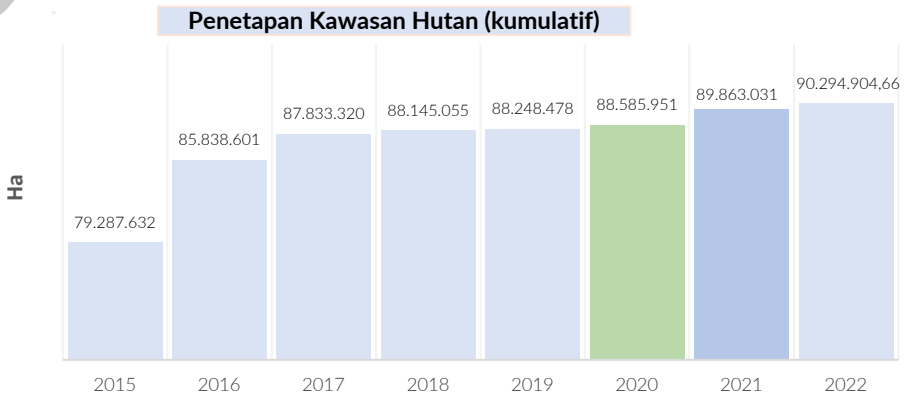

s.d. Agustus 2022 seluas 90.294.904,66 Ha

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan.

Secara kumulatif, sampai dengan Tahun 2021 telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.151 unit kelompok hutan dengan total luas 89.863.031 ha atau 71,43% dari total luas kawasan hutan (125.795.306 ha). Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai tahap penetapan kawasan hutan seluas 14.898.695 ha, yang terdiri dari SK penetapan kawasan pada 44 unit kelompok hutan seluas 1.277.080,43 ha, pengajuan konsep SK Penetapan kawasan hutan seluas 663.776 Ha, dan potensi penetapan kawasan hutan dari hasil tata batas Tahun 2021 seluas 12.957.839 Ha.

Target awal Penetapan Kawasan Hutan di tahun 2021 adalah 3,5 juta hektar, namun dengan adanya penambahan anggaran penataan batas kawasan hutan, terjadi perubahan target menjadi 12 juta hektar.

Penambahan target luas penetapan kawasan hutan terjadi pada pertengahan tahun anggaran disebabkan oleh adanya penambahan anggaran pelaksanaan penataan batas. Penambahan penataan batas ini tidak serta merta langsung menghasilkan luas penetapan kawasan hutan pada tahun anggaran yang sama. Secara umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Namun demikian, pelaksanaan tata batas dan rekonstruksi batas kawasan hutan pada tahun anggaran 2021 berpotensi menambah luas penetapan kawasan hutan seluas ± 12.957.839 hektar. Alhasil, sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 realisasi luas penetapan Kawasan hutan telah mencapai 90.294.904,66 ha atau bertambah seluas 431.873,66 Ha dari realisasi di tahun 2021.

Penetapan Kawasan Hutan 2021

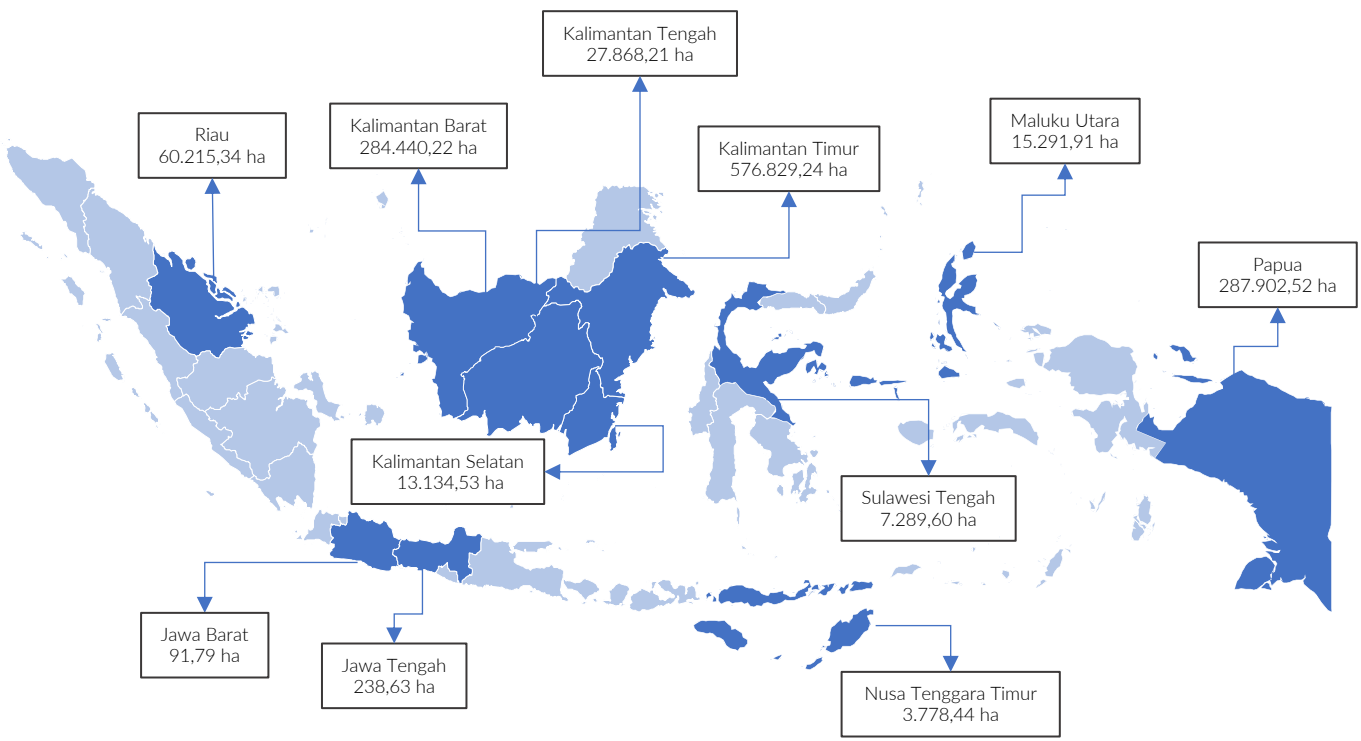

Pada tahun 2021, total penetapan Kawasan hutan yang sudah mendapatkan SK mencapai 1.277.080,43 ha. Pada akhir tahun anggaran masih terdapat SK penetapan kawasan hutan yang dalam proses finalisasi dengan luas penetapan 663.766,14 hektar (12 SK).

Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada, target tata batas kawasan hutan Tahun 2021 adalah sepanjang 20.417 km yang terdiri dari tata batas reguler dan tata batas kawasan dengan anggaran Food Estate. Dari target tersebut dapat direalisasikan penataan batas sepanjang 20.334 Km (99,5%). Namun demikian penataan batas tahun 2021 yang dilaksanakan pada BPKH wilayah XII Tanjungpinang belum memberikan potensi tambahan penetapan kawasan hutan karena penataan batas berupa tata batas fungsi (285 Km) dan penataan batas sementara (407 Km).

12. TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)

Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/ pemanfaatan lahan serta penggunaan sumberdaya hutan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dari program reforma agraria adalah diantaranya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan kepemilikan lahan, untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dan menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Evaluasi terhadap pencapaian TORA menjadi salah satu kunci untuk mendukung akses masyarakat terhadap tanah. Melalui Evaluasi ini dapat diketahui capaian TORA dan juga realisasi TORA. Sampai dengan akhir tahun 2021, pencapaian progres TORA telah mencapai 2,7 juta hektar atau 67% dari progres capaian TORA pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2021 ini seluas 184.731 hektar.

Realisasi Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA Akumulasi per Tahun (Juta Hektar)

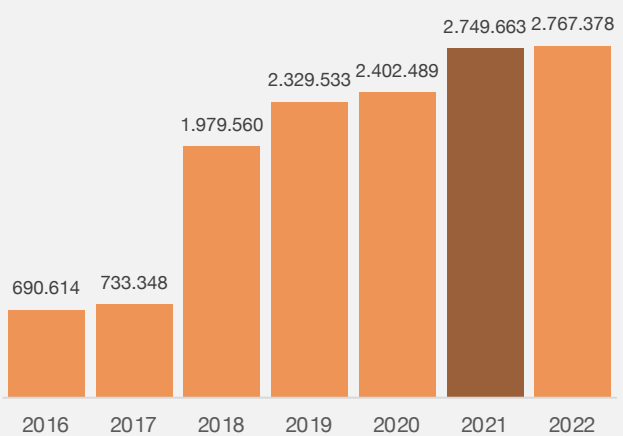

*Capaian hingga bulan Agustus 2022

Jumlah Rincian TORA 2021
184.731 Hektar

LUAS (HA)	SKEMA
21.558	RTRW Sulawesi Tengah
37.755	Perubahan Batas (APL)
696	Pelepasan HPK Non Produktif
35.077	Penataan Batas KH Reguler TORA
89.645	Penataan Batas Penyediaan TORA

*Luas capaian TORA s.d Agustus 2022 sebesar 2.767.378 ha
*Realisasi s.d. Agustus 2022 sebesar 269.804 ha

KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan.

Penetapan TORA tahun 2021 menjangkau di 14 provinsi Indonesia. Luas TORA tertinggi dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah seluas 35.077 Ha yang merupakan skema penataan batas KH reguler dan 52.604 Ha skema penataan batas penyediaan TORA. Provinsi dengan program TORA terluas kedua yaitu provinsi Sulawesi Tengah seluas 21.558 Ha yang merupakan skema RTRW dan 11.755 Ha skema penataan batas penyediaan TORA. Provinsi dengan luas TORA terluas ketiga yaitu provinsi Sumatera Utara seluas 14.917 Ha yang merupakan skema perubahan batas APL. Luasan TORA yang telah ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain.

PETA SEBARAN CAPAIAN TORA 2021

Jumlah Provinsi: **14 Provinsi**
Luas TORA: **184.731 Ha**

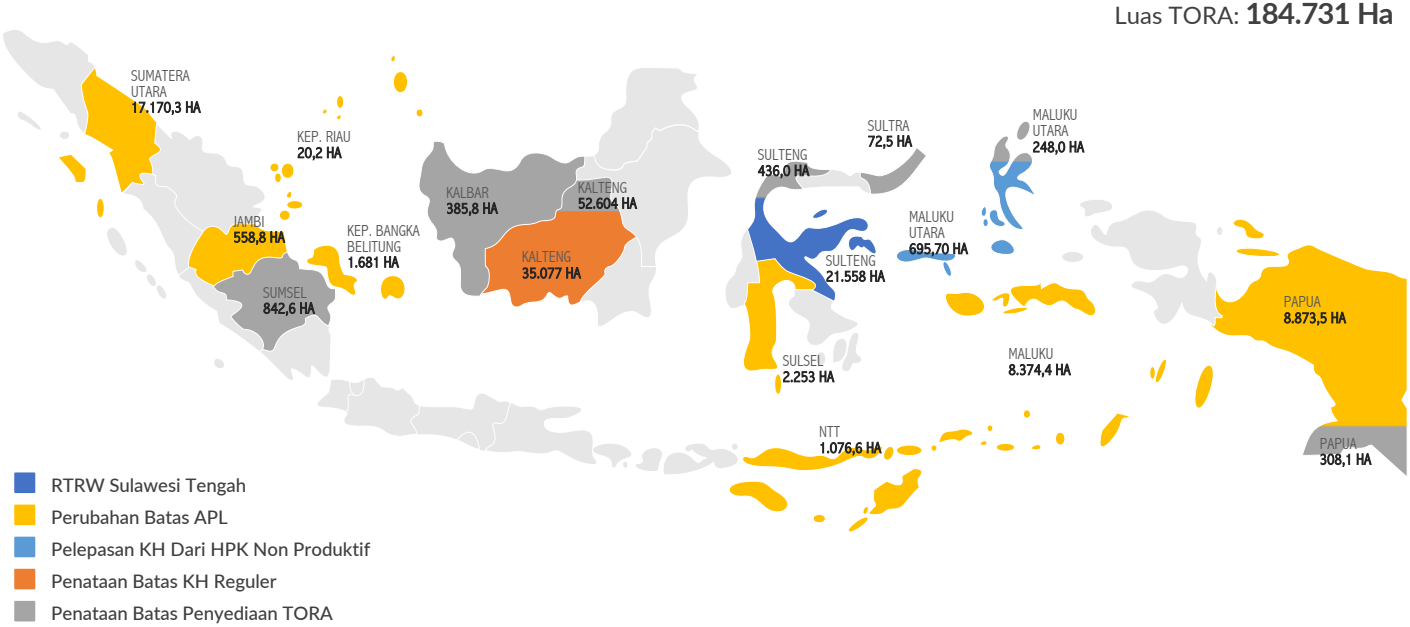

13. INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Penilaian Efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan menggunakan metode evaluasi yang sama, diharapkan seluruh kawasan hutan di Indonesia dapat mendapatkan penilaian yang berimbang sehingga menghasilkan formulasi rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang.

Nilai indeks efektivitas pengelolaan hutan di tahun 2021 senilai 2,4 poin. Nilai ini dibentuk oleh nilai indeks efektivitas empat kawasan hutan berdasar fungsi. Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan Per Tahun

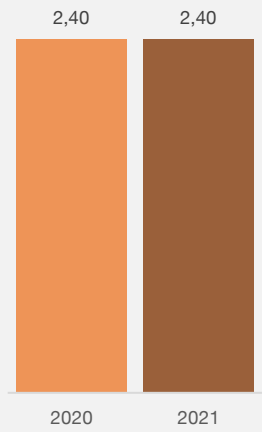

Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan 2021 2,40 Poin

Nilai (Poin)	Kawasan Hutan Berdasar Fungsi
61,56	Hutan Konservasi
73,40	Hutan Lindung
72,81	Hutan Produksi
67,80	KHDTK Diklat

DATA LUAS KAWASAN HUTAN DAN NILAI INDEKS

Sampai dengan tahun 2021, Luas Kawasan Hutan Indonesia Berdasarkan Fungsi adalah sebagai berikut:

No	Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi	Luas (Ha)	Persentase	Nilai Indeks	Skala Nilai Indeks	Nilai Terbobot Skala 0-100
1.	Hutan Konservasi	27.409.899,40	21,74%	61,56	1-100	61,56
2.	Hutan Lindung	29.578.164,29	23,46%	3,67	1-5	73,4
3.	Hutan Produksi	68.973.530,27	54,70%	72,81	1-100	72,81
4.	KHDTK Diklat	92.212,58	0,07%	67,8	1-100	67,8
5.	KHDTK Litbang Kehutanan	43.077,68	0,03%	-		-
Jumlah Luas Hutan Indonesian		**126.096.884,22**	**100%**	-		-

HASIL PERHITUNGAN INDEKS EFEKTIVITAS

Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan (IEPKH) adalah indeks atau indikator untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, entitas pengukurannya ditujukan pada seluruh kawasan hutan, baik kawasan hutan konservasi (HP), hutan produksi (HP), hutan lindung (HL) maupun kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Hasil perhitungan indeks efektivitas menggunakan rumus IEPKH mendapatkan nilai 69,127. Selanjutnya, sesuai SK Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 di atas bahwa Skala Capaian ini menggunakan interval 2,1-2,5, maka nilai 69,127 apabila kita masukkan dalam skala penilaian berada pada kisaran nilai 61 <(IEPKH = 2,4) ≤80. Sehingga didapatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan hutan 2,4 poin.

Dari target senilai 2,2 Poin, indeks efektivitas pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 2,4 poin. Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 nilai 2,5 Poin, atau telah tercapai 96% dari Renstra.

Hasil penilaian dengan menggunakan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan (IEPKH) ini diharapkan menjadi salah satu titik referensi untuk perbaikan pengelolaan Kawasan hutan di Indonesia. Untuk itu, kondisi dan tingkat pencapaian yang tercermin dari angka indeks ini, nantinya perlu ditindaklanjuti dalam sejumlah rencana aksi untuk peningkatan kualitas pengelolaan kawasan hutan sekaligus menjadi satu sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

14. JUMLAH KASUS YANG DITANGANI MELALUI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara lestari. Penegakan hukum yang kuat mampu menjadi salah satu komponen penggerak perekonomian negara yang terjaga dengan baik. Manfaat dari penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya pada generasi saat ini tapi juga generasi mendatang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan berbagai tindakan penegakan hukum secara konsisten yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan budaya ketaatan dari pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Melalui penegakan hukum ini pada tahun 2021, KLHK telah berhasil menyelesaikan sebanyak 1.194 kasus.

Realisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

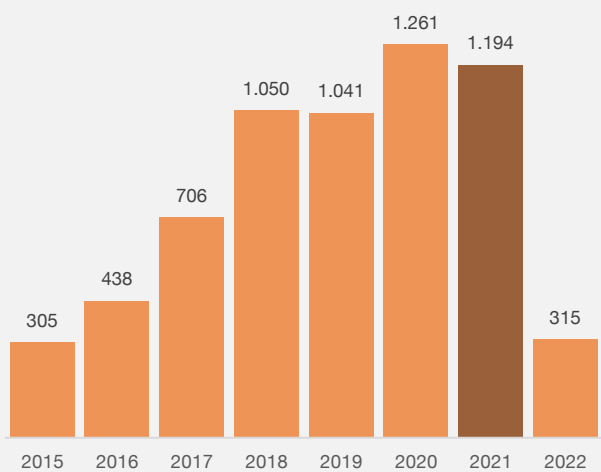

*Capaian hingga bulan Mei 2022

Jumlah Kasus yang Ditangani Tahun 2021
1.194 Kasus

JUMLAH KASUS	NAMA KASUS
48	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan
747	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK
180	Kasus tindak pidana LHK P-21 perseorangan
6	Kasus tindak LHK P-21 badan usaha
213	Operasi Bidang Keamanan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki berbagai pendekatan instrumen hukum mulai instrumen penegakan hukum administrasi, instrumen penegakan hukum pidana dan instrumen penegakan hukum perdata.

Instrumen penegakan hukum menjadi dasar untuk penyelesaian kasus yang ditangani. Alternatif penyelesaian kasus pun berbeda antara instrumen. Instrumen penegakan hukum administrasi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, mulai dari pemberian teguran tertulis, paksaan pemerintah hingga sanksi yang berat seperti pembekuan izin dan pencabutan izin badan usaha atau perorangan. Instrumen. Instrumen hukum pidana dapat diselesaikan dengan denda, kurungan penjara dan pidana tambahan. Instrumen hukum perdata dapat diselesaikan dengan cara ganti rugi pemulihan dan tindakan tertentu.

SANKSI ADMINISTRASI

2.221 Sanksi

Jumlah pemberian sanksi administrasi pada tahun 2021 sebanyak 519 sanksi

208
Paksaan Pemerintah

14
Teguran Tertulis

297

HUKUM PERDATA

29 Gugatan Perdata

Jumlah Kasus yang ditangani tahun 2021 sebanyak 17 gugatan

Rp20,7 T
Ganti Rugi Pemulihan LHK
(2015-2021)

31
Kesepakatan diluar pengadilan

HUKUM PIDANA

1.164 P.21

Jumlah hukum pidana yang telah P.21 pada tahun 2021 sebanyak 186 kasus

28
Perambahan

38
Peredaran illegal TSL

110
Pembalakan Liar

2
Kebakaran Hutan dan Lahan

6
Pencemaran Lingkungan

2
Kerusakan Lingkungan

15. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE disetiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah .

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan *(maturity level)* dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi SPBE Kementerian LHK tahun 2021 senilai 2,62 poin dengan nilai rata-rata SPBE Nasional 2,24 poin.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kementerian LHK

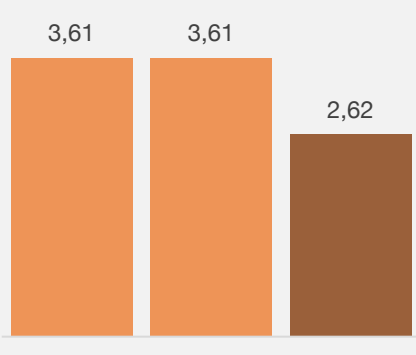

Tahun 2020, Capaian indeks sama dengan tahun sebelumnya (2019) sesuai Surat Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KemenPAN-RB Nomor : B/43/KT.03/2021 Tanggal 5 Januari 2021

Nilai Indeks SPBE KLHL 2021
2,62 Poin

DOMAIN PENILAIAN	Nilai
Kebijakan SPBE	1,80
Tata kelola SPBE	2,10
Manajemen SPBE	1,09
Layanan SPBE	3,70

HASIL EVALUASI SPBE KLHK 2021

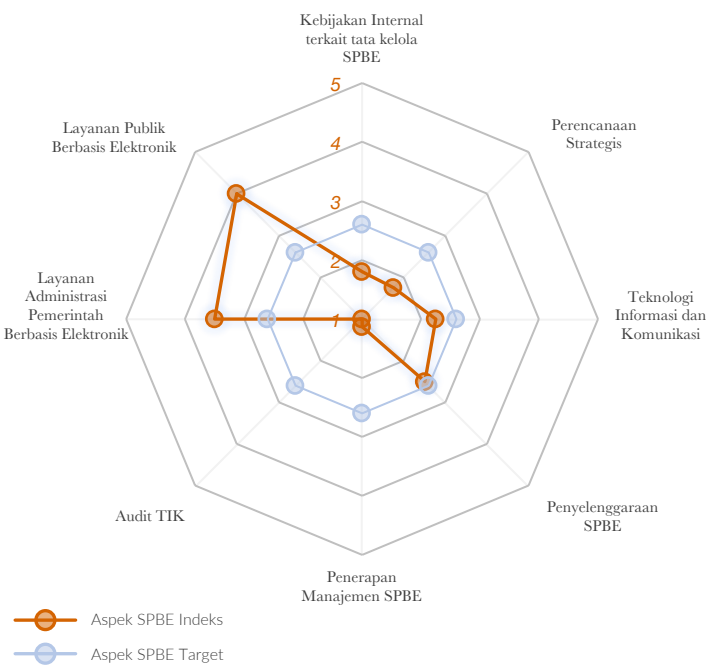

DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN	Nilai
DOMAIN 1 – KEBIJAKAN SPBE	**1,80**
Aspek 1 – Kebijakan Internal terkait tata kelola SPBE	1,80
DOMAIN 2 - TATA KELOLA SPBE	**2,10**
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	1,75
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	2,50
DOMAIN 3 - MANAJEMEN SPBE	**1,09**
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
DOMAIN 4 – LAYANAN SPBE	**3,70**
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,00

16. INDEKS PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING SDM LHK

Indeks Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengukur upaya Kementerian LHK dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok usaha dan kelompok lingkungan hidup. Indikator Kinerja Utama ini diampu oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai pemenuhan fungsi penyediaan sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun strategi utama pengembangan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilandaskan pada sisi institusi formal maupun non-formal. Dalam hal ini, sisi institusi formal yang dimaksud adalah pendidikan sekolah menengah kejuruan kehutanan yang berakhir pada tercetaknya sumber daya manusia tenaga teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan paket keahlian dan kompetensi yang beragam. Sementara itu pada sisi non-formal, Kementerian LHK melakukan pendekatan pelatihan vokasi sumber daya manusia bidang Kehutanan, pendekatan pelatihan sumber daya manusia bidang Lingkungan Hidup, dan pendekatan *people to people contact* dengan membentuk institusi Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya. Seluruh proses pengembangan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan diverifikasi dengan sertifikasi guna memastikan terpenuhinya kompetensi SDM yang bergerak dalam pembangunan bidang LHK.

Indeks Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung sasaran strategis keempat Kementerian LHK, yaitu "Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik".

Pada tahun 2021, Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK tercatat sebesar 89,88 poin dari target 72 poin, atau sebesar 124,83%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian LHK melalui Badan P2SDM telah sesuai target untuk menuju SDM KLHK yang lebih kompeten dan berkapasitas.

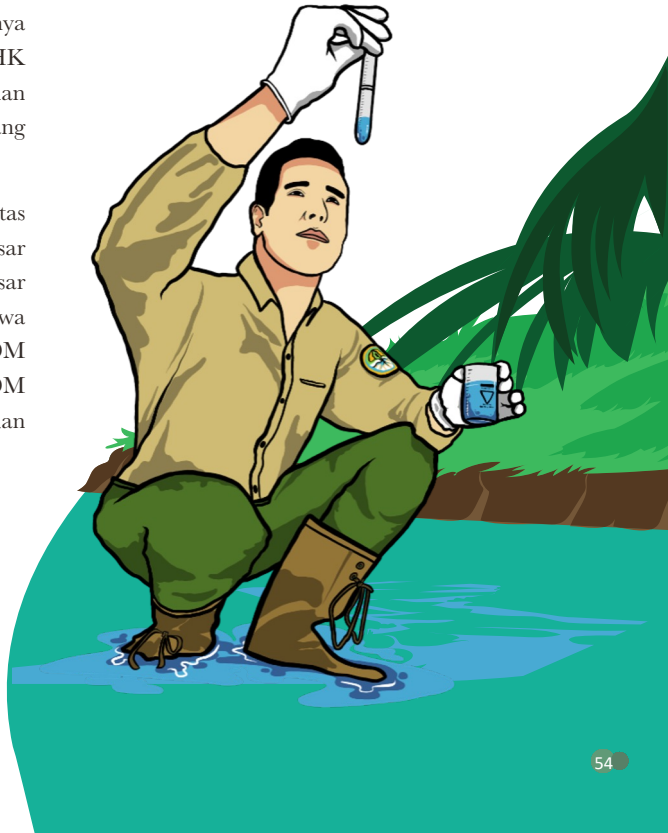

Terdapat 2 dimensi yang membangun produktivitas dan daya saing SDM LHK yaitu dimensi SDM (indeks SDM) dan dimensi kelembagaan. Dimensi SDM berpusat pada aspek kompetensi dan sertifikasi yang berwujud (*tangible*). Sementara itu, untuk dimensi kelembagaan yaitu berpusat pada kelembagaan usaha kehutanan (KTH) yang dibina dan kelembagaan/komunitas yang mendapatkan pemahaman dan keterampilan untuk berperilaku peduli dan berbudaya lingkungan hidup serta berkontribusi dalam perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan.

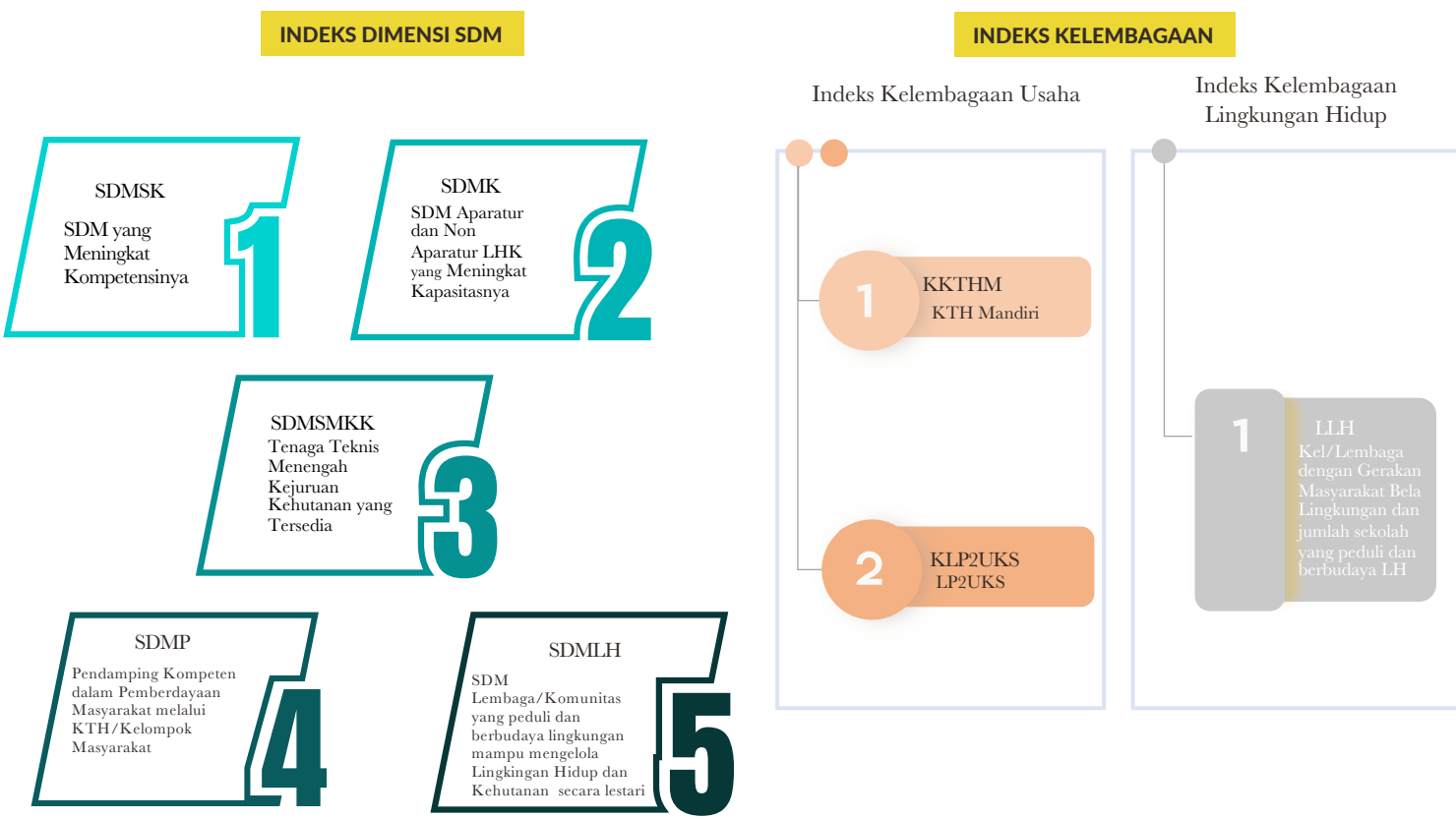

17. NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI

Rencana	79 poin
Capaian	75,51 poin
Kinerja 2021	95,58%
Y o Y (2020-2021)	▲ 0,22%
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	88,83%

Dalam rangka menata ulang, memperbaiki, dan menyempurnakan tata kelola birokrasi, setiap Kementerian/ Lembaga/Pemda memiliki kewajiban untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mengejar tata kelola sistem pemerintahan yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui strategi yang terancang pada Rencana Strategis Kementerian LHK pada tahun 2020-2024 dalam indikator Nilai Reformasi Birokrasi yang direncanakan selalu bertambah setiap tahun.

Tujuan reformasi birokrasi adalah (a) Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja, (b) Birokrasi yang efektif dan efisien, dan (c) Birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya adalah mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu), dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 adalah 75,51 poin, atau tercapai 95,58% dari target 79 poin berdasarkan Rencana Kerja Revisi tahun 2021. Pencapaian ini meningkat sebesar 0,22% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebesar 75,34 poin.

Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian LHK Tahun 2020

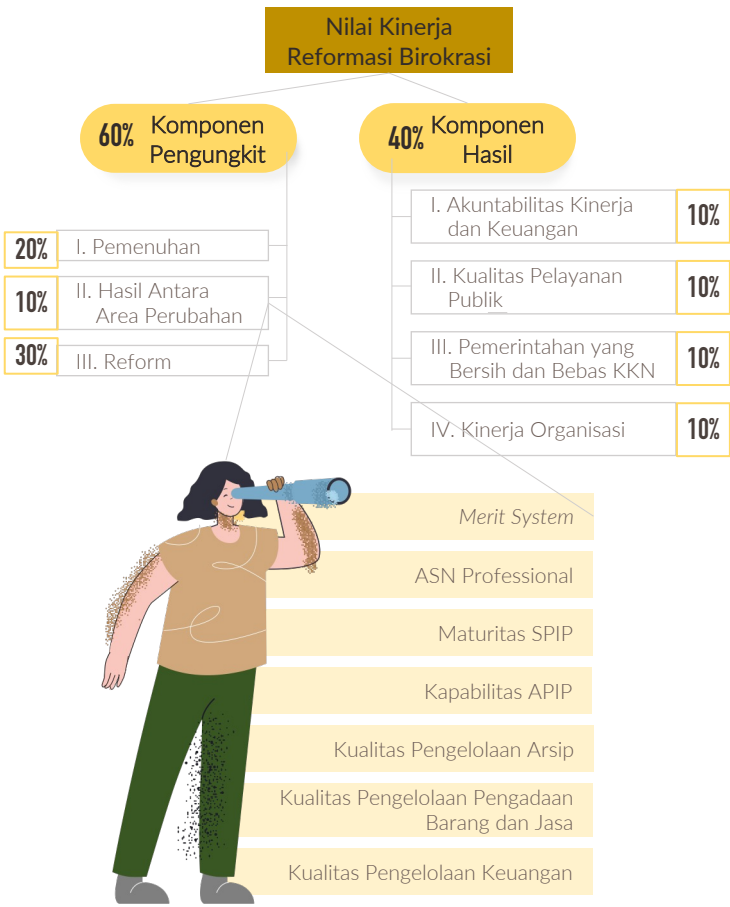

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian LHK Tahun 2021: **75,51** 0,22% dari tahun 2020

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian LHK tahun 2021 merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2020 dan terdiri dari dua komponen, yakni komponen pengungkit berbobot 60% dan komponen hasil berbobot 40%. Komponen pengungkit terdiri dari unsur (a) Pemenuhan, (b) Hasil Antara Area Perubahan, dan (c) Reform dengan nilai sebesar 41,80 poin (menurun 0,72 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 42,52 poin). Sementara itu, komponen hasil terdiri dari (a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, (b) Kualitas Pelayanan Publik, (c) Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan (d) Kinerja Organisasi dengan nilai komponen sebesar 33,71 poin (meningkat 0,89 poin dari nilai tahun sebelumnya 32,82 poin).

Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB atas Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian LHK adalah pada komponen pengungkit, aspek Pemenuhan mendapatkan 15,77 poin, aspek Hasil Antara Area Perubahan mendapatkan 6,77 poin, dan aspek Reform mendapatkan 19,26 poin. Nilai hasil antara area perubahan diantaranya adalah Kualitas Pengelolaan Arsip dengan nilai 98.84 poin, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 40 poin, Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 92,98 poin, Penerapan *Merit System* sebesar 265 poin, ASN Profesional sebesar 56 poin, Indeks Maturitas SPIP pada Level 3, dan Nilai Kapabilitas APIP pada Level 3.

Sedangkan pada Komponen Hasil, aspek Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan mendapatkan 7,89 poin, Kualitas Pelayanan Publik sebesar 8,93 poin, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN sebesar 9,38 poin, dan terakhir Kinerja Organisasi mendapatkan 7,51 poin.

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kementerian PANRB, aspek pada komponen pengungkit dengan pencapaian terbesar yang diraih oleh Kementerian LHK berada pada Aspek Pemenuhan dengan hasil 15,77 dari 20 poin, (78,85%). Aspek ini mengukur pencapaian kondisi tim RB, *road map* RB, pemantauan dan evaluasi RB, serta perubahan pola pikir dan budaya kinerja suatu instansi. Sedangkan aspek pada komponen hasil dengan pencapaian terbesar adalah aspek Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan nilai 9,38 poin. Aspek ini merupakan indikator yang menunjukkan dampak upaya program/kegiatan Kementerian LHK dalam aspek Penguatan Pengawasan dalam bentuk Indeks Perspektif Anti Korupsi (IPAK).

18. OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN

Rencana	1 poin (WTP)
Capaian	1 poin (WTP)
Kinerja 2021	100%
Y o Y (2020-2021)	= 0%
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	100%

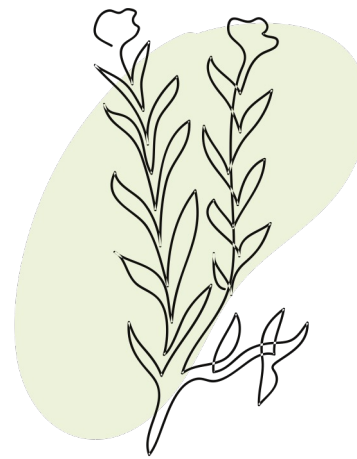

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengemban amanat Presiden untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan yang diproduksi setiap tahun. Laporan Keuangan ini kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasil pemeriksaan akan dirangkum pada Opini BPK Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian mencakup administrasi keuangan dan aset yang penyusunannya berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal pada Biro Keuangan menjadi koordinator tata kelola pelaporan keuangan, sementara Biro Umum mengkoordinasi penataan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementerian LHK.

Opini BPK ini menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada setiap instansi pemerintahan, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kewajaran informasi keuangan dalam Opini BPK didasarkan pada laporan keuangan yang mencakup empat kriteria: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Hasil akhir yang diharapkan dari pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dalam bentuk Opini adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan, dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

TREN OPINI BPK

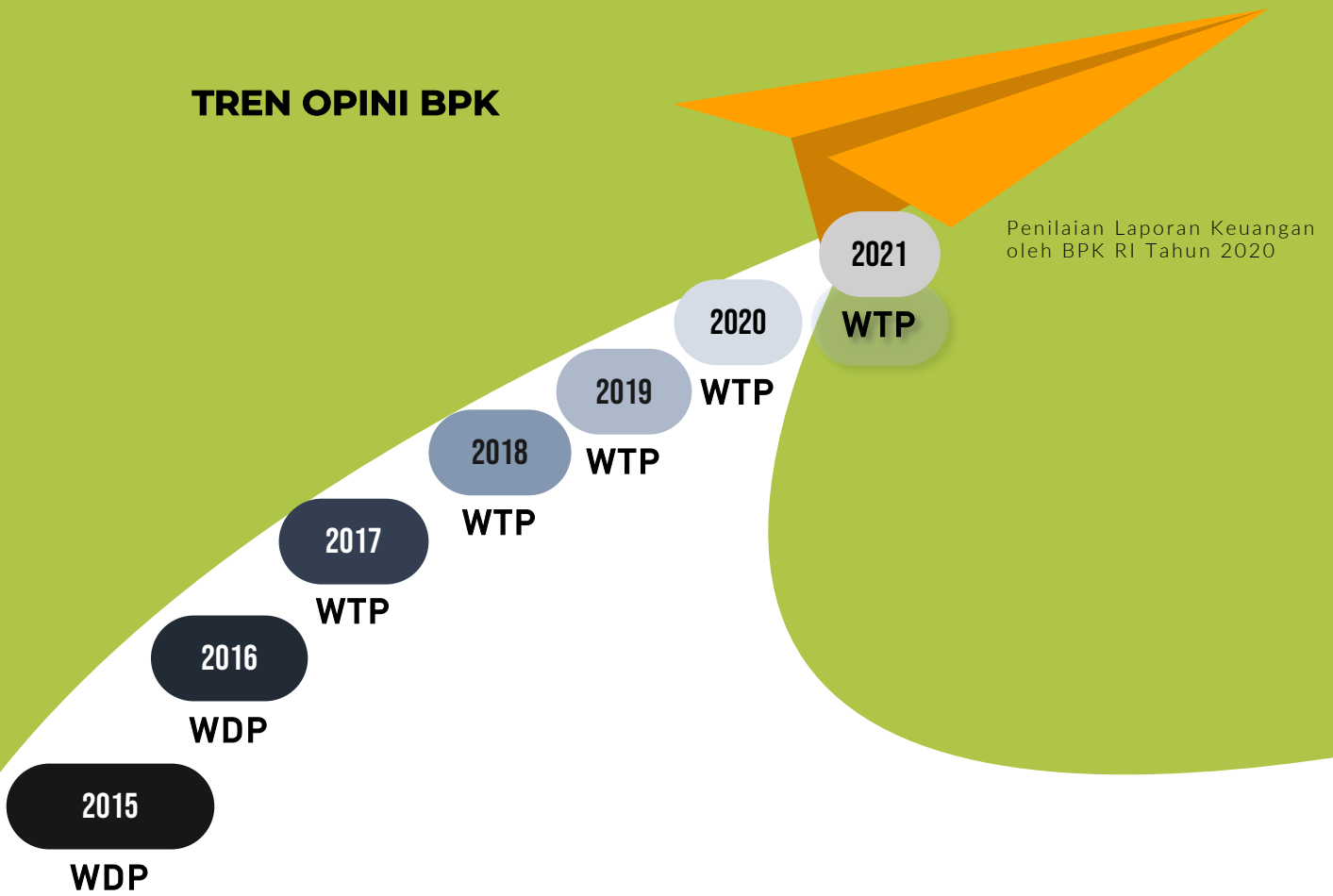

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan ujung dari pengelolaan keuangan negara yang memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian LHK sebagai salah satu Kementerian/Lembaga Negara yang mengelola keuangan negara, mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang (UU) untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

19. LEVEL MATURITAS SPIP

Rencana	Level 3
Capaian	Level 3
Kinerja 2021	100%
Y o Y (2020-2021)	0
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	75%

Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu indikator kinerja yang mendukung Tujuan keempat, yaitu Tata kelola pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima, atau masuk pada program Dukungan Manajemen. Indeks Maturitas ini menjadi komponen penyusun Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi dalam aspek peningkatan pengendalian dan pengawasan internal. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi ini bermuara untuk meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang lincah/*agile*, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2021, capaian kinerja Nilai Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian LHK adalah Level 3 atau terdefinisi. Nilai ini menunjukkan bahwa di Kementerian LHK telah ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Capaian kinerja indeks maturitas SPIP 100% karena sesuai dengan target pada dokumen Rencana Kerja 2021 maupun Rencana Strategis Kementerian LHK 2020-2024.

Nilai Level 3 ini adalah nilai level maturitas SPIP Kementerian LHK hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2019. pada tahun 2020 dan 2021, BPKP tidak melakukan penjaminan mutu/kualitas karena adanya kebijakan untuk memprioritaskan Kementerian/Lembaga yang masih berada di level 2 selama masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap melakukan Penilaian Mandiri di tahun 2021 yang diampu oleh eselon 1 Sekretariat Jenderal, hanya saja belum diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui penjaminan kualitas/*quality assurance*.

III. RENCANA 2023

Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup
untuk transformasi ekonomi indonesia

A . RKP BIDANG LHK TAHUN 2023

RKP 2023 bertema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) dimana KLHK mendukung pada 4 (empat) PN yaitu : (PN 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, 4 (empat) PN tersebut diinternalisasi ke dalam pembangunan LHK sebagai berikut.

Internalisasi PN kedalam Pembangunan LHK 2023

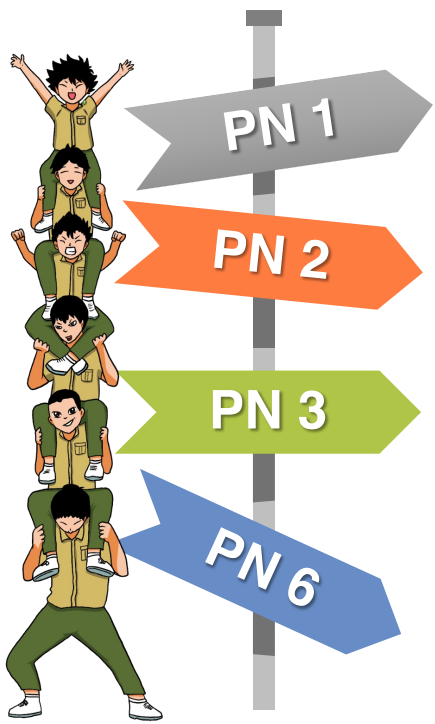

- ✓ Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu
- ✓ Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata

Membantu menyiapkan ibu kota Nusantara

Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan

- ✓ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- ✓ Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim

Untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, PN Bidang LHK diperkuat melalui pelaksanaan 6 (enam) *Major Project*, yakni Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, Pembangunan Fasilitasi Pengolahan Limbah B3, *Food Estate*, Pembangunan IKN, Pengelolaan Terpadu UMKM, Destinasi Pariwisata Prioritas, Internalisasinya ke dalam pembangunan LHK adalah sebagai berikut.

Tabel Internalisasi Major Project ke Dalam Pembangunan LHK 2023

Major Project	**Intervensi dan Internalisasi Pembangunan LHK**
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Meningkatkan percepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana hidrometeorologi dan bencana lingkungan (air dan udara)
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan
Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	Meningkatkan pengelolaan koridor satwa dalam mendukung *food estate*
Ibu Kota Negara (IKN)	Menyiapkan Ibu Kota Negara dengan konsep *Forest City* melalui rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
Pengelolaan Terpadu UMKM	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui kelompok usaha perhutanan sosial
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Meningkatkan ekonomi masyarakat local disekitar Kawasan pariwisata melalui pengembangan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Ekowisata dengan konsep SAVE (*Science, Academic, Voluntary, Education*) dan wisata bahari

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.
RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi **5,3–5,9** persen, Tingkat Pengangguran Terbuka **5,3–6,0** persen, Tingkat Kemiskinan **7,0–8,0** persen, Rasio Gini **0,375–0,378**, Indeks Pembangunan Manusia **73,29–73,35**, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca **27,02** persen, Nilai Tukar Petani **103–105**, dan Nilai Tukar Nelayan **106–107**.

B .RENJA KLHK TAHUN 2023

Sejalan dengan tema RKP Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan sasaran pembangunan nasional yang hendak dicapai, KLHK telah merumuskan tema pembangunan LHK yaitu "Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia" dengan sasaran utama : "Keberdayaan masyarakat merata dalam produktivitas di tingkat tapak dan peningkatan derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular dan sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah".

Dalam kerangka makro ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan untuk : (1) Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon; (2) Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk memeratakan pembangunan wilayah; (3) Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNBP dan meningkatkan kualitas belanja Kementerian, sebagai upaya peningkatan *value for money* termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK; dan (4) Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Adapun sasaran makro ekonomi yang hendak dicapai KLHK adalah sebagai berikut

SASARAN MAKRO EKONOMI LHK 2023

1 – 1,5 %

Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas

1 – 2 %

Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan

1 – 1,5 %

Penurunan beban lingkungan dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan

Tema dan sasaran pembangunan LHK tahun 2023 diharapkan berdampak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan LHK dalam kerangka 4 (empat) pilar, yakni Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Tata Kelola serta menjiwai pencapaian 13 (tiga belas) sasaran strategis beserta indikatornya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Adapun arsitektur kinerja KLHK yang memuat tujuan pembangunan LHK dan sasaran strategis KLHK yang dinaungi oleh 4 (empat) pilar adalah sebagai berikut.

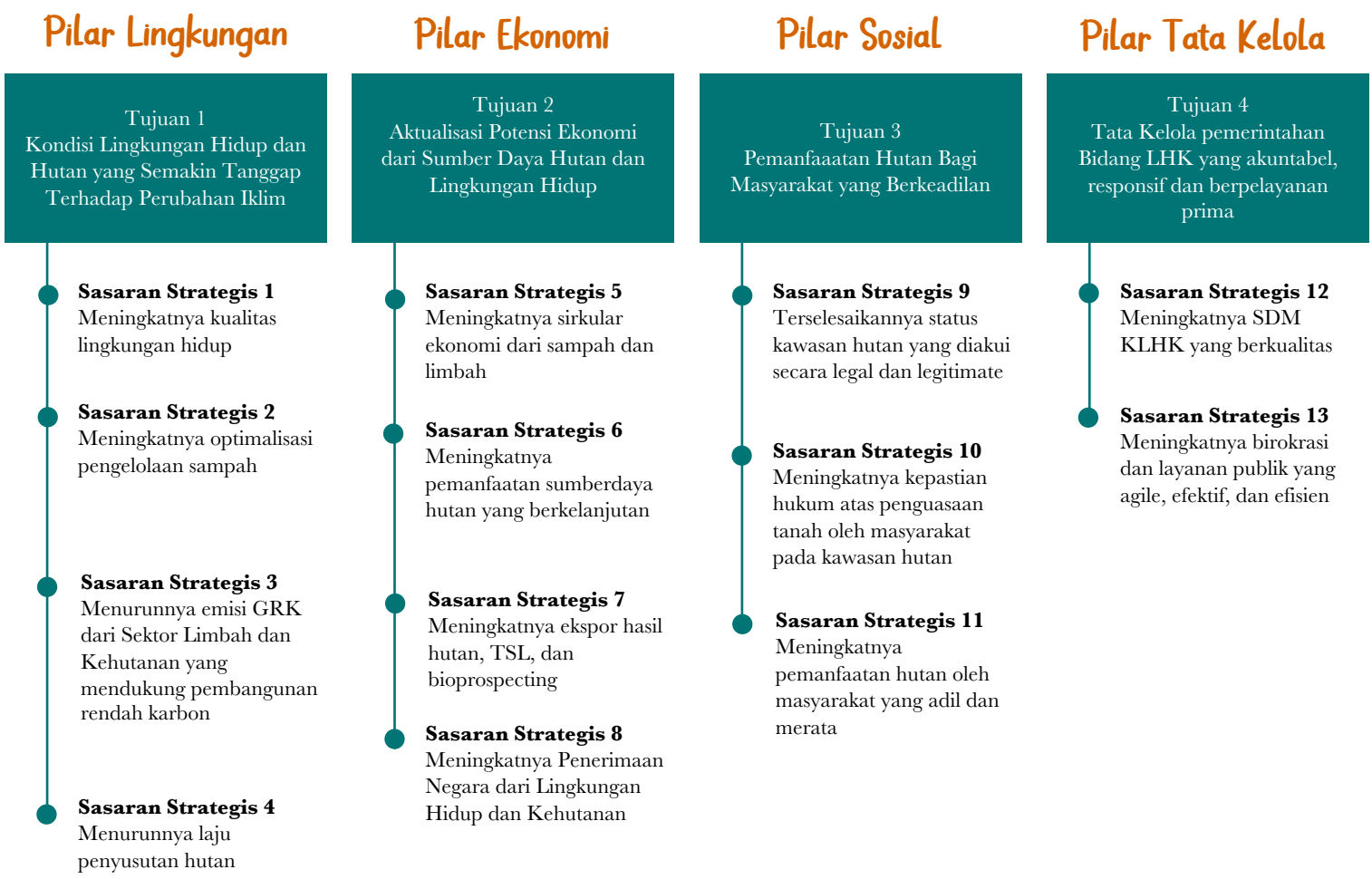

Gambar Sasaran Strategis KLHK pada 4 (empat) Pilar Pembangunan LHK

Keberhasilan Kementerian dalam mencapai 13 (tiga belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan diukur melalui seberapa besar target IKU yang dapat direalisasikan. KLHK memiliki 13 (tiga belas) IKU sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja kementerian. Adapun Rancangan Kinerja Utama 13 (tiga belas) IKU yang dijabarkan dalam 4 (empat) pilar pembangunan LHK adalah sebagai berikut.

RANCANGAN KINERJA UTAMA 2023

PILAR LINGKUNGAN

"Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan limbah serta menjaga kelestarian hutan sebagai upaya perbaikan kualitas lingkungan dalam mendukung pembangunan rendah karbon di sebagian besar provinsi"

69,48 Poin
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

67 Poin
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

17,33 Persen
Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan

0,2 juta hektar
Laju deforestrasi dan degradasi hutan

RANCANGAN KINERJA UTAMA 2023

PILAR EKONOMI

"Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah dan limbah serta produktifitas barang dan jasa di tingkat tapak untuk mempertahankan kecendurungan positif PDRB sektor kehutanan dan lingkungan di sebagian besar provinsi"

14,1 Triliun Rupiah
Kontribusi Sektor LH terhadap PDB Nasional (Berdasarkan harga berlaku)

118 Triliun Rupiah
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (Berdasarkan harga berlaku)

15 Miliar US$
Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan *Bioprospecting*

5,268 Triliun Rupiah
Nilai PNBP Fungsional KLHK

RANCANGAN KINERJA UTAMA 2023

PILAR SOSIAL

"Memastikan penggunaan hutan yang lebih adil dan merata antara swasta dan masyarakat sembari menyelesaikan status kawasan hutan secara legal dan *legitimate* sebagai upaya untuk meminimalisir konflik tenurial di sebagian besar provinsi"

14,9 Juta Hektar
Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan

10,1 Ribu Hektar
Luas Hutan yang Dilepaskan untuk TORA

150 Ribu Hektar
Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat

RANCANGAN KINERJA UTAMA 2023

PILAR TATA KELOLA

"Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang *agile*, efektif dan efisien di dukung oleh SDM berkualitas yang mampu mensinergikan antara pendanaan dan PNBP sebagai upaya peningkatan *value for money* pada setiap belanja kementerian"

78 Poin
Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK

83 Poin
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

STRUKTUR ORGANISASI KLHK TAHUN 2023

Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi Kementerian LHK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 yang terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, dan 18 Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli Menteri. Struktur ini diharapkan memacu KLHK untuk lebih optimal dalam mewujudkan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.

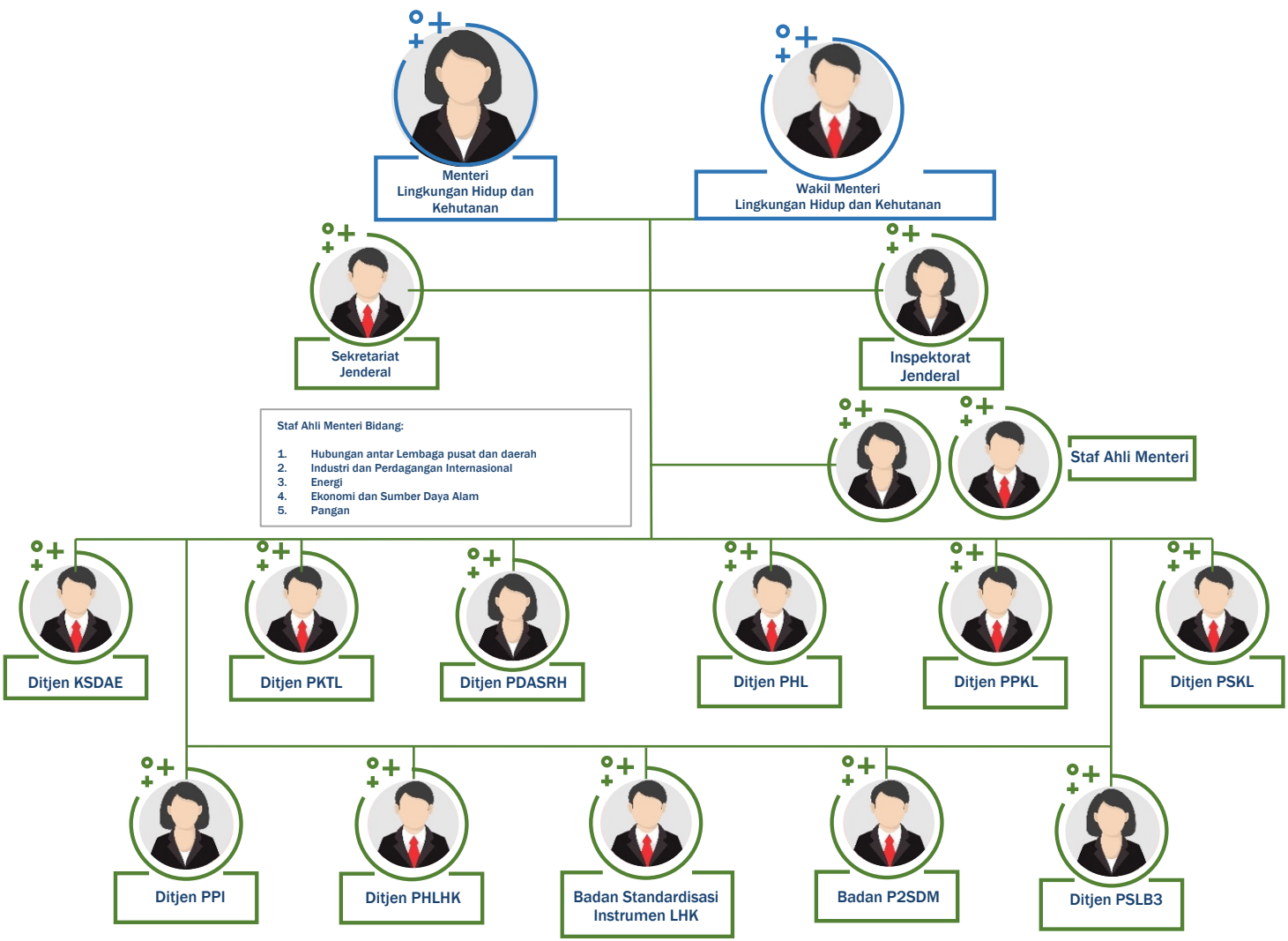

LIMA PROGRAM KLHK

Merujuk pada Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), KLHK mengelompokkan 13 (tiga belas) IKU ke dalam 5 (lima) program yang memuat 13 (tiga belas) sasaran program dengan nomenklatur sama dengan sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan nomenklatur sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa program bukan lagi representasi Unit Kerja Eselon I tetapi menjadi arah dan kebijakan di level kementerian bahkan nasional sehingga sejajar dengan sasaran strategis kementerian. Program-program KLHK yang akan dikerjakan di tahun 2023 yaitu :

Program Kualitas Lingkungan Hidup

Arah program ini adalah Menguatkan sistem peringatan dini bencana, pembangunan ekoriparian dan IPAL, pengelolaan lahan akses terbuka, pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3, restorasi gambut, penyediaan sarana pengolahan emas tanpa merkuri,penyediaan sarana penanganan sampah, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, dan peningkatan pengawasan terhadap ketaatan dan penegakan hukum

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Arah program ini adalah Menurunkan laju deforestasi, meningkatkan percepatan penyelesaian tata batas kawasan hutan termasuk di dalamnya penanganan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan, peningkatan akses kelola dan kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok tani hutan dan kelompok pemberdayaan.

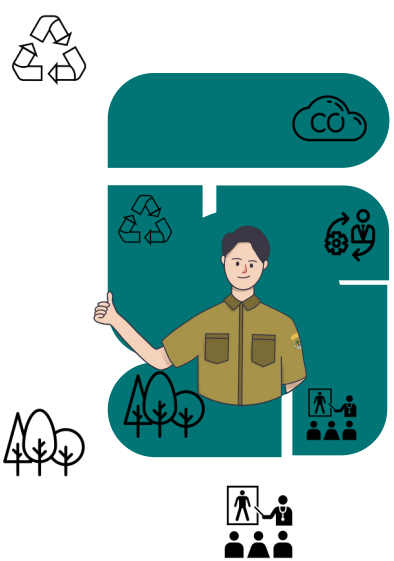

Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah program ini adalah Mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, penguatan kerangka kebijakan pelaksanaan FoLU Net Sink 2030, intervensi kampung iklim sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca

Program Dukungan Manajemen

Arah program ini adalah Meningkatkan upaya manajemen talenta, percepatan transformasi digital, peningkatan reformasi birokrasi, peningkatan pengawasan, pengelolaan kinerja Kementerian dan artikulasinya dalam makro ekonomi pembangunan nasional

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Arah program ini adalah peningkatan kompetensi SDM LHK melalui sertifikasi dan pelatihan vokasi untuk mendukung industri kehutanan dan wirausahan kreatif bidang LHK, peningkatan kualitas Pendidikan formal (SMK Kehutanan) serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani hutan dalam rangka meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan, serta pembinaan kepada Lembaga maupun kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan

PROGRAM 1
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja yang diharapkan dari program ini dan peran Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut.

KINERJA PROGRAM

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) **69,48** Poin

KINERJA UKE I

84,4 Poin
Nilai indeks kualitas udara (Ditjen PPKL)

55,4 Poin
Nilai indeks kualitas air (Ditjen PPKL)

60 Poin
Nilai indeks kualitas air laut (Ditjen PPKL)

64,5 Poin
Nilai indeks kualitas lahan (Ditjen PPKL)

6.000.000 Ton
Jumlah B3 yang dikelola (Ditjen PSLB3)

33.629.101 Ton
Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ditjen PSLB3)

83 Dokumen
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Ditjen PKTL)

195 Laporan
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan (Ditjen PKTL)

75 Lembaga
Jumlah Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (BSI)

51 Persen
Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Ditjen PHLHK)

250 Kasus
Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (Ditjen PHLHK)

10.000.000 Hektar
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (Ditjen KSDAE)

15 Danau
Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya (Ditjen PDASRH)

300.000 Hektar
Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi (BRGM)

KINERJA PROGRAM

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

67 Poin

KINERJA UKE I

Jumlah Sampah yang dikelola **15.633.622** Ton (Ditjen PSLB3)

KINERJA PROGRAM

Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku

Rp. **14,1** Triliun

KINERJA UKE I

20,84 Triliun Rupiah

Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 (Ditjen PSLB3)

4.921.472.000 Rupiah

Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah (Ditjen PSLB3)

16 Perusahaan

Unit usaha pemanfaatan air limbah (Ditjen PPKL)

16 NSPK

Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup (BSI)

PROGRAM 2
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Kinerja yang diharapkan dari program ini dan peran Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut.

KINERJA PROGRAM

Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan **0,2** Juta Hektar

KINERJA UKE I

428.000 Hektar
Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan (Ditjen PHL)

12.000.000 Hektar
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Ditjen KSDAE)

14.025 Hektar
Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi (Ditjen PDASRH)

300 Ribu Hektar
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (Ditjen PHLHK)

583 Layanan
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ditjen PKTL)

33 Layanan
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (Ditjen PKTL)

152.000 Hektar
Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial (Ditjen PSKL)

3.064 Hektar
Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi (BRGM)

KINERJA PROGRAM

Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) Rp.
118 Triliun

KINERJA UKE I

57 Juta m^3
Jumlah produksi kayu bulat **(Ditjen PHL)**

1,1 Triliun Rupiah
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(Ditjen PSKL)**

9 NSPK
Jumlah standar dan instrumen investasi di bidang kehutanan **(BSI)**

0,3 Triliun Rupiah
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan **(BP2SDM)**

KINERJA PROGRAM

Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting US$
15 Miliar

KINERJA UKE I

- Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan US$ **10** Miliar (Ditjen PHL)
- Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan Rp. **2,15** Triliun (Ditjen KSDAE)

KINERJA PROGRAM

Nilai PNBP Fungsional KLHK Rp **5,2** Triliun

KINERJA UKE I

Rp.3,233 Triliun

Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan (Ditjen PHL)

300 Pemohon

Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (Ditjen PKTL)

Rp.230 Milyar Rupiah

Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari (Ditjen KSDAE)

KINERJA PROGRAM

Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan
14,9 Juta Hektar

KINERJA UKE I

- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)
  14,9 Juta Hektar (Ditjen PKTL)
- Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan **31** Dokumen Layanan (Ditjen PKTL)

Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA
10,1 Ribu Hektar

- Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
  10,1 Ribu Hektar (Ditjen PKTL)

Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
150.000 Hektar

- Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat
  150.000 Hektar (Ditjen PSKL)
- Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
  15.000 Hektar (Ditjen PHL)
- Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
  1000 Desa (Ditjen KSDAE)

PROGRAM 3
KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Kinerja yang diharapkan dari program ini dan peran Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut.

KINERJA PROGRAM

Persentase penurunan emisis GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon **17,33** %

KINERJA UKE I

- **3 Dokumen**
  Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim (Ditjen PPI)
- **6.500 Desa**
  Jumlah wilayah yang berketahanan iklim (Ditjen PPI)
- **3 Dokumen**
  Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP (Ditjen PPI)
- **1 Dokumen**
  Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor (Ditjen PPI)
- **95,84 ODP Ton**
  Penurunan konsumsi bahan perusak ozon (Ditjen PPI)
- **2%**
  Penurunan luas areal kebakaran lahan dan hutan dan lahan (Ditjen PPI)
- **10 NSPK**
  Jumlah standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim (BSI)

PROGRAM 4
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Kinerja yang diharapkan dari program ini dan peran Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut.

KINERJA PROGRAM

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK **78** Poin

KINERJA UKE I

2.940 Orang
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya (BP2SDM)

473 Orang
Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (BP2SDM)

69 Poin
Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (BP2SDM)

247 Lembaga
Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup (BP2SDM)

PROGRAM 5
DUKUNGAN MANAJEMEN

Kinerja yang diharapkan dari program ini dan peran Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut.

KINERJA PROGRAM

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi **83** Poin

KINERJA UKE I

78 poin Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SELURUH UKE I)	**340** poin Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK (SETJEN)	**4** poin Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK (SETJEN)	**4** poin Survei Kepuasan Publik (SETJEN)
86 poin Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK (SETJEN)	**5** poin Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan (SETJEN)	**30** dokumen Jumlah Dokumen Kerjasama (SETJEN)	**3,65** poin Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (SETJEN)
77,5 Poin Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK (SETJEN)	**3** poin Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK (ITJEN)	**3,3** poin Nilai Maturitas SPIP KLHK (ITJEN)	
3,3 poin Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK (ITJEN)	**3** poin Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK (ITJEN)		

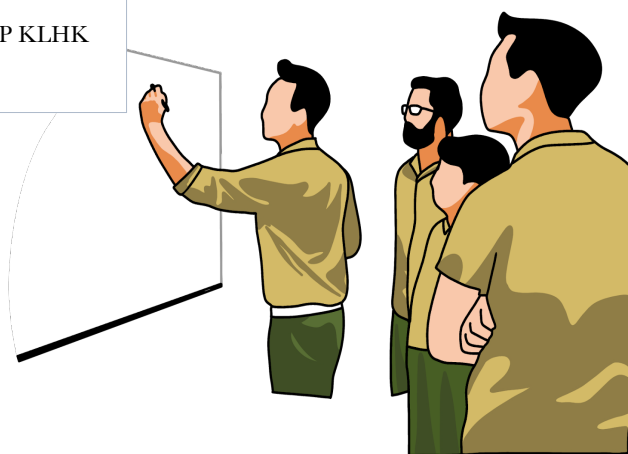

C. PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Upaya perbaikan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mendorong optimalisasi PNBP SDA Kehutanan terus dilakukan. Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2023 diantaranya : (1) perbaikan tata kelola dan peningkatan kepatuhan melalui pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan alcak balak, penataan perizinan, penegakan hukum dan penguatan system produksi hasil hutan, pengembangan system PNBP KLHK hingga tingkat tapak, integrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI-Kemenkeu), dan kegiatan audit kepatuhan dan penagihan piutang PNBP terutama PKH secara intensif; (2) perbaikan pengelolaan kawasan hutan melalui efektivitas pengelolaan Kawasan hutan, penetapan kawasan hutan, dan memberikan akses kelola melalui program perhutanan sosial, dan tidak mengeluarkan pemberian izin baru (Penundaan Pemberian Izin Baru/PPIB) hutan alam primer dan lahan gambut dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, serta promosi Kawasan konservasi dan *e-ticketing* dan *e-booking* kegiatan wisata; (3) perbaikan regulasi seperti revisi Peraturan Pemerintah (PP) Jenis dan Tarif dan peraturan pendukungnya. Saat ini sedang dilakukan revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku serta peraturan pendukungnya.

Total pendapatan diperkirakan sebesar **Rp.5,268** triliun dengan proporsi terbesar adalah dana reboisasi Rp.1,848 triliun (35,08%), menyusul berikutnya penggunaan kawasan hutan 1,609 triliun (30,54%) dan provinsi sumberdaya hutan 1,578 triliun (29,95%). Peningkatan pendapatan dibanding tahun sebelumnya ini menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa di sub sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

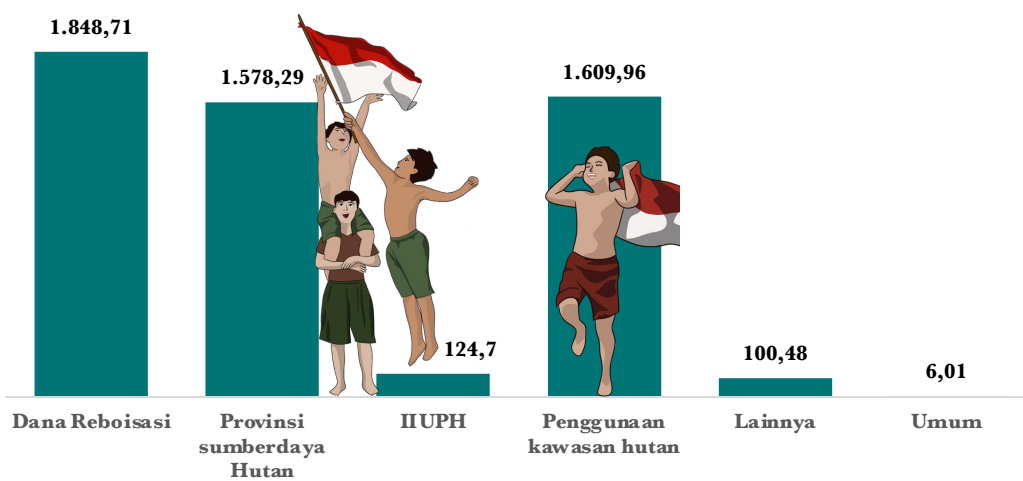

Gambar Target PNBP Tahun 2023 berdasarkan Sumber Penerimaan

Kebijakan optimalisasi PNBP SDA Kehutanan Tahun 2023 diarahkan untuk optimalisasi produksi, perbaikan regulasi dan tata kelola. Upaya optimalisasi pengelolaan PNBP SDA Kehutanan masih mengalami beberapa tantangan, antara lain dominasi PNBP Kehutanan dari basis kayu masih cukup tinggi, pengawasan yang masih perlu terus ditingkatkan, upaya berkelanjutan penegakan hukum, dan optimalisasi potensi, termasuk asset yang dinilai masih *idle*.

Adapun pokok-pokok kebijakan PNBP Tahun 2023 adalah : (1) erbaikan regulasi dengan penyederhanaan dan penyesuaian di bidang LHK terkait PNBP; (2) optimalisasi produksi dan perbaikan harga, melalui intensifikasi dan diversifikasi jenis dan tarif PNBP ektor LHK, penyesuaian harga patokan yang mengikuti perkembangan harga pasar, perizinan berbasis multiusaha, peningkatan produktivitas hutan alam dengan Silvikultur Intensif (SILIN), optimalisasi produktivitas hasil hutan bukan kayu (HHBK), pembebasan Dana Reboisasi untuk tanaman SILIN yang merupakan tanaman budidaya tidak tumbuh alami, optimalisasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam, dan reaktivasi kawasan wisata; (3) penguatan Kerjasama dan perbaikan administrasi antara lain melalui pembebasan layanan dokumen untuk perhutanan sosial (PS), tata kelola sistem yang mempermudah layanan (*single window*), penagihan dan peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap Wajib Bayar, peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara *online* terintegrasi dengan SIMPONI, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan tertib penatausahaan PNBP berbasis *online*.

PNBP KLHK Tahun 2023 akan diperuntukkan kembali untuk membiayai program dan kegiatan KLHK di tahun berjalan dengan pembagian pusat dan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari target penerimaan sebesar Rp5,26 triliun, KLHK baru mengusulkan penggunaannya sebesar Rp900 miliar atau 17,08% dari total target penerimaan PNBP tahun 2023. Untuk itu, perlu dilakukan inisiasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait penggunaan PNBP untuk membiayai program dan kegiatan prioritas di KLHK. Adapun target penerimaan dan rencana penggunaan PNBP tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Target Penerimaan dan Rencana Penggunaan PNBP Tahun 2023 Per Unit Kerja eselon I

NO	UNIT KERJA ESELON I	PNBP 2023	
		TARGET PENERIMAAN	RENCANA PENGGUNAAN
1	Setjen	3.565.326.960.250	-
2	Ditjen PHL	-	43.190.560.000
3	Ditjen PDASRH	89.929.000	490.784.210.000
4	Ditjen KSDAE	90.706.051.000	150.000.030.000
5	Ditjen PKTL	1.609.961.629.000	73.206.837.000
6	BSI	1.580.975.000	6.901.352.000
7	BP2SDM	500.000.000	10.157.287.000
8	Ditjen PSKL	-	33.390.000.000
9	Ditjen PHLHK	-	36.518.296.000
10	Ditjen PPI	-	55.851.428.000
	JUMLAH	**5.268.165.544.250**	**900.000.000.000**

Anggaran Sumber Dana Hibah Luar Negeri (HLN)

Upaya KLHK dalam mengurangi beban APBN salah satunya adalah melalui perjanjian kerjasama dengan negara-negara donor yang yang turut berkomitmen dalam isu perubahan iklim, penurunan laju deforestasi dan keanekaragaman hayati. Negara-negara donor memberikan komitmen dalam bentuk Hibah Luar Negeri (HLN) yang diarahkan untuk ikut mendorong tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca dan menuju FoLU Net Sink 2030. Rincian Proyek HLN Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Rencana Penarikan HLN Tahun 2023

NO	UNIT KERJA ESELON I	PROYEK HLN	RENCANA PENARIKAN HLN (dalam miliar rupiah)
1	Ditjen PHL	Community focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP I)	0,42
2	Ditjen PDASRH	Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)	20,02
		Forest Programme III - Sulawesi Programme	0,9
		Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	54,16
3	Ditjen KSDAE	Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)	5,37
		Forest Programme III - Sulawesi Programme	17,03
		Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	8,53
		Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest	5
		Community focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP I)	0,41
		Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscapes Landscape Management Project	8,51
4	Ditjen PSKL	Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)	7,36
		Forest Programme III - Sulawesi Programme	3,42
		Forest Programme V - Social Forestry Support Programme	35,9
		Community focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP I)	8,25
		Strengthening Social Forestry in Indonesia Project	48,02
5	Ditjen PPI	HCFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector Project	6
		Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	8,94
6	BSILHK	Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest	15
	TOTAL		**253,24**

D. BELANJA

Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tantangan fiskal, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan fiskal di tahun 2023, salah satunya reformasi fiskal melalui :

Peningkatan Pendapatan

Penguatan *Spending Better*

Pembiayaan Inovatif dan Berkelanjutan

Sejalan dengan reformasi fiskal, kebijakan belanja K/L tahun 2023 adalah sebagai berikut.

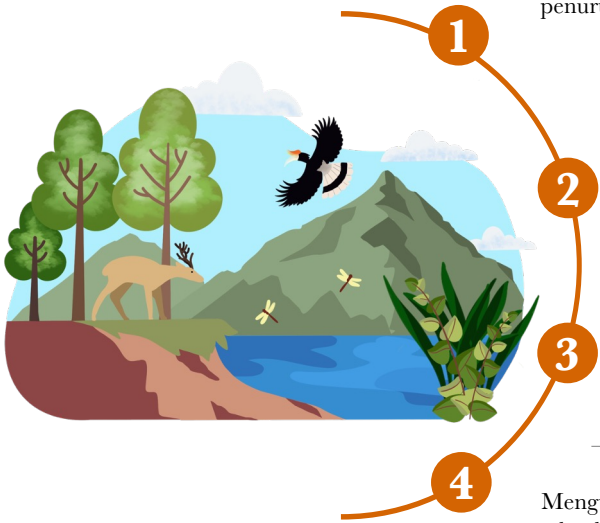

1. Mengutamakan pembiayaan berkarakter *fix cost* utamanya terhadap pemangkuan tapak kawasan hutan, untuk mempertahankan penurunan laju deforestasi dan mengurangi beban lingkungan

2. Mendorong ruang gerak fiskal yang cukup dengan mendorong pengurangan pemanfaatan belanja pemerintah sebagai rupiah murni pendamping hibah luar negeri

3. Meningkatkan belanja masyarakat, utamanya pembiayaan berkarakter padat karya untuk mendorong produktivitas masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah

4. Mengurangi biaya aparatur dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan hutan dan lingkungan

Usulan Belanja Kementerian Tahun 2023 digunakan untuk memenuhi kinerja pembangunan nasional dan mendorong perkembangan milestone pembangunan LHK. Koridor yang ditetapkan terhadap belanja Kementerian dituntun oleh kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai narasi belanja Kementerian 2023.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2023, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran KLHK TA. 2022 sebesar **Rp.6.912.784.958**,- yang terbagi atas sumber pendanaan disamping ini

Sumber dana pada anggaran 2023 (Ribu Rupiah)

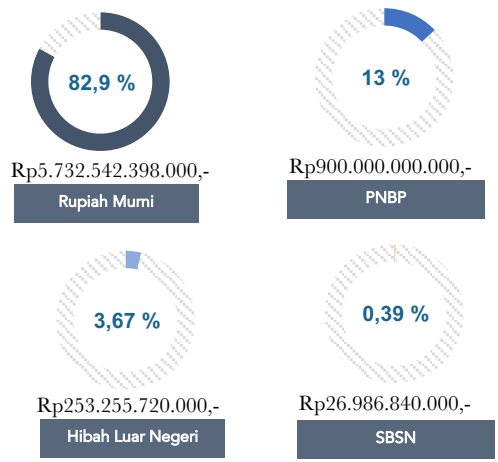

Rencana Belanja Kementerian menurut Program (Rp. Milyar)

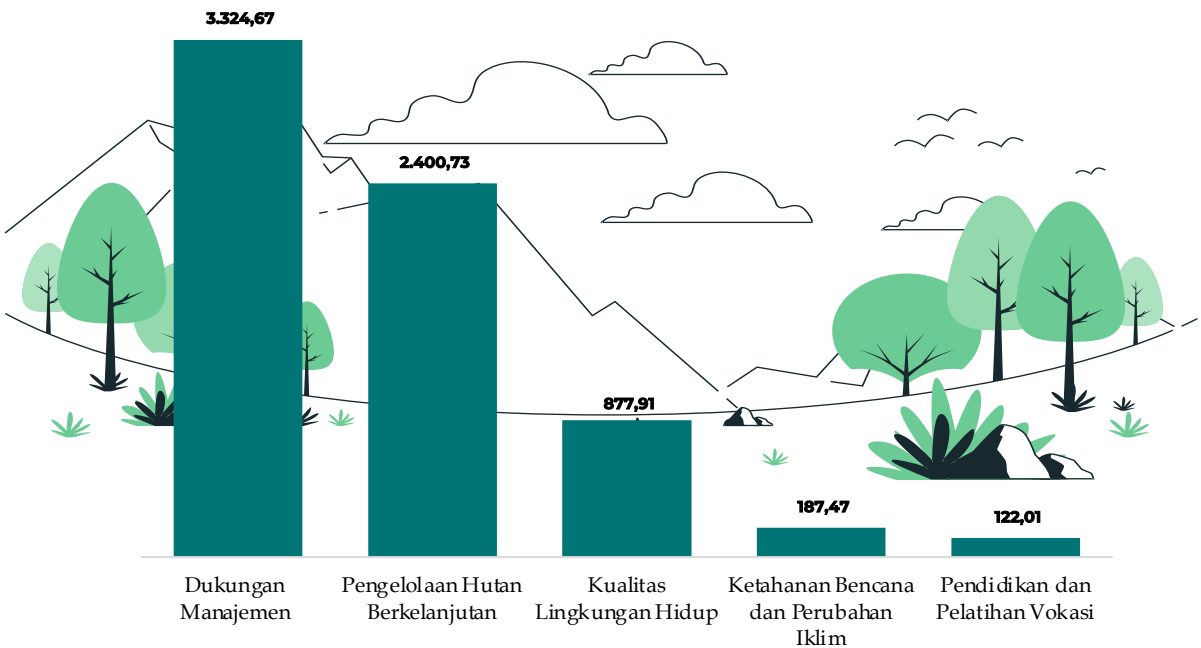

PAGU KEMENTERIAN LHK TA 2023
PER UNIT KERJA ESELON I

Dalam implementasinya, seluruh anggaran program KLHK dilaksanakan oleh 13 Unit Kerja Eselon (UKE) I dan BRGM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi anggaran tahun 2023 setiap UKE I dan BRGM adalah sebagai berikut.

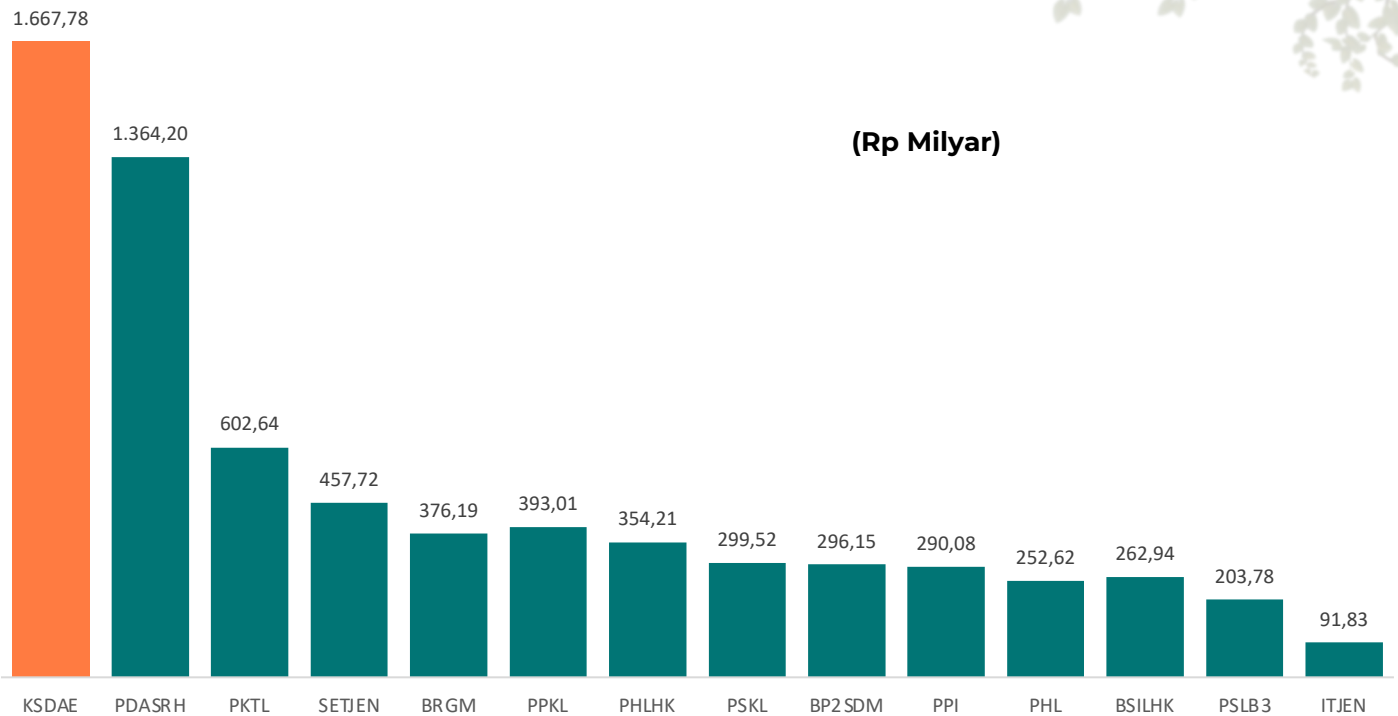

Selengkapnya menurut jenis belanja dan sumber dana adalah sebagai berikut.

PAGU KEMENTERIAN LHK TA
PER JENIS BELANJA TAHUN 2023

No.	UNIT KERJA ESELON I	BELANJA OPERASIONAL			BELANJA NON OPERASIONAL					PAGU
		PEGAWAI	BARANG	JUMLAH	RM	PNBP	HLN	SBSN	JUMLAH	
1.	Sekretariat Jenderal	114.887.164	158.933.661	273.820.825	183.907.934	-	-	-	183.907.934	457.728.759
2.	Inspektorat Jenderal	27.331.848	5.958.348	33.290.196	58.540.332	-	-	-	58.540.332	91.830.528
3.	Ditjen PHL	101.766.637	30.705.111	132.471.748	76.538.826	43.190.560	423.500	-	120.152.886	252.624.634
4.	Ditjen PDASRH	187.744.310	85.687.149	273.431.459	524.901.908	490.784.210	75.084.070	-	1.090.770.188	1.364.201.647
5.	Ditjen KSDAE	724.970.842	289.642.317	1.014.613.159	458.316.242	150.000.030	44.854.680	-	653.170.952	1.667.784.111
6.	Ditjen PKTL	154.370.130	49.913.461	204.283.591	325.153.619	73.206.837	-	-	398.360.456	602.644.047
7.	BSI LHK	144.911.111	53.525.636	198.436.747	42.602.589	6.901.352	15.000.000	-	64.503.941	262.940.688
8.	BP2SDM	105.266.296	45.922.095	151.188.391	107.822.432	10.157.287	-	26.986.840	144.966.559	296.154.950
9.	Ditjen PSKL	40.178.026	18.857.522	59.035.548	104.146.130	33.390.000	102.950.670	-	240.486.800	299.522.348
10.	Ditjen PHLHK	152.312.083	32.077.791	184.389.874	133.302.933	36.518.296	-	-	169.821.229	354.211.103
11.	Ditjen PPI	56.168.591	45.583.902	101.752.493	117.536.639	55.851.428	14.942.800	-	188.330.867	290.083.360
12.	Ditjen PSLB3	32.267.307	9.490.268	41.757.575	162.027.198	-	-	-	162.027.198	203.784.773
13.	Ditjen PPKL	34.799.910	12.742.196	47.542.106	345.533.523	-	-	-	345.533.523	393.075.629
14.	BRGM	13.004.812	15.389.069	28.393.881	347.804.500	-	-	-	347.804.500	376.198.381
JUMLAH		1.889.979.067	854.428.526	2.744.407.593	2.988.134.805	900.000.000	253.255.720	26.986.840	4.168.377.365	6.912.784.958

Jenis belanja khususnya non operasional diharapkan dapat drealisasikan secara optimal untuk belanja-belanja yang produktif dan memberikan nilai tambah di tingkat tapak atas pencapaian-pencapian target kinerja setiap Unit Kerja Eselon I. Selengkapnya, kinerja Unit Kerja Eselon I tahun 2023 adalah sebagi berikut.

PAGU DAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL

Pagu Sekretariat Jenderal tahun 2023 sebesar **Rp457.728.759.000,-** diprioritaskan untuk penerapan Manajemen Talenta, Transformasi Digital, Peningkatan Reformasi Birokrasi, Pengelolaan dan Artikulasi Kinerja

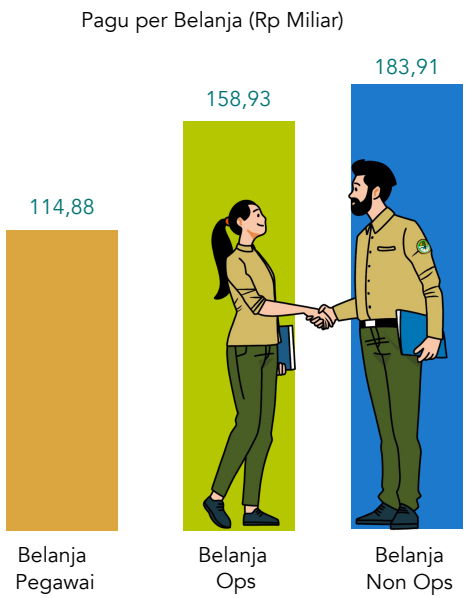

KINERJA	TARGET
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78 Poin
Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK	340 Poin
Opini terhadap laporan keuangan KLHK	4 Poin
Survei Kepuasan Publik	4 Poin
Nilai Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5 Poin
Jumlah Dokumen Kerjasama	30 Dokumen
Indeks Sistem pemerintah Berbasis Elektronik	3,65 Poin
Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK	77,5 Poin
Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	86 Poin

PAGU DAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL

Pagu Inspektorat Jenderal tahun 2023 sebesar **Rp91.830.528.000,-** diprioritaskan untuk menjamin terwujudnya zona integritas bebas korupsi dan pengelolaan resiko, dan pengawasan major project dan prioritas nasional

KINERJA	TARGET
Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3 Poin
Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,3 Poin
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3,3 Poin
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3 Poin
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	3 Poin

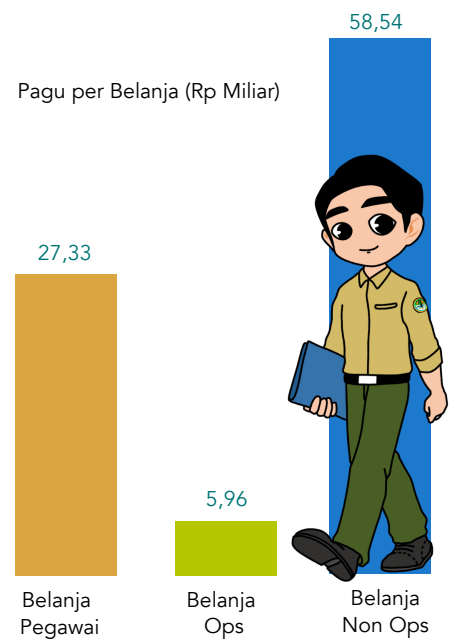

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PHL

Pagu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2023 sebesar **Rp252.624.634.000,-** diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan berusaha untuk ekspor, industri primer, produksi kayu bulat, pencegahan laju deforestasi di hutan produksi dan hutan lindung, fasilitasi dan pembinaan UMKM kehutanan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat di hutan produksi dan hutan lindung untuk produktivitas kelompok

KINERJA	TARGET
Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	428.000 Ha
Jumlah Produksi Kayu Bulat	57 Juta m3
Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	10 M US$
Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	3,233 Triliun
Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	15.000 ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	82 Poin

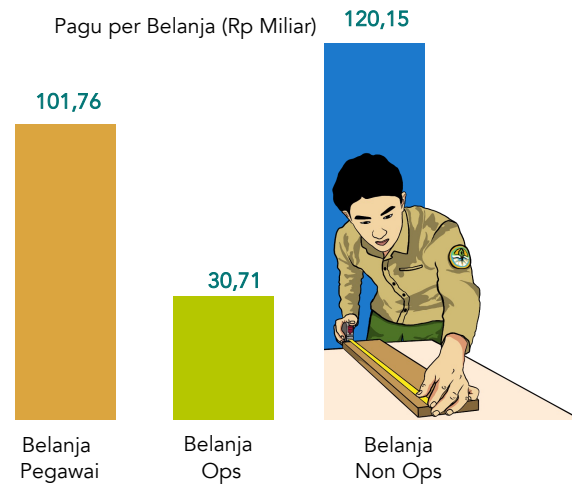

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PDASRH

Pagu Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan tahun 2023 sebesar **Rp1.364.201.647.000,-** diprioritaskan untuk rehabilitasi hutan dan lahan di IKN, pemeliharaan tanaman RHL (Rehabilitasi Hutan dan lahan) P1 dan P2, bibit berkualitas, dan Kebun Bibit Rakyat

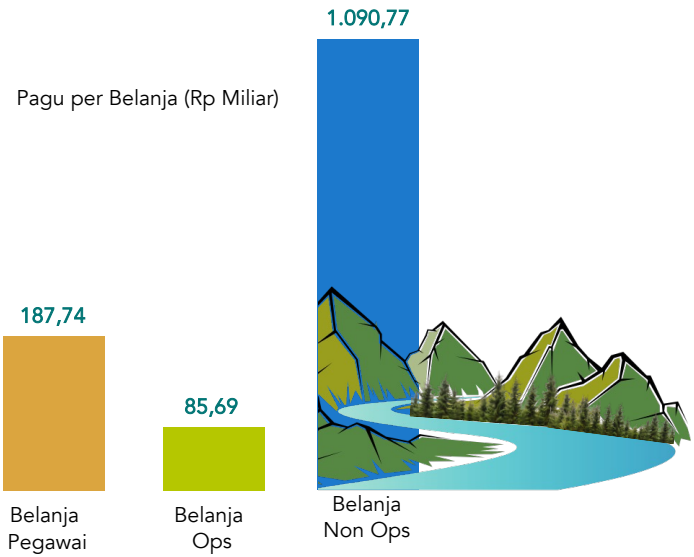

KINERJA	TARGET
Pengendalian Kerusakan Danau Prioritas Nasional	15 Danau
Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	14.025 Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	78 Poin

PAGU DAN KINERJA
DITJEN KSDAE

Pagu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2023 sebesar **Rp1.667.784.111.000,-** diprioritaskan untuk koridarisasi satwa di IKN dan *food estate*, pencegahan laju deforestasi di kawasan konservasi, fasilitasi usaha ekonomi produktif untuk produktivitas kelompok di kawasan konservasi

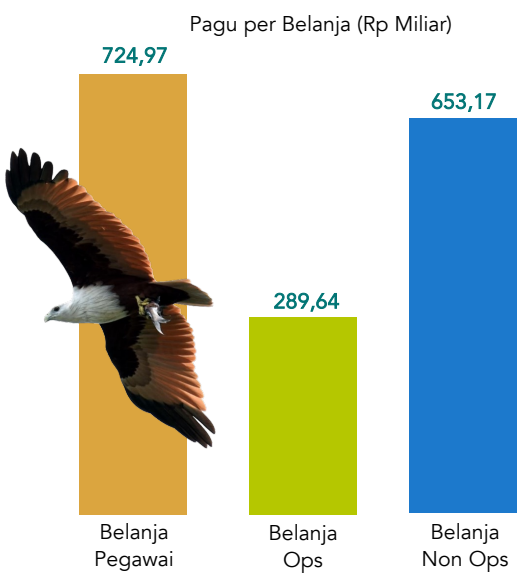

KINERJA	TARGET
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	10.000.000 Ha
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	12.000.000 Ha
Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	2,15 Triliun
Nilai PNBP Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dam pemanfaatan TSL secara lestari	230 Milyar Rupiah
Desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1.000 Desa
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Ekosistem	78 Poin

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PKTL

Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 sebesar **Rp602.644.047.000,-** diprioritaskan untuk penyelesaian tata batas dan penetapan kawasan hutan, penyiapan *safeguard* lingkungan hidup dan penanganan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan

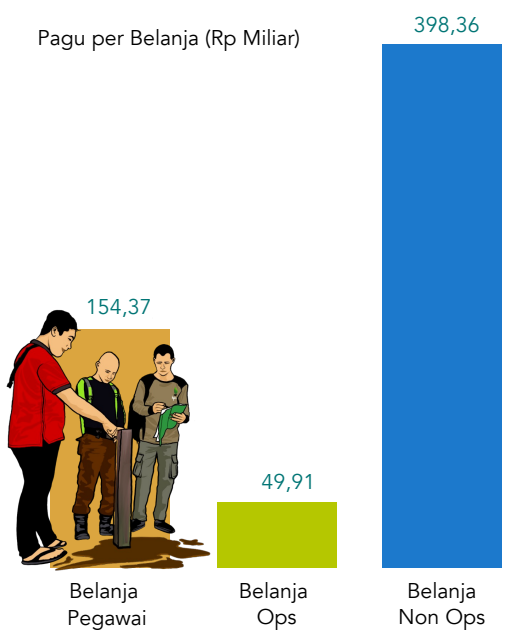

KINERJA	TARGET
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	583 Layanan
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan
Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	14,9 Juta Ha
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	31 Layanan
Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	10,1 Ribu Ha
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	83 Dokumen
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	195 Laporan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82 Poin

PAGU DAN KINERJA
BSI LHK

Pagu Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar **Rp262.940.688.000,-** diprioritaskan untuk penyusunan dan penerapan standar instrumen, utamanya untuk peningkatan produktivitas kelompok masyarakat, pemeliharaan laboratorium dan *safeguard* pengelolaan lingkungan hidup

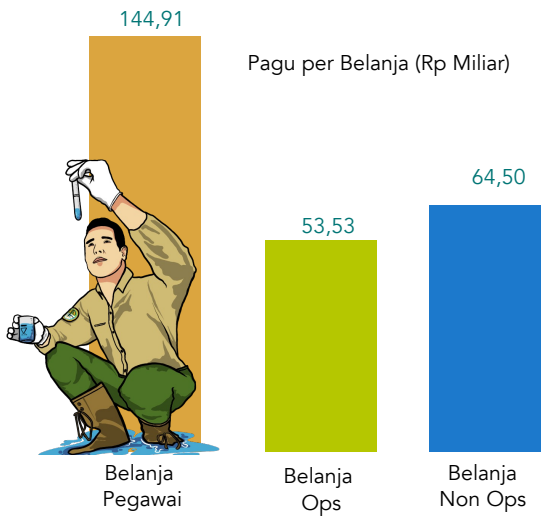

KINERJA	TARGET
Jumlah penerapan standar instrument kualitas lingkungan hidup	75 Lembaga
Jumlah standar dan instrument investasi di bidang lingkungan hidup	16 NSPK
Jumlah standar dan instrument investasi di bidang kehutanan	9 NSPK
Jumlah standar dan instrument investasi di bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim	10 NSPK
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78 Poin

PAGU DAN KINERJA
BP2SDM

Pagu Badan Penyuluhann dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 sebesar **Rp296.154.950.000,-** diprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan, diklat vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha bagi masyarakat, dan peningkatan produktivitas nilai transaksi keuangan kelompok

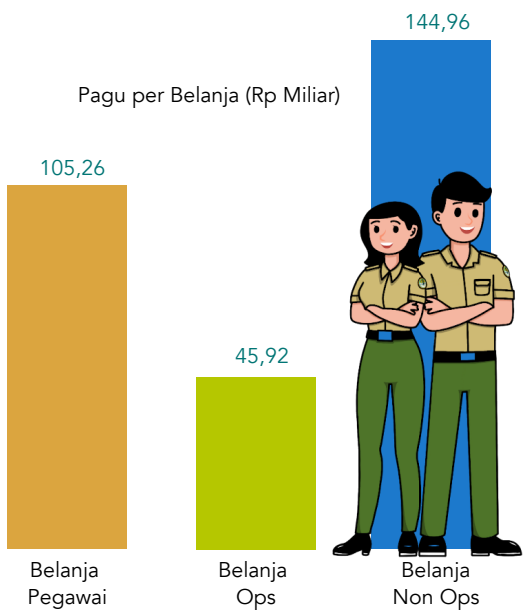

KINERJA	TARGET
SDM LHK yang meningkat kompetensinya	2.940 Orang
Jumlah Lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	473 Orang
Indeks efektifivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	69 Poin
Lembaga/Komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	247 Lembaga/Komunitas
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,3 Triliun Rupiah
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	78 Poin

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PSKL

Pagu Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tahun 2023 sebesar **Rp299.522.348.000,-** diprioritaskan untuk peningkatan luas akses kelola perhutanan sosial, peningkatan kapasitas dan produktivitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka peningkatan nilai transaksi keuangan.

KINERJA	TARGET
Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial	152.000 Ha
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	1,1 Triliun Rupiah
Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat	150.000 Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	74 Poin

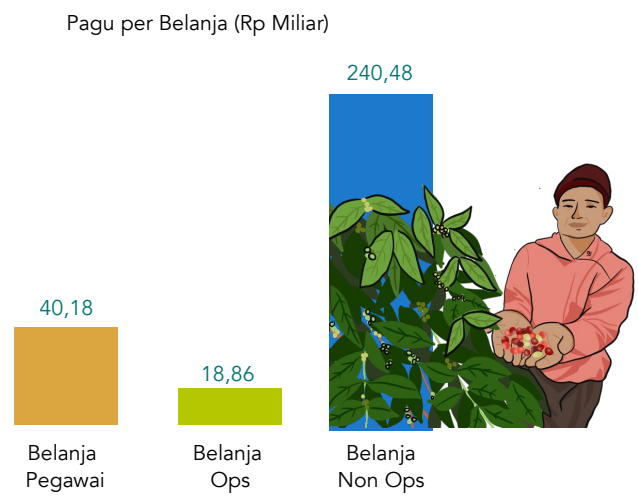

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PHLHK

Pagu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hiduip dan Kehutanan tahun 2023 sebesar **Rp354.211.103.000,-** diprioritaskan untuk pengawasan ketaatan kegiatan/usaha, penyelesaian kasus pidana dan perdata LHK, pencegahan dan pengamanan LHK, serta penanganan masalah penggunaan Kawasan hutan.

KINERJA	TARGET
Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	51 Persen
Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	250 Kasus
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	300.000 Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78 Poin

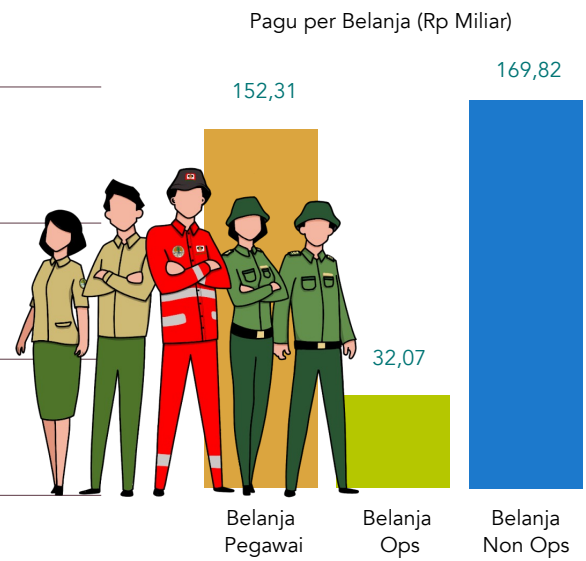

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PPI

Pagu Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tahun 2023 sebesar **Rp290.083.360.000,-** diprioritaskan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penghitungan penurunan emisi GRK, pelaksanaan mandat Perpres 98 tahun 2021, penguatan kerangka kebijakan pelaksanaan FoLU Net Sink 2030, dan program kampung iklim

KINERJA	TARGET
Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK Nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim	**3** Dokumen
Jumlah wilayah yang berketahanan iklim	**6.500** Desa
Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen Kerjasama tingkat regional dan internasional sevagai pelaksanaan peran NFP	**3** Dokumen
Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor	**1** Dokumen
Penurunan konsumsi bahan perusak ozon	**95,84** ODP Ton
Penurunan luas areal kebakaran lahan hutan	**2** Persen
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	**78** Poin

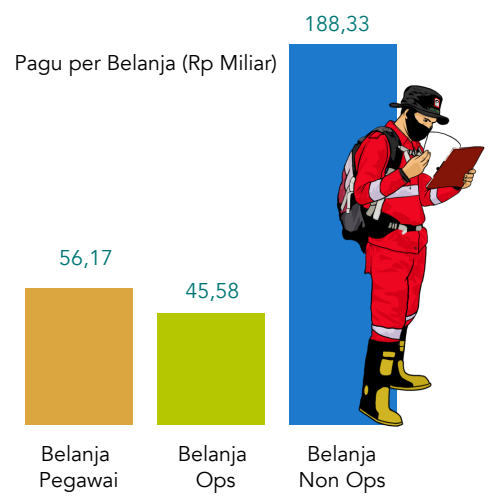

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PSLB3

Pagu Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 tahun 2023 sebesar **Rp203.784.773.000,-** diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari fasyankes, dukungan teknis pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 dan sampah spesifik secara terpadu, penghapusan penggunaan merkuri, peningkatan sirkular ekonomi, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, dan pengelolaan sampah

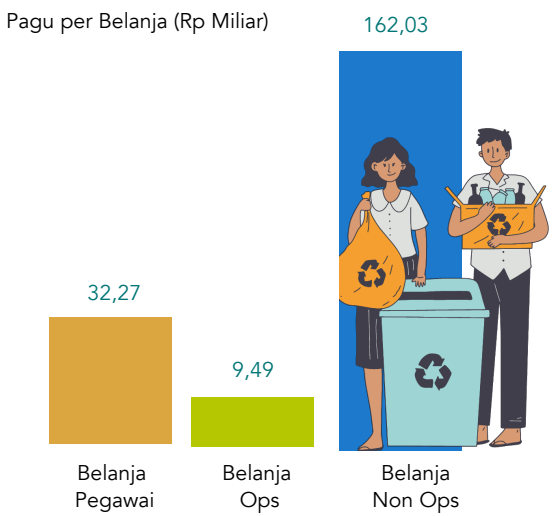

KINERJA	TARGET
Jumlah B3 yang dikelola	6.000.000 Ton
Jumlah limbah B3 yang dikelola	33.629.101 Ton
Jumlah sampah yang dikelola	15.633.622 Ton
Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3	20,84 Triliun Rupiah
Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah	4.921.472.000 Rupiah
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	78 Poin

PAGU DAN KINERJA
DITJEN PPKL

Pagu Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2023 sebesar **Rp393.075.629.000,-** diprioritaskan untuk penguatan sistem peringatan dini bencana, penurunan beban pencemaran melalui pembangunan IPAL, ekoriparian, pengelolaan gambut dan pemulihan lahan akses terbuka

Pagu per Belanja (Rp Miliar)

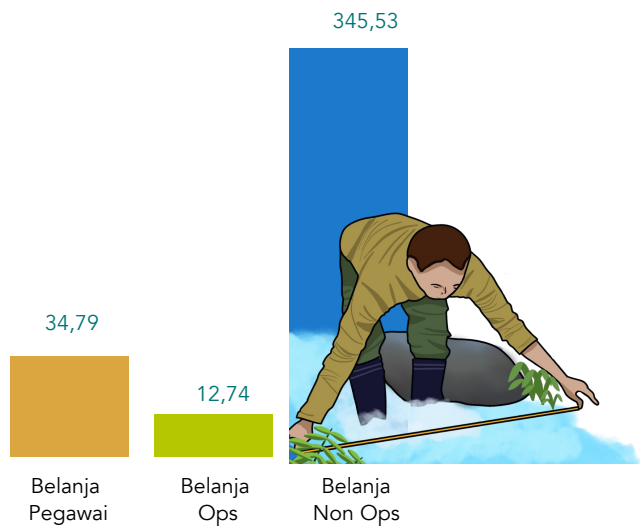

KINERJA	TARGET
Nilai Indeks Kualitas Udara	84,4 Poin
Nilai Indeks Kualitas Air	55,4 Poin
Nilai Indeks Kualitas Air Laut	60 Poin
Nilai Indeks Kualitas Lahan	64,5 Poin
Unit Usaha Pemanfaatan Air Limbah	16 Perusahaan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78 Poin

PAGU DAN KINERJA
BRGM

Pagu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2023 sebesar **Rp376.198.381.000,-** diprioritaskan untuk restorasi gambut di 7 provinsi dan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi.

KINERJA	TARGET
Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi	3.064 Ha
Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi	300.000 Ha
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	78 Poin

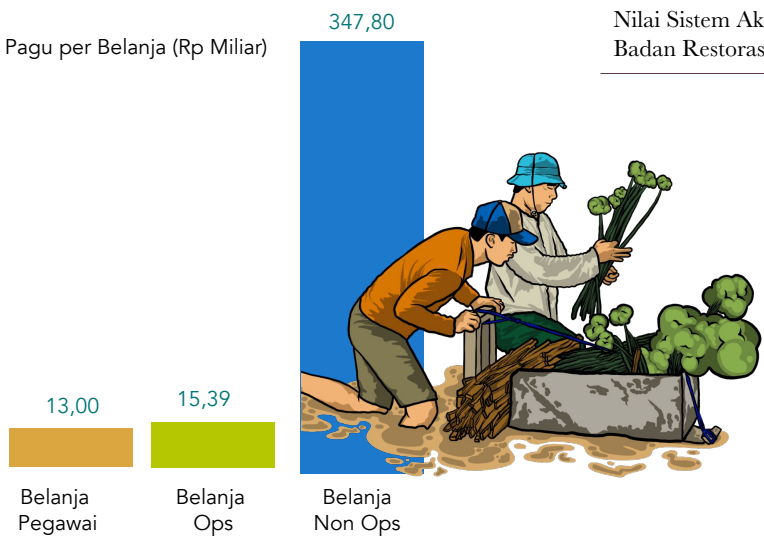

DUKUNGAN KLHK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Sejak tahun 2020, seluruh program dan kegiatan KLHK diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) yang telah dicanangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang ada, sebagian besar anggaran kegiatan KLHK tahun 2023 dialokasikan untuk mendukung 4 (empat) PN yaitu : (PN 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk menyukseskan PN di tahun 2023 adalah sebesar **Rp.3.120.426.683.000,-** dengan rincian per PN sebagai berikut.

PN 2
Rp46.107.000.000,-

PN 3
Rp221.414.217.000,-

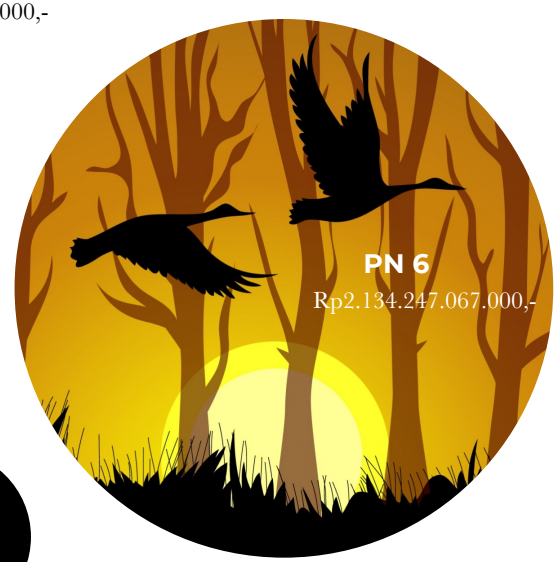

PN 1
Rp718.658.399.000,-

Highlight Pembangunan LHK 2023 untuk Mendukung PN

Alokasi anggaran KLHK yang mendukung Prioritas Nasional merupakan hasil identifikasi arsitektur kinerja mulai dari PN sampai dengan level Rincian Output (RO) yang mencerminkan internalisasi dan intervensi PN dalam pembangunan LHK tahun 2023. Untuk menggambarkan hal tersebut, berikut disajikan *Highligh* pembangunan LHK 2023 untuk mendukung PN.

PN 1

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan prioritas diantaranya: pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas diantaranya : peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata.

50 Unit

Mata air yang dipulihkan

400 Unit

Bangunan pengendali kerusakan perairan darat

15

Danau yang dikendalikan kerusakannya

37

Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar

15

Destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan

PN 2

MENGGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara.

500 hektar

Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS sekitarnya

500 hektar

Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara

1

Layanan permohonan pelepasan kawasa lahan untuk IKN

68 ribu hektar

Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

PN 3
MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas perhutanan sosial, reforma agraria, dan keperantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

150 kelompok masyarakat

Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat

5 rekomendasi kebijakan

Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan

27 kelompok masyarakat

Kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kelasnya menjadi gold/platinum

30 kelompok masyarakat

Kelompok tani hutan mandiri yang dibentuk

473 orang

Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

PN 6
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Kementerian LHK mendukung program prioritas: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.

45 ribu hektar

Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi

300 ribu hektar

Lahan gambut yang direstorasi

160 perkara

Kasus Tindak Pidana LHK P21

1.200 operasi

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat

5.348 ton

Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 non institusi

ANGGARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

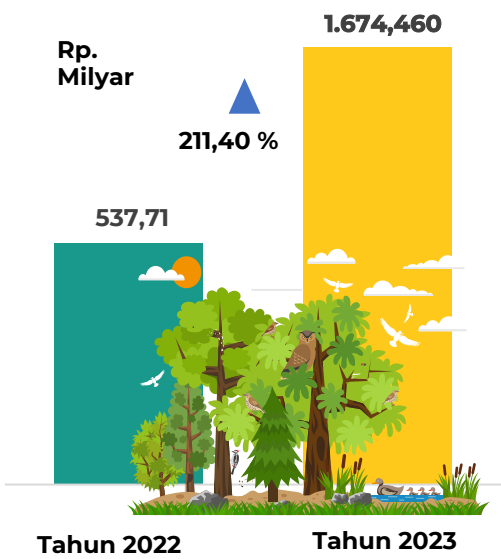

Selain pencapaian target-target KLHK, pagu alokasi anggaran tahun 2023 juga harus memberikan dampak positif berupa *benefit*/keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Semangat itulah yang menjadi dasar perlunya dilakukan inventarisir anggaran kegiatan berbasis masyarakat tahun 2023.

Belanja Kementerian LHK Tahun 2023 terus diupayakan untuk membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat seperti Bang PeSoNa, KBR, Usaha Ekonomi Produktif, Pembentukan KTH Mandiri, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Dalkarhutla, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, serta kegiatan lain yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Total anggaran berbasis masyarakat TA. 2023 yaitu sebesar Rp.1.674,460 Miliar atau naik 211,40% dari angka tahun 2022 sebesar Rp.537,71 Miliar.

Sebaran angkaran berbasis masyarakat TA. 2023 per Unit Eselon I adalah sebagai berikut.

ANGGARAN BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2023 (1/2)

No	Unit Eselon I	Kegiatan	Pagu
1	Direktorat Jenderal PHL	Fasilitasi UMKM untuk Kegiatan SVLK, Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Hutan Lestari, Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan, Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	31.523.015.000
2	Direktorat Jenderal PDASRH	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah IKN dan DAS Sekitarnya (Penanaman), Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah IKN dan DAS Sekitarnya (Pemeliharaan), Penanaman RHL, Pemeliharaan Tanaman RHL P1, Pemeliharaan Tanaman RHL P2, Bibit Berkualitas, Bibit Produktif, Kebun Bibit Rakyat, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pantai, Bangunan Konservasi Tanah dan Air, Pemeliharaan Rehabilitasi Pesisir Tahun-2, Pemeliharaan Rehabilitasi Pesisir Tahun-1	918.527.233.000
3	Direktorat Jenderal KSDAE	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif, Unit Kemitraan konservasi yang ditingkatkan usahanya, Pengembangan Kapasitas Pokmas Wisata Alam, Patroli Bersama Masyarakat, Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari), Pemulihan Ekosistem Daratan di kawasan konservasi, ekosistem esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT, Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	183.428.835.000
4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan Mandiri, Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya, Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal, SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan, Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha, Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.478.607.000
5	Direktorat Jenderal PSKL	Bang Pesona dan Alat Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	37.087.741.000

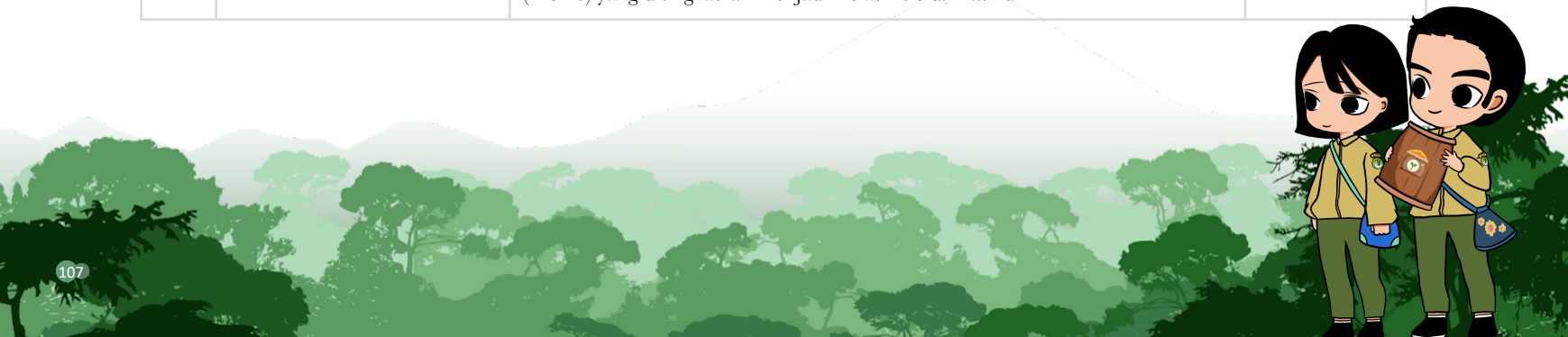

ANGGARAN BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2023 (2/2)

No	Unit Eselon I	Kegiatan	Pagu
6	Direktorat Jenderal PSLB3	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK, Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas, Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional, Penanganan Sampah di Citarum dan Daerah Prioritas, Motor sampah, Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah,	72.959.896.000
7	Direktorat Jenderal PPKL	Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan Rakyat, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut, Pemulihan lahan gambut terdegradasi milik masyarakat, Pemulihan Padang Lamun/Terumbu Karang	109.850.000.000
8	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Sumur Bor, Sekat Kanal, Revitalisasi Mata Pencaharian dan Ekonomi Masyarakat, Penanaman Rehabilitasi Mangrove, Desa Mandiri Peduli Gambut, Desa Mandiri Peduli Mangrove	182.805.262.000
9	Direktorat Jenderal PPI	Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	125.000.000.000
10	Badan Standardisasi Instrumen LHK	Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	3.800.000.000
TOTAL			**1.674.460.589.000**

IV. PENUTUP

Kondisi Lingkungan yang semakin baik, ekonomi masyarakat yang semakin tumbuh, keadilan masyarakat yang semakin merata

RENCANAKAN KERJAMU
KERJAKAN RENCANAMU

Rencana Kerja (Renja) KLHK Tahun 2023 menggambarkan target kinerja dan anggaran sesuai hasil kesepakatan tiga pihak (Kementerian LHK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan) dan persetujuan komisi terkait di DPR RI. Dengan anggaran yang terbatas, KLHK harus menempuh cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan KLHK juga harus mampu memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, tidak hanya fokus pada input, proses, output dan outcome, tetapi juga harus mampu menjelaskan *impact* dan benefit yang diperoleh masyarakat atas capaian-capaian kinerja KLHK.

Perlu adanya kebijakan integratif dalam rangka percepatan pencapaian target-target di lapangan yaitu kebijakan yang mampu menyentuh aspek strategis maupun aspek teknis. Sentuhan terhadap aspek strategis dimaksudkan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menggerakan bahkan memiliki daya paksa terhadap lintas sektor kementerian dan juga pemerintah daerah, yaitu dapat berupa Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden.

Sementara sentuhan terhadap aspek teknis dimaksudkan agar yang dikerjakan tidak hanya mengejar target sebagai tujuan utama tetapi perlu adanya aspek pengembangan dan pengendalian sebagai jaminan keberlanjutan target kinerja yang telah dicapai. Oleh karenanya, pada aspek teknis ini diperlukan dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis –Juklak dan Juknis- yang dapat menjadi peta jalan (*road map*) dalam menjamin pelaksanaan perluasan, pengembangan dan pengendalian capaian kinerja KLHK sehingga semangat pemulihan ekonomi nasional benar-benar dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, Renja KLHK Tahun 2023 ini harus menjadi acuan dalam penyusunan Renja Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan UPT lingkup KLHK sehingga *cascading* pencapaian kinerja utama pembangunan LHK Tahun 2023 dapat terbaca sampai tingkat tapak dan terus memberikan kontribusi positif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2023.

LAMPIRAN
RENCANA KERJA KLHK
TAHUN 2023

Lampiran 1. Arsitektur Kinerja KLHK Tahun 2023

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7	Unit	2.805.000
				DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	660	Orang	3.115.288
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10	Orang/Layanan	1.200.000
				SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	690	Orang	3.025.000
				SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	690	Orang	2.760.000
		6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	04-SMK Kehutanan	RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah	5	Paket/Unit/m2	5.166.817
				RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1	unit	26.986.840
				RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4	unit	14.843.918
				SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	473	Orang	56.334.414
		6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	610	Orang	1.855.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	230	Lembaga	780.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17	Lembaga	480.000
		6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5	Dokumen	800.000
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5	Dokumen	800.000
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK	900	Orang/Layanan	1.400.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6762-Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	ADA-Standarisasi Produk	051-Jumlah standar produk yang diterapkan melalui instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	20	produk	1.200.000
				ADD-Standarisasi Lembaga	051-Standar usaha yang diterapkan melalui instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	20	Lembaga	1.200.000
				PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7	NSPK	3.500.000
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	051-Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK	1	layanan	203.915
	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5446-Adaptasi Perubahan Iklim	02-Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kampung Iklim	6.500	Kelompok Masyarakat	3.813.112
				BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim	1	Layanan	2.700.000
		5447-Mitigasi Perubahan Iklim	03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	Lembaga	1.000.000
				BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	6	Layanan	3.000.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Implementasi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon	3	Lembaga	900.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Pre Invesment Bio Carbon Fund For Initiative Suitainable Forest Landscape	5	Lembaga	8.942.800

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5447-Mitigasi Perubahan Iklim	03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-HCFC Phase Out In The Polyurethane Foam Sector Project	3	Badan Usaha	6.000.000
		5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	04-Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring , Pelaporan dan Verifikasi	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Rancangan Pedoman Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia	1	NSPK	406.600
				BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	1	Layanan	3.343.400
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi Penyediaan Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri pada Tingkat Sub Nasional di 34 Provinsi	5	Daerah (Kab/Kota)	1.750.000
		5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan	970	Kelompok Masyarakat	112.000.000
				QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	1.200	Operasi	13.000.000
				QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	002-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman Udara	100	Operasi	15.758.790
		6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	001-Bahan atau Rumusan Kebijakan Sumber Daya Pendanaan dan Perundingan Perubahan Iklim	2	Rekomendasi Kebijakan	6.350.000
				BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon yang ditingkatkan	450	Orang	2.400.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6738-Rehabilitasi Perairan Darat	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.200.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	400	Unit	4.918.304
				RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	15	Danau	2.488.538
				RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Mata Air yang Dipulihkan	50	Mata Air	1.250.000
	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	900.000
				PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
				PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	003-Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11	Rekomendasi Kebijakan	1.700.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	10.000.000	Hektar	8.719.951
	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.000
				PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	1.051.523
				UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813
			06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20	Layanan	9.136.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000
			07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	4.694.085
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350
				QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	385.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	ADA-Standarisasi Produk	051-Standar produk yang diterapkan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	15	Produk	900.000
				ADD-Standarisasi Lembaga	052-Standar usaha yang diterapkan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	15	Lembaga	900.000
				CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	054-Pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional	1	unit	100.000
				PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	2	NSPK	1.000.000
				PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN)	24	NSPK	8.560.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	055-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	2	Lembaga	200.000
				RDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	057-Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan untuk menyiapkan standar LH yang berkualitas	1	unit	706.569
		6760-Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	08-Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	051-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK	100	Lembaga	1.000.000
				PEA-Koordinasi	051-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK	1	Kegiatan	200.000
				PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen LHK	10	NSPK	800.000
	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	03-Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE-Penanganan Perkara	001-Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	30	Perkara	10.009.150

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	04-Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	220	Orang	1.700.000
				QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001- Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	750	Badan Usaha	29.255.816
				QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	002- Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50	Badan Usaha	2.100.000
		5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	180	Orang/Kegiatan	2.987.880
				QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	160	Perkara/Berkas Perkara	52.071.735
				QCE-Penanganan Perkara	002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60	Perkara/Berkas Perkara	6.150.000
	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	08-Direktorat Penanganan Sampah	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik	1	Unit	4.093.396
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/ Kota	4.879.233
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	320	Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/ Kota	14.320.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	4	Unit	26.316.500
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	1	Unit	2.150.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	1	Unit	1.250.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	5456-Pengelolaan Sampah	09-Direktorat Pengurangan Sampah	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Fasilitasi Pengembangan Manajemen Bank Sampah	1	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	950.000
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/Kota	5.850.000
				QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	80	UMKM	2.300.000
				QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Fasilitasi Penguatan Tata Laksana Produsen untuk Pengurangan Sampah	25	Badan usaha/Miliar USD	1.150.000
		6755-Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	600.000
				BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Registrasi, Notifikasi, dan Rekomendasi Pengangkutan B3	170	Badan usaha/Penyalur	832.640
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pelayanan Fasilitasi dalam rangka pemusnahan Alkes bermerkuri	4	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	2.850.000
				FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	1	Sistem Informasi/Modul Aplikasi/Layanan	300.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK	2	Unit	3.950.000
		6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	400.000
				BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Persetujuan Teknis, Kelayakan Operasi PLB3 dan Rekomendasi	400	Badan usaha/Penyalur	2.850.000
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Sirkular Ekonomi dari Pemanfaatan Limbah B3	1	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	600.000
				BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	1.500	Industri/IKM/Miliar USD	2.850.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	3	Unit	34.400.000
				RBR-Dukungan Teknis	001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	1	Dokumen	2.859.861
		6757-Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Tanggap Darurat Limbah B3	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	200.000
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Sistem Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah	12	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	2.009.154

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6757-Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan dan Supervisi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi	10	Industri/IKM/Miliar USD	2.240.846
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	2	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	9.250.000
	13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	500	layanan	6.500.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	12	Unit	16.900.000
				RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	73	Unit	11.000.000
			03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual	652	layanan/dokumen/publikasi/Wilayah/Peta/Data	8.600.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA	40	layanan/dokumen/publikasi/Wilayah/Peta/Data	250.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	121	Unit	132.420.726
				RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	38	Unit	7.715.000
			04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut	34	layanan	5.000.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	004-Data dan Informasi Sampah Laut	23	layanan	2.000.000
			05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514	layanan	1.900.000
			06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	QMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	4	layanan	2.500.000
		6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	3.375	Industri/IKM/Miliar USD	2.000.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran udara	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.100.000
			03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	3375	Industri	9.100.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	8	Unit	4.000.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Instalasi Pengolahan Air Limbah	91	Unit	66.050.000
				UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.785.000
			04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	30	Badan usaha/Miliar USD	800.000
				UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	12	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.600.000
				UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan kinerja provinsi dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir dan laut	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000
			05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	100	Industri	800.000
			06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	400	Industri	1.000.000
			03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	005-Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	16	Industri	100.000
		6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	5	Unit	1.400.000
			05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	148	Hektar	19.800.000
			05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000
			06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut	132	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000
			06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	2250	Hektar	3.000.000
				UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi	60	Desa/Desa/Kelurahan	11.500.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	3	NSPK	904.674
				BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	50	Lembaga	1.324.509
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	layanan/bidang /dokumen/Miliar Rp	688.739
				BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Dukungan Operasional Rencana Pengelolaan Hutan melalui Forest Investment Programme (FIP I)	2	Lembaga	423.500
				BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	16	Lembaga	4.193.306
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	15	Lembaga	2.079.749
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	16	Lembaga	9.833.134
	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6730-Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK usaha pemanfaatan hutan	1	NSPK	300.000
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	38	layanan	2.217.143
				BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	40	Badan Usaha	4.890.160
				BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	39	Badan Usaha	5.324.766
	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	26	Badan Usaha	7.213.455
				QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	52	Badan Usaha	9.806.491

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	1	NSPK	182.310
				BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani	32	Kelompok Masyarakat	1.600.110
				BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	32	Badan Usaha	3.687.874
				QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	50	Badan usaha	1.561.102
		6732-Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1	NSPK	179.833
				BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	293	Badan usaha	1.927.459
				BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	85	Badan usaha	3.327.200
				BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	208	Badan usaha	2.900.287
				BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	293	Badan Usaha	4.279.629
		6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1	NSPK	223.310
				BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	370	Badan Usaha	7.105.110
				BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	160	Badan usaha	4.738.897
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Huta	1	Rekomendasi Kebijakan	348.956
				QAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	001-Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	37	Badan Usaha	537.168
				QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	25	UMKM	5.716.372
				QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	002-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	75	UMKM	8.773.399
				QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	160	Badan usaha	1.067.519

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	170	Badan Usaha	5.757.013
	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	36	Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.000.000
				RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Benih Berkualitas	37.500.000	Butir	2.787.972
				RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	41.800.000	Batang	221.000.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun	10	Hektar	3.520.000
		6734-Konservasi Tanah dan Air	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.500.000
				CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitasi Konservasi Tanah dan Air Provinsi Jambi melalui Forest Program II	2	Satker	20.081.215
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	750	Unit	14.249.970
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS	15.000	Hektar	1.500.000
		6735-Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	04-Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	34	Sistem Informasi	13.600.000
			11-Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.000.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.700.000
		6736-Rehabilitasi Hutan	12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.000.000
				CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Palu dan Lariang Hulu Sulteng melalui Forest Program III	1	Satker	900.000
				CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Mamasa melalui Forest Program IV	3	Satker	54.164.441
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	12.000	Hektar	634.350.608
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	500	Hektar	23.950.000
		6737-Rehabilitasi Mangrove	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.000.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6737-Rehabilitasi Mangrove	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.700.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan Mangrove	700	Hektar	33.691.336
	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	2	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	2	Rekomendasi Kebijakan	900.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	5	Rekomendasi Kebijakan	800.000
				BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001- Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP I)	2	Lembaga	408.000
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	10	Layanan	1.200.000
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	10	Layanan	1.500.000
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	25	Kelompok Masyarakat	11.300.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	15	Unit	14.300.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	52	Unit	33.150.000
				RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	7	Unit	4.307.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6739-Perencanaan Kawasan Konservasi	09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme III - Sulawesi	2	Lembaga	17.031.837
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Rekomendasi kebijakan Pemolaan, Penataan, dan Rencana Pengelolaan KK	1	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaran KK	1	Rekomendasi Kebijakan	2.800.000
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kawasan konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	30	Rekomendasi Kebijakan	14.300.000
				AEC-Kerja sama	001-Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	74	Dokumen	5.650.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	7.553.657	Hektar	22.298.000
		6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	600.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	18.200.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.400.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Kebijakan kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan KK	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Kebijakan Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	1	Rekomendasi Kebijakan	400.000
				BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002- Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1	Lembaga	8.527.968
				BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003-HLN Biodiversity Leuser	0	Lembaga	0
				BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	004-Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)	2	Lembaga	5.372.625
				BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	005-Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	5	Lembaga	8.514.250
				BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	200	Orang	4.000.000
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	277	Rekomendasi Kebijakan	6.547.835
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	560	Rekomendasi Kebijakan	129.430.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	500	Lembaga	52.270.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	500	Kelompok Masyarakat	14.000.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	90.000	Hektar	11.500.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	180.000	Hektar	5.100.000
		6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
				PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	13	Rekomendasi Kebijakan	10.290.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	300	Lembaga	3.600.000
				QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	500	Lembaga	4.700.000
				REB-Konservasi Jenis/Spesies	001-Penyelamatan Satwa Liar	500	Lokasi	31.392.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	001-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	1	Layanan	810.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	14.100.000	Hektar	42.129.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	68.000	Hektar	1.358.000
				RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Koridor Satwa dan Pengembangan WRU di IKN	2	Unit	10.000.000
				RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pusat Konservasi Plasma Nutfah di IKN	1	Unit	1.800.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi dan	1	Rekomendasi Kebijakan	3.900.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	500	Hektar	4.559.000
				REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	45.000	Hektar	39.700.000
	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan	392.000
				BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	10.764.901
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.600.000
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1	Layanan	1.000.000
			06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4	Rekomendasi Kebijakan	7.546.080
				PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	22	Rekomendasi Kebijakan	295.486.444
		5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	layanan	950.000
				BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	layanan	1.500.000
				BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	layanan	375.000
				BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi	1	layanan	125.000
				BMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	layanan	250.000
			06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	44	layanan	2.961.008
				BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22	layanan	2.311.425
		6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3	Rekomendasi Kebijakan	544.000
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300	layanan	1.888.575
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	layanan	200.000
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3	layanan	270.000
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	layanan	498.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	layanan	310.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1	layanan	500.000
			06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	Badan usaha	5.477.852
	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	ADA-Standarisasi Produk	051-Standar Produk yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	20	Produk	1.200.000
				ADD-Standarisasi Lembaga	051-Standar Usaha yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	20	Lembaga	1.200.000
				BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	051-Fasilitasi dan Pembinaan lembaga melalui Forest Program VI	1	Lembaga	15.000.000
				CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	051-KHDTK sebagai laboratorium lapangan	38	Unit	4.247.334
				CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	052-Laboratorium Kehutanan untuk menyiapkan standar kehutanan yang berkualitas	8	Unit	2.000.000
				PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3	NSPK	1.500.000
				PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN)	7	NSPK	3.440.000
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	051-Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK	6	Dokumen	2.700.000
				QMA-Data dan Informasi Publik	051-Pemanfaatan Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) oleh stakeholder	1	Layanan	120.000
	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5444-Peningkatan Penyuluhan	06-Pusat Penyuluhan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.000	Orang	2.538.607
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri	30	Kelompok Masyarakat	700.000
				BMA-Data dan Informasi Publik	001-Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	1	Laporan	100.000
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	20	Kelompok Masyarakat	700.000
	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
				BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-II	1	Kelompok Masyarakat	7.362.001
				BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project SSF	4	Kelompok Masyarakat	48.024.900
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial	237	Kelompok Masyarakat	10.500.000
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	237	Kelompok Masyarakat	4.500.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003-Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi	40	Kelompok Masyarakat	880.000
		6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
				BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-V	3	Kelompok Masyarakat	35.900.000
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	22	Layanan	1.907.400
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penangananya	26	Layanan	2.959.000
				QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	15	Layanan	2.517.800
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat	13	Kelompok Masyarakat	1.084.200
		6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
				BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Project FIP-I	2	Kelompok Masyarakat	8.246.909
				BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-III	1	Kelompok Masyarakat	3.416.860
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	304	Kelompok Masyarakat	3.040.000
				QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	27	Kelompok Masyarakat	5.087.741
				QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	640	Kelompok Masyarakat	34.176.000
		6752-Kemitraan Lingkungan	04-Direktorat Kemitraan Lingkungan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Kemitraan Lingkungan	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
				PEE-Kemitraan	001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan	40	Kesepakatan	3.094.000
				QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	1.510	Orang	35.096.550
	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	210	Orang/Kegiatan	3.200.000
				QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51	operasi	25.944.639
				QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	25	operasi	16.890.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	01-Sekretariat Jenderal	5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK	01-Biro Hubungan Masyarakat	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat	3	Layanan	7.263.125
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.401.758
		5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	02-Pusat Data dan Informasi	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	3.896.451

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.WA-Program Dukungan Manajemen	01-Sekretariat Jenderal	5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	02-Pusat Data dan Informasi	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.050.000
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Layanan	779.479
				FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1	Sistem Informasi	12.858.499
		5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	03-Biro Perencanaan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.239.143
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12	Dokumen	19.683.187
		5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	04-Biro Umum	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	5.901.387
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	959-Layanan Protokoler	1	Layanan	54.259.633
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	3	Layanan	20.654.085
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	2	Layanan	192.524.533
		5372-Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	06-Biro Kerja Sama Luar Negeri	AEA-Koordinasi	001-Layanan Kerjasama Internasional	3	Kegiatan	7.232.176
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.100.000
		5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional	07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	003-Layanan Umum P3E Jawa	1	Layanan	1.088.806
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	004-Layanan perkantoran P3E Jawa	1	Layanan	11.557.169
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	006-Layanan Sarana Internal P3E Jawa	59	Unit	816.605
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	11	Daerah	1.908.125
			08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	954.335
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	10.422.882
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	001-Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra	1	Unit	715.886
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	8	Daerah	1.670.221
			09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	005-Layanan umum P3E Kalimantan	1	Layanan	1.346.050
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	006-Layanan perkantoran P3E Kalimantan	1	Layanan	9.350.802
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	013-Layanan Sarana Internal P3E Kalimantan	1	Unit	1.009.537
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	5	Daerah	2.555.251
			10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	003-Layanan Sarana Internal P3E Sulawesi Maluku	6	Unit	1.179.894
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran P3E Sulawesi Maluku	1	Layanan	11.058.412
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	004-Layanan Prasarana Internal P3E Sulawesi - Maluku	2	Unit	1.415.920
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku	30	Daerah	2.123.997

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.WA-Program Dukungan Manajemen	01-Sekretariat Jenderal	5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional	12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	2.063.200
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	005-Layanan Sarana Internal P3E Papua	12	Unit	180.000
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	8	Daerah	3.364.941
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran P3E Papua	1	Layanan	6.966.420
			13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera I dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera II	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	012-Layanan Perkantoran P3E Sumatera	1	Layanan	11.728.314
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	011-Layanan Sarana Internal P3E Sumatera	20	Unit	1.794.641
				FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	006-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	22	Daerah	2.991.871
		5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	14-Biro Keuangan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.427.275
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen	4.986.512
		5381-Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK	15-Biro Kepegawaian dan Organisasi	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.791.198
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.160.000
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	2.500	Orang	6.372.686
		5383-Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17-Biro Hukum	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	1	Layanan	4.109.760
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	969-Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	565.950
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.200.000
		5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18-Pusat Kebijakan Strategis	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH	6	Rekomendasi Kebijakan	2.114.704
				ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.645.352
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.356.515
		5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19-Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH	3	NSPK	2.614.470
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.277.602

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.WA-Program Dukungan Manajemen	02-Inspektorat Jenderal	5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	3.644.422
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.180.000
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	33.290.196
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	265	Unit	4.200.000
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	2.650.000
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10	Dokumen	800.000
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Dokumen	500.000
		5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	02-Inspektorat Wilayah I	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	001-Layanan Manajemen Resiko	67	Laporan	7.363.035
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	002-Layanan Pengendalian Internal	67	Laporan	5.725.470
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	364	Laporan	24.977.405
		5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	06-Inspektorat Investigasi	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	3.600.000
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	3.900.000
	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	01-Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	17	Layanan/Laporan/Dokumen	16.408.712
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	17	Layanan/Laporan/Dokumen	132.471.748
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	287	Unit/m2/Paket	631.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6742-Pemulihan Ekosistem	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme VI - Protection of Mangrove Forest	1	Lembaga	5.000.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	01-Sekretariat Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	37	Layanan/Laporan/Dokumen	47.029.390
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	37	Layanan/Laporan/Dokumen	271.681.459
	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	01-Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	75	Layanan	62.133.486
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	75	Layanan	1.014.613.159
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	75	Unit	6.389.000
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	75	Unit	9.583.000
	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5432-Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	33.344.400
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	204.283.591
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	2	Unit	2.170.000
	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6758-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK	01-Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	17	Layanan	12.404.323
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	17	Layanan	198.436.747
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	11	Unit	196.800

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.WA-Program Dukungan Manajemen	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	01-Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	12	Layanan	17.075.825
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	15	Layanan	151.188.391
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	8	Paket	1.085.000
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	4	Paket	760.000
	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan/Laporan/Dokumen	25.793.439
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	6	Layanan/Laporan/Dokumen	59.035.548
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6	Unit/m2/Paket	4.100.000
	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	16.846.009
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	6	Layanan	184.389.874
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	2.666.000
	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	3.666.165
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	12	Layanan	101.752.493
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6	Layanan	800.000
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	1	Kegiatan	2.500.000

Program	UKE I	Kegiatan	UKE II	KRO	RO	Target	Satuan	Alokasi
029.WA-Program Dukungan Manajemen	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	6754-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	01-Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	32.575.568
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan /Dokumen	41.757.575
	13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan	47.542.106
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	13.612.797
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6765-Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	02-Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi	106	Layanan/KHG	75.987.520
			03-Deputi Bidang Operasi, Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Gambut yang Direstorasi	300.000	Hektar	151.019.432
			04-Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa mandiri peduli gambut	75	Desa/Kelurahan	21.337.404
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6764-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	05-Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	3.064	Hektar	71.667.076
029.WA-Program Dukungan Manajemen	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6763-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	01-Sekeretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	27.793.068
	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	6763-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	01-Sekeretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	28.393.881
Total								**6.912.784.958**

Lampiran 2. Dukungan KLHK terhadap Rencana Kerja Pemerintah

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan						003 - Anggaran Responsif Gender		
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK						000 - Bukan Tematik		
	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	44-Pengelolaan Terpadu UMKM	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	05-Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	02-Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender		
6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		
	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		
	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	005 - Anggaran Pendidikan		
	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	003 - Anggaran Responsif Gender, 005 - Anggaran Pendidikan, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan						003 - Anggaran Responsif Gender		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	007 - Adaptasi perubahan iklim		
6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK						000 - Bukan Tematik		
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK						000 - Bukan Tematik		
6762-Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	ADA-Standarisasi Produk	051-Jumlah standar produk yang diterapkan melalui instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim						000 - Bukan Tematik		
	ADD-Standarisasi Lembaga	051-Standar usaha yang diterapkan melalui instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim						000 - Bukan Tematik		
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim		004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	051-Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01-Penanggulangan Bencana	02-Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	000 - Bukan Tematik		
5446-Adaptasi Perubahan Iklim	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001- Fasiltasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Pengembangan Kampung Iklim						003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5446-Adaptasi Perubahan Iklim	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim						007 - Adaptasi perubahan iklim		
5447-Mitigasi Perubahan Iklim	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Implementasi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Pre Invesment Bio Carbon Fund For Initiative Suitainable Forest Landscape		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	03-Pembangunan Rendah Karbon	02-Pemulihan Lahan Berkelanjutan	03-Pengurangan Laju Deforestasi	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-HCFC Phase Out In The Polyurethane Foam Sector Project		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Rancangan Pedoman Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia						004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	196-Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.	
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan						004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	196-Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.	
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi Penyediaan Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri pada Tingkat Sub Nasional di 34 Provinsi						004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		01-Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat, Pemadaman dari Udara, Pemantauan dari Udara dan/atau Evakuasi / Penyelamatan melalui udara		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		01-Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara
	QHC-Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	002-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman Udara		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	004 - Mitigasi perubahan Iklim		01-Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara
6753-Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	001-Bahan Rumusan Kebijakan Sumber Daya Pendanaan dan Perundingan Perubahan Iklim						003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim, 000 - Bukan Tematik		
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon yang ditingkatkan						003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim, 000 - Bukan Tematik		
6738-Rehabilitasi Perairan Darat	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Danau yang Dikendalikan Kerusakannya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Mata Air yang Dipulihkan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	007 - Adaptasi perubahan iklim		
6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6743-Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	003-Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	004-Koridor Satwa yang dikelola dalam mendukung Food Estate	43-Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Permohonan kajian tata Lingkungan di wilayah IKN	10 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04 - Pembangunan Wilayah Kalimantan	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	04 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	ADA-Standarisasi Produk	051-Standar produk yang diterapkan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup						000 - Bukan Tematik		
	ADD-Standarisasi Lembaga	052-Standar usaha yang diterapkan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup						000 - Bukan Tematik		
	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	054-Pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional						000 - Bukan Tematik		
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN)		06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04 - Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02 - Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	055-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6759-Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	RDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	057-Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
6760-Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	051-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK						000 - Bukan Tematik		
	PEA-Koordinasi	051-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen LHK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE-Penanganan Perkara	001-Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya						003 - Anggaran Responsif Gender		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001- Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	002- Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya						004 - Mitigasi perubahan Iklim		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
	QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21 Badan Usaha		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
	QCE-Penanganan Perkara	002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
5456-Pengelolaan Sampah	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Fasilitasi Pengembangan Manajemen Bank Sampah						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5456-Pengelolaan Sampah	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	003 - Anggaran Responsif Gender		
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Fasilitasi Penguatan Tata Laksana Produsen untuk Pengurangan Sampah		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	000 - Bukan Tematik		
6755-Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3						000 - Bukan Tematik		
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Registrasi, Notifikasi, dan Rekomendasi Pengangkutan B3						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pelayanan Fasilitasi dalam rangka pemusnahan Alkes bermerkuri						000 - Bukan Tematik		
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3						000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	003 - Anggaran Responsif Gender		
6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3						000 - Bukan Tematik		
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Persetujuan Teknis, Kelayakan Operasi PLB3 dan Rekomendasi						003 - Anggaran Responsif Gender		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Sirkular Ekonomi dari Pemanfaatan Limbah B3						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6756-Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3						003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	38-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	000 - Bukan Tematik		
	RBR-Dukungan Teknis	001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	38-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	000 - Bukan Tematik		
6757-Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Tanggap Darurat Limbah B3						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Sistem Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah						000 - Bukan Tematik		
	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan dan Supervisi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi						000 - Bukan Tematik		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	003 - Anggaran Responsif Gender		
6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	39-Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Data dan Informasi Sampah Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	003 - Anggaran Responsif Gender		
	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran udara		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		06-Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Instalasi Pengolahan Air Limbah		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender		
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan kinerja provinsi dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir dan laut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	000 - Bukan Tematik		
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	005-Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah		06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	000 - Bukan Tematik		
6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	003 - Anggaran Responsif Gender		
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lahan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	000 - Bukan Tematik		
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6765-Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Gambut yang Direstorasi		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	000 - Bukan Tematik		
	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa mandiri peduli gambut		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	000 - Bukan Tematik		
6764-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	000 - Bukan Tematik		
6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6729-Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BEF-Bantuan Luar Negeri	001-Dukungan Operasional Rencana Pengelolaan Hutan melalui Forest Investment Programme (FIP I)						000 - Bukan Tematik		
	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif						000 - Bukan Tematik		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 007 - Adaptasi perubahan Iklim		
6730-Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK usaha pemanfaatan hutan						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan						000 - Bukan Tematik		
	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan						000 - Bukan Tematik		
6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6731-Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	003 - Anggaran Responsif Gender, 007 - Adaptasi perubahan Iklim		
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani						000 - Bukan Tematik		
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan						000 - Bukan Tematik		
	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
6732-Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6733-Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan						000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	003 - Anggaran Responsif Gender		
	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	002-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi HuluHilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	003 - Anggaran Responsif Gender		
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Benih Berkualitas		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6734-Konservasi Tanah dan Air	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitasi Konservasi Tanah dan Air Provinsi Jambi melalui Forest Program II						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6735-Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS						007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	007 - Adaptasi perubahan iklim		
6736-Rehabilitasi Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6736-Rehabilitasi Hutan	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Palu dan Lariang Hulu Sulteng melalui Forest Program III						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Mamasa melalui Forest Program IV						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	36-Pemulihan 4 DAS Kritis	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6737-Rehabilitasi Mangrove	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove						000 - Bukan Tematik		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan Mangrove		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6764-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Desa Mandiri Peduli Mangrove		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan						000 - Bukan Tematik		
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001- Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP I)						000 - Bukan Tematik		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	003 - Anggaran Responsif Gender		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	02-Destinasi Pariwisata Prioritas	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6739-Perencanaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme III - Sulawesi						000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Rekomendasi kebijakan Pemolaan, Penataan, dan Rencana Pengelolaan KK		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaran KK		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kawasan konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	AEC-Kerja sama	001-Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi						000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	000 - Bukan Tematik		
6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Kebijakan kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan KK						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Kebijakan Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya						000 - Bukan Tematik		
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002- Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6740-Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003-HLN Biodiversity Leuser						000 - Bukan Tematik		
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	004-Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)						000 - Bukan Tematik		
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	005-Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project						000 - Bukan Tematik		
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	003 - Anggaran Responsif Gender		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	003 - Anggaran Responsif Gender		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002 - Unit Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan unit usahanya		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	000 - Bukan Tematik		
6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6741-Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
	REB-Konservasi Jenis/Spesies	001-Penyelamatan Satwa Liar		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	07-Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	000 - Bukan Tematik		
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pusat Konservasi Satwa yang dibangun		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	000 - Bukan Tematik		
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Koridor Satwa dan Pengembangan WRU di IKN	10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	000 - Bukan Tematik		
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pusat Konservasi Plasma Nutfah di IKN	10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	000 - Bukan Tematik		
6742-Pemulihan Ekosistem	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi dan ekosistem esensial						000 - Bukan Tematik		
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	004 - Mitigasi perubahan Iklim		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6742-Pemulihan Ekosistem	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan						000 - Bukan Tematik		
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan						000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	10-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan						000 - Bukan Tematik		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK						000 - Bukan Tematik		
	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut						000 - Bukan Tematik		
	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi						000 - Bukan Tematik		
	BMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL						003 - Anggaran Responsif Gender		
	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL						003 - Anggaran Responsif Gender		
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan						000 - Bukan Tematik		
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala						000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	000 - Bukan Tematik		
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL						000 - Bukan Tematik		
6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	ADA-Standarisasi Produk	051-Standar Produk yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						000 - Bukan Tematik		
	ADD-Standarisasi Lembaga	051-Standar Usaha yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						000 - Bukan Tematik		
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	051-Pelaksanaan FP VI : Protection of Mangrove Forest						000 - Bukan Tematik		
	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	051-Pengelolaan KHDTK						000 - Bukan Tematik		
	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	052-Pengelolaan Laboratorium Kehutanan						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6761-Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN)		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	000 - Bukan Tematik		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	051-Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK		01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	000 - Bukan Tematik		
	QMA-Data dan Informasi Publik	051-Pemanfaatan Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) oleh stakeholder		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	000 - Bukan Tematik		
5444-Peningkatan Penyuluhan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	003 - Anggaran Responsif Gender		
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan						000 - Bukan Tematik		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	000 - Bukan Tematik		
6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial						007 - Adaptasi perubahan iklim		
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP -II						003 - Anggaran Responsif Gender		
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project SSF						003 - Anggaran Responsif Gender		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6749-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003-Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6750-Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat						007 - Adaptasi perubahan iklim		
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-V						007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penangananya		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	007 - Adaptasi perubahan iklim		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender		
6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						003 - Anggaran Responsif Gender		
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Project FIP-I						003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
6751-Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-III						003 - Anggaran Responsif Gender		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
6752-Kemitraan Lingkungan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Kemitraan Lingkungan						003 - Anggaran Responsif Gender		
	PEE-Kemitraan	001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	003 - Anggaran Responsif Gender		
5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya						004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		04-Menolak Negara Lemah dengan Melalukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal		06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		
	QHB-Operasi Bidang Keamanan	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal								
5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center						000 - Bukan Tematik		
5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran						000 - Bukan Tematik		
5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	959-Layanan Protokoler						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
5372-Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	AEA-Koordinasi	001-Layanan Kerjasama Internasional						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	003-Layanan Umum P3E Jawa						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	004-Layanan perkantoran P3E Jawa						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	006-Layanan Sarana Internal P3E Jawa						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	001-Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	005-Layanan umum P3E Kalimantan						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	006-Layanan perkantoran P3E Kalimantan						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	013-Layanan Sarana Internal P3E Kalimantan						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	003-Layanan Sarana Internal P3E Sulawesi Maluku						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	004-Layanan Prasarana Internal P3E Sulawesi - Maluku						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	005-Layanan Sarana Internal P3E Papua						000 - Bukan Tematik		
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	012-Layanan Perkantoran P3E Sumatera						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	011-Layanan Sarana Internal P3E Sumatera						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	012-Layanan Prasarana Internal P3E Sumatera						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	006-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera						000 - Bukan Tematik		
5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan						000 - Bukan Tematik		
5381-Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM						000 - Bukan Tematik		
5383-Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	969-Layanan Bantuan Hukum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM						000 - Bukan Tematik		
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran						000 - Bukan Tematik		
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi						000 - Bukan Tematik		
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	001-Layanan Manajemen Resiko						000 - Bukan Tematik		
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	002-Layanan Pengendalian Internal						000 - Bukan Tematik		
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal						003 - Anggaran Responsif Gender		
5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat						000 - Bukan Tematik		
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik		
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
6742-Pemulihan Ekosistem	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme VI - Protection of Mangrove Forest						000 - Bukan Tematik		
5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik		
5432-Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik		
6758-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik		
5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		

KEGIATAN	KRO	RO	MP	PN	PP	KP	PRO-PN	Tematik	Janpres	Nawacita
5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender, 000 - Bukan Tematik	077-Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.	
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						003 - Anggaran Responsif Gender, 000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal						000 - Bukan Tematik		
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal						000 - Bukan Tematik	077-Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.	
6754-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						003 - Anggaran Responsif Gender		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum						000 - Bukan Tematik		
6763-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran						000 - Bukan Tematik		

Keterangan :
KLHK dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing salah satunya melalui penyiapan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang berkompeten dan bersertifikat.

Ilustrasi oleh : M Desby Aditia dan Saraswati W

Lampiran 3. Cascading Renstra KLHK (Rev) ke Renja KLHK

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,48 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.1 Meningkatnya kualitas udara **(PPKL)**	T1.S1.1.1.1 Nilai indeks kualitas udara **(84,4 Poin)**	T1.S1.1.1.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas udara	T1.S1.1.1.1.1.1 Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) **(12 Lokasi)**	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	12	Unit	16.900.000
				02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	38	Unit	7.715.000
			T1.S1.1.1.1.1.2 Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara **(500 Kab/Kota)**	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	500	layanan	6.500.000
		T1.S1.1.1.1.2 Menurunnya beban emisi pencemaran udara	T1.S1.1.1.1.2.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi **(3.375 Perusahaan)**	02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	3.375	Industri	2.000.000
				02-Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran udara	514	Daerah	2.100.000
T1.S1.1.2 Meningkatnya kualitas air **(PPKL)**	T1.S1.1.2.1 Nilai indeks kualitas air **(55,4 Poin)**	T1.S1.1.2.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas air	T1.S1.1.2.1.1.1 Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) **(121 Lokasi)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	121	Unit	132.420.726
				03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	73	Unit	11.000.000
			T1.S1.1.2.1.1.2 Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual **(652 Lokasi)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual	652	layanan	8.600.000
		T1.S1.1.2.1.2 Menurunnya beban pencemaran air	T1.S1.1.2.1.2.1 Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum **(8 Unit)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	8	Unit	4.000.000
			T1.S1.1.2.1.2.2 Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air **(91 Unit)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Instalasi Pengolahan Air Limbah	91	Unit	66.050.000
				03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.785.000
			T1.S1.1.2.1.2.3 Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari **(0,046 Persen)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	3.375	Industri	9.100.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,48 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.2 Meningkatnya kualitas air **(PPKL)**	T1.S1.1.2.1 Nilai indeks kualitas air **(55,4 Poin)**	T1.S1.1.2.1.2 Menurunnya beban pencemaran air	T1.S1.1.2.1.2.4 Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA **(40 Kab/kota)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	008-Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA	40	layanan	250.000
T1.S1.1.3 Meningkatnya kualitas air laut **(PPKL)**	T1.S1.1.3.1 Nilai indeks kualitas air laut **(60 Poin)**	T1.S1.1.3.1.1 Tersedianya data pemantauan kualitas air laut	T1.S1.1.3.1.1.1 Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya **(34 Provinsi)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut	34	layanan	5.000.000
			T1.S1.1.3.1.1.2 Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up **(23 Kab/kota)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Data dan Informasi Sampah Laut	23	layanan	2.000.000
		T1.S1.1.3.1.2 Menurunnya pencemaran air laut	T1.S1.1.3.1.2.1 Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut **(35 Pelabuhan)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	30	Badan usaha	800.000
			T1.S1.1.3.1.2.2 Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan pengendalian pencemaran kerusakan pesisir dan laut **(12 Lokasi)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	12	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.600.000
				04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/Kab/Kota	500.000
		T1.S1.1.3.1.3 Meningkatnya areal ekosistem pesisir dan laut yang dipulihkan	T1.S1.1.3.1.3.1 Jumlah kawasan pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya **(5 Lokasi)**	04-Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	5	Unit	1.400.000
T1.S1.1.4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut **(PPKL)**	T1.S1.1.4.1 Nilai indeks kualitas lahan **(64,5 Poin)**	T1.S1.1.4.1.1 Tersedianya data pemantauan ekosistem gambut	T1.S1.1.4.1.1.1 Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (-)							
			T1.S1.1.4.1.1.2 Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1 : 50.000 **(4 KHG)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	4	layanan	2.500.000
		T1.S1.1.4.1.2 Menurunnya tingkat kerusakan lahan dan gambut	T1.S1.1.4.1.2.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya **(100 Perusahaan)**	05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	100	Industri	800.000
			T1.S1.1.4.1.2.2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut **(400 Perusahaan)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	400	Industri	1.000.000
		T1.S1.1.4.1.3 Meningkatnya lahan yang dipulihkan	T1.S1.1.4.1.3.1 Luas lahan yang difasilitasi pemulihannya **(148 Hektar)**	05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	148	Hektar	19.800.000
				05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	514	layanan	1.900.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,48 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.4 Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut **(PPKL)**	T1.S1.1.4.1 Nilai indeks kualitas lahan **(64,5 Poin)**	T1.S1.1.4.1.4 Meningkatnya areal kawasan hidrologi gambut yang dipulihkan	T1.S1.1.4.1.4.1 Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi **(60 Desa)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi	60	Desa	11.500.000
			T1.S1.1.4.1.4.2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) **(43 Kab/Kota)**	05-Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan lahan	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000
				06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut	132	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000
			T1.S1.1.4.1.4.3 Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat **(2.250 Hektar)**	06-Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	2.250	Hektar	3.000.000
T1.S1.1.5 Meningkatnya pengelolaan B3 **(PSLB3)**	T1.S1.1.5.1 Jumlah B3 yang dikelola **(6.000.000 Ton)**	T1.S1.1.5.1.1 Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar	T1.S1.1.5.1.1.1 Jumlah B3 yang dikelola **(6.000.000 Ton)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Registrasi, Notifikasi, dan Rekomendasi Pengangkutan B3	170	Badan usaha/Penyalur	832.640
			T1.S1.1.5.1.1.2 Terbentuknya dan terlaksananya sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs **(30 %)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	1	Sistem Informasi/Modul Aplikasi/Layanan	300.000
			T1.S1.1.5.1.1.3 Terlaksananya target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs **(2 Jenis B3)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	600.000
		T1.S1.1.5.1.2 Meningkatnya upaya penghapusan penggunaan merkuri pada PESK	T1.S1.1.5.1.2.1 Terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin **(2 Unit)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK	2	Unit	3.950.000
			T1.S1.1.5.1.2.2 Terlaksananya penghapusan merkuri 80% dari baseline tahun 2019 **(20 %)**	02-Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pelayanan Fasilitasi dalam rangka pemusnahan Alkes bermerkuri	4	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	2.850.000
T1.S1.1.6 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 **(PSLB3)**	T1.S1.1.6.1 Jumlah limbah B3 yang dikelola **(33.629.101 Ton)**	T1.S1.1.6.1.1 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola	T1.S1.1.6.1.1.1 Pelayanan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 **(100 %)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Persetujuan Teknis, Kelayakan Operasi PLB3 dan Rekomendasi	400	Badan usaha/Penyalur	2.850.000
				07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	400.000
			T1.S1.1.6.1.1.2 Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu **(1 unit)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	RBR-Dukungan Teknis	001-Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu	1	Dokumen	2.859.861
			T1.S1.1.6.1.1.3 Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3 **(33.423.752 Ton)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	1.500	Industri/IKM/Miliar USD	2.850.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,48 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.6 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 **(PSLB3)**	T1.S1.1.6.1 Jumlah limbah B3 yang dikelola **(33.629.101 Ton)**	T1.S1.1.6.1.2 Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu	T1.S1.1.6.1.2.1 Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) **(3 Unit)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	3	Unit	34.400.000
		T1.S1.1.6.1.3 Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang terpulihkan	T1.S1.1.6.1.3.1 Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non institusi **(5.348 Ton)**	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	2	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	9.250.000
			T1.S1.1.6.1.3.2 Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang dipulihkan **(200.000 Ton)**	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan dan Supervisi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi	10	Industri/IKM/Miliar USD	2.240.846
		T1.S1.1.6.1.4 Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3	T1.S1.1.6.1.4.1 Peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3 **(100 %)**	05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Sistem Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah	12	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	2.009.154
				05-Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Tanggap Darurat Limbah B3	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	200.000
T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan **(PKTL)**	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan **(83 Dokumen)**	T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program. **(30 Dokumen KLHS)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813
			T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan **(1 Dokumen)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000
		T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program **(9 Dokumen)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	700.000
				05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.000
		T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH **(22 Dokumen)**	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,48 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan **(PKTL)**	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan **(83 Dokumen)**	T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air **(65 Juta Hektar)**	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	1.051.523
			T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH **(20 Dokumen)**	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20	Layanan	9.136.000
	T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan **(195 Laporan)**	T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup **(1 Sistem)**	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	4.694.085
		T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH **(22 layanan)**	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000
		T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan **(170 Layanan)**	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350
		T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi **(2 layanan)**	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	385.000
T1.S1.1.8 Meningkatnya Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(BSI LHK)**	T1.S1.1.8.1 Jumlah Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(75 Lembaga)**	T1.S1.1.8.1.1 Tersedianya standar instrumen lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.1.1 Jumlah standar instrumen kualitas lingkungan hidup **(26 NSPK)**	07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	2	NSPK	1.000.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002-Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN)	24	NSPK	8.560.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	054-Pengelolaan laboratorium lingkungan rujukan nasional	1	unit	125.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	055-Fasilitasi dan Pembinaan Akreditasi Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	2	Lembaga	200.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	RDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	057-Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan untuk menyiapkan standar LH yang berkualitas	1	unit	706.469

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,48 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.8 Meningkatnya Kesesuaian Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(BSI LHK)**	T1.S1.1.8.1 Jumlah Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup **(75 Lembaga)**	T1.S1.1.8.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema, sistem prosedur dan standar) lingkungan hidup	T1.S1.1.8.1.2.1 Jumlah standar produk bidang kualitas lingkungan hidup yang ditingkatkan kualitasnya **(15 Produk)**	07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	ADA-Standarisasi Produk	051-Standar produk yang diterapkan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	15	produk	900.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	ADD-Standarisasi Lembaga	052-Standar usaha yang diterapkan melalui Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	15	Lembaga	900.000
T1.S1.1.9 Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan undangan Bidang LHK **(PHLHK)**	T1.S1.1.9.1 Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan **(51 %)**	T1.S1.1.9.1.1 Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	T1.S1.1.9.1.1.1 Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK **(750 Badan Usaha)**	04-Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001- Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	750	Badan Usaha	29.225.816
			T1.S1.1.9.1.1.2 Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya **(220 Orang)**	04-Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	220	Orang	1.700.000
			T1.S1.1.9.1.1.3 Jumlah Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan **(50 Badan Usaha)**	04-Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	002- Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50	Badan Usaha	2.100.000
T1.S1.1.10 Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan **(PHLHK)**	T1.S1.1.10.1 Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani **(250 kasus)**	T1.S1.1.10.1.1 Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	T1.S1.1.10.1.1.1 Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap **(160 kasus)**	05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	160	Perkara	52.071.735
			T1.S1.1.10.1.1.2 Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya **(180 Orang)**	05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	180	Orang	2.987.880
			T1.S1.1.10.1.1.3 Jumlah Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan **(60 Perkara)**	05-Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QCE-Penanganan Perkara	002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60	Perkara	6.150.000
		T1.S1.1.10.1.2 Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	T1.S1.1.10.1.2.1 Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan **(30 kasus)**	03-Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE-Penanganan Perkara	001- Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	30	Perkara	10.009.150

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator (IKU/IKP)

T1.S1.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
(69,48 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S1.1.11 Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial **(KSDAE)**	T1.S1.1.11.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi **(10.000.000 Hektar)**	T1.S1.1.11.1.1 Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	T1.S1.1.11.1.1.1 Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi **(10 Juta Hektar)**	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	900.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	10.000.000	Hektar	8.719.951
		T1.S1.1.11.1.2 Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	T1.S1.1.11.1.2.1 Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya **(11 unit KEE)**	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	003-Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.700.000
T1.S1.1.12 Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional **(PDASRH)**	T1.S1.1.12.1 Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya **(15 Danau)**	T1.S1.1.12.1.1 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	T1.S1.1.12.1.1.1 Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya **(50 Mata Air)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Mata Air yang Dipulihkan	50	Unit	1.250.000
			T1.S1.1.12.1.1.2 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya **(15 Danau)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	15	Unit	2.488.538
			T1.S1.1.12.1.1.3 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat **(400 Unit)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	400	Unit	4.918.304
				13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Perairan Darat	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Perairan Darat	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.200.000
T1.S1.1.13 Meningkatnya kualitas ekosistem gambut di 7 Provinsi **(BRGM)**	T1.S1.1.13.1 Luas ekosistem gambut di 7 provinsi yang direstorasi **(300.000 Hektar)**	T1.S1.1.13.1.1 Terfasilitasinya percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di 7 Provinsi	T1.S1.1.13.1.1.1 Lahan gambut yang direstorasi **(300.000 Hektar)**	02-Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi	Pemantauan, Pengendalian, Dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Lahan Gambut yang Direstorasi	300.000	Hektar	151.019.432
				02-Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi	Pemantauan, Pengendalian, Dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi	106	layanan/KHG	75.987.520
		T1.S1.1.13.1.2 Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi	T1.S1.1.13.1.2.1 Desa Mandiri Peduli Gambut **(75 Desa)**	04-Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan	Pemantauan, Pengendalian, Dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Desa mandiri peduli gambut	75	Desa/Desa/Kelurahan	21.337.404

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S2
Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah

Indikator (IKU/IKP)

T1.S2.1
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
(67 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S2.1.1 Meningkatnya Pengelolaan Sampah **(PSLB3)**	T1.S2.1.1.1 Jumlah Sampah yang dikelola **(15.633.622 Ton)**	T1.S2.1.1.1.1 Meningkatnya jumlah pengurangan sampah (30% dari proyeksi timbulan sampah)	T1.S2.1.1.1.1.1 Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen **(450 Ton)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Fasilitasi Penguatan Tata Laksana Produsen untuk Pengurangan Sampah	25	Badan usaha/Miliar USD	1.150.000
			T1.S2.1.1.1.1.2 Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019 **(80 Unit)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	80	UMKM	2.300.000
			T1.S2.1.1.1.1.3 Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas **(80 Kab/Kota)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/Kota	5.850.000
		T1.S2.1.1.1.2 Meningkatnya jumlah penanganan sampah (70% dari proyeksi timbulan sampah)	T1.S2.1.1.1.2.1 Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas **(80 Kab/Kota)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	80	Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/Kota	4.879.233
			T1.S2.1.1.1.2.2 Jumlah kab/kota yang memiliki nilai adipura masuk kategori baik (nilai adipura > 71) **(320 Kab/Kota)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	320	Daerah (Prov/Kab/Kota)/Provinsi/Kab/Kota	14.320.000
			T1.S2.1.1.1.2.3 Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi **(12.240 Ton)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	4	Unit	26.316.500
				08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	1	Unit	1.250.000
			T1.S2.1.1.1.2.4 Jumlah sampah spesifik tertangani **(720 Ton)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik	1	Unit	4.093.396
		T1.S2.1.1.1.3 Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018	T1.S2.1.1.1.3.1 Jumlah Kab/kota, Kawasan Konservasi dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu **(30 Lokasi)**	08-Direktorat Penanganan Sampah	Pengelolaan Sampah	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	1	Unit	2.150.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S3
Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S3.1
Persentase penurunan emisis GRK dari sektor limbah dan kehutanan
(17,33 Persen)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S3.1.1 Meningkatnya tata kelola Penurunan Emisi GRK **(PPI)**	T1.S3.1.1.1 Tersedianya dukungan kebijakan dan data penurunan emisi GRK nasional dan non party stakeholder di bidang pengendalian perubahan iklim **(3 Dokumen)**	T1.S3.1.1.1.1 Terlaksananya mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC	T1.S3.1.1.1.1.1 Terlaksananya implementasi NDC dengan dukungan perangkat dan kebijakan mitigasi perubahan iklim **(2 Dokumen)**	03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	6	layanan	3.000.000
				03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga melalui Pre Invesment Bio Carbon Fund for Initiative Sustainable Forest Landscape	5	Lembaga	8.942.800
				03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	Lembaga	1.000.000
	T1.S3.1.1.2 Jumlah wilayah yang berketahanan iklim **(6.500 Desa)**	T1.S3.1.1.2.1 Meningkatnya ketahanan iklim wilayah	T1.S3.1.1.2.1.1 Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah **(1 Dokumen)**	02-Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	Adaptasi Perubahan Iklim	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim	1	layanan	2.700.000
			T1.S3.1.1.2.1.2 Jumlah desa berketahanan iklim **(6.500 Desa)**	02-Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	Adaptasi Perubahan Iklim	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001- Fasiltasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat untuk Pengembangan Kampung Iklim	6.500	Kelompok Masyarakat	3.813.112
	T1.S3.1.1.3 Jumlah dukungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk skema insentif dan pembiayaan, peningkatan kapasitas sains dan teknologi rendah karbon, serta dokumen kerjasama tingkat regional dan internasional sebagai pelaksanaan peran NFP **(3 Dokumen)**	T1.S3.1.1.3.1 Terwujudnya kebijakan sumber daya pendanaan dan perundingan perubahan iklim	T1.S3.1.1.3.1.1 Tersediannya rekomendasi skema insentif dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan upaya pengendalian perubahan iklim **(1 Dokumen)**	05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Mobilisasi Sumber Daya Sektoral Dan Regional	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	001-Bahan atau Rumusan Kebijakan Sumber Daya Pendanaan dan Perundingan Perubahan Iklim	2	Rekomendasi Kebijakan	6.350.000
			T1.S3.1.1.3.1.2 Jumlah kerangka kebijakan dari forum perundingan perubahan iklim internasional **(1 Dokumen)**	05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Mobilisasi Sumber Daya Sektoral Dan Regional	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim				
		T1.S3.1.1.3.2 Terselenggaranya peningkatan kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon	T1.S3.1.1.3.2.1 Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon **(450 Orang)**	05-Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional	Mobilisasi Sumber Daya Sektoral Dan Regional	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas sains dan informasi teknologi rendah karbon yang ditingkatkan	450	Orang	2.400.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S3
Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S3.1
Persentase penurunan emisis GRK dari sektor limbah dan kehutanan
(17,33 Persen)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S3.1.1 Meningkatnya tata kelola Penurunan Emisi GRK **(PPI)**	T1.S3.1.1.4 Tersedianya laporan nasional inventarisasi GRK dan Verikasi aksi mitigasi perubahan iklim untuk 5 sektor **(1 Dokumen)**	T1.S3.1.1.4.1 Terlaksananya inventarisasi GRK dan verifikasi dan registri aksi mitigasi tingkat nasional dan sub nasional	T1.S3.1.1.4.1.1 Tersedianya data dan informasi profil emisi GRK serta verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional yang termutakhirkan **(1 Dokumen)**	04-Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring , Pelaporan dan Verifikasi	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Serta Monitoring, Pelaporan Dan Verifikasi	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Rancangan Pedoman Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia	1	NSPK	406.600
				04-Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring , Pelaporan dan Verifikasi	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Serta Monitoring, Pelaporan Dan Verifikasi	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	1	layanan	3.343.400
				04-Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring , Pelaporan dan Verifikasi	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Serta Monitoring, Pelaporan Dan Verifikasi	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi Penyediaan Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri pada Tingkat Sub Nasional di 34 Provinsi	5	Daerah (Kab/Kota)	1.750.000
	T1.S3.1.1.5 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon **(95,84 ODP Ton)**	T1.S3.1.1.5.1 Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon	T1.S3.1.1.5.1.1 Penurunan konsumsi bahan perusak ozon dari baseline tahun 2019 sebesar 252,45 ODP ton **(95,84 ODP Ton)**	03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Implementasi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon	3	Lembaga	900.000
				03-Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim	Mitigasi Perubahan Iklim	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-HCFC Phase Out In The Polyurethane Foam Sector Project	3	Badan usaha	6.000.000
T1.S3.1.2 Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan setiap tahun (PPI)	T1.S3.1.2.1 Penurunan luas areal kebakaran lahan dan hutan dan lahan **(2 %)**	T1.S3.1.2.1.1 Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	T1.S3.1.2.1.1.1 Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline tahun 2019 **(2%)**	06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan	970	Kelompok Masyarakat	112.000.000
				06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	QBD- Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	1.200	operasi	13.000.000
				06-Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	QBD- Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	002- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Udara	100	operasi	15.758.790

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S3
Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S3.1
Persentase penurunan emisis GRK dari sektor limbah dan kehutanan
(17,33 Persen)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S3.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim **(BSI LHK)**	T1.S3.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen dibidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang disusun **(10 NSPK)**	T1.S3.1.3.1.1 Menyiapkan standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.1.1 Jumlah standar instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim **(7 NSPK)**	10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7	NSPK	3.500.000
				10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	051-Pertimbangan teknis standar instrumen ketahanan bencana hidrometeorologis dan perubahan iklim LHK	1	layanan	203.915
		T1.S3.1.3.1.2 Meningkatkan kualitas standar instrumen (skema,sistem prosedur dan standar) ketahanan bencana dan perubahan iklim	T1.S3.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim yang ditingkatkan kualitasnya **(20 Produk)**	10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ADA-Standarisasi Produk	051-Standar produk yang diterapkan melalui instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	20	produk	1.200.000
				10-Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Standardisasi Intrumen Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	ADD-Standarisasi Lembaga	051-Standar usaha yang diterapkan melalui instrumen ketahanan bencana dan perubahan iklim	20	Lembaga	1.200.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.1 Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan **(PHL)**	T1.S4.1.1.1 Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan **(428.000 Hektar)**	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan **(428.000 Ha)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	50	Badan Usaha	1.561.102
		T1.S4.1.1.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung **(6,5 Juta Hektar)**	08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	Dokumen	688.739
				08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	3	NSPK	904.674
			T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan **(50 KPH)**	08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	50	Lembaga	1.324.509
				08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Dukungan Operasioanal Rencana Pengelolaan Hutan melalui Forest Investment Programme (FIP I)	2	Lembaga	423.500
				08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	16	Lembaga	4.193.306
			T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari **(50 KPH)**	08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	16	Lembaga	9.833.134
				08-Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan	15	Lembaga	2.079.749

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi **(KSDAE)**	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif **(12 Juta Hektar)**	T1.S4.1.2.1.1 Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	T1.S4.1.2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi (kumulatif) **(21.100.000 Hektar)**	09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	7.553.657	Hektar	22.298.000
			T1.S4.1.2.1.1.2 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemolaan, penataan dan perencanaan **(30 Unit KK)**	09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Rekomendasi kebijakan Pemolaan, Penataan, dan Rencana Pengelolaan KK	1	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
			T1.S4.1.2.1.1.3 Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi **(50 Dokumen)**	09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme III - Sulawesi	2	Lembaga	17.031.837
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaran Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	2.800.000
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	AEC-Kerja sama	001-Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi	74	Dokumen	5.650.000
		T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.1 Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi **(180.000 Hektar)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	600.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	180.000	Hektar	5.100.000
			T1.S4.1.2.1.2.2 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran **(560 Unit)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002- Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1	Lembaga/Unit Kerja/Tim	8.527.968
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	004-Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)	2	Lembaga	5.372.625
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	005-Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	5	Lembaga	8.514.250
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Konservasi	560	Rekomendasi Kebijakan	129.430.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi **(KSDAE)**	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif **(12 Juta Hektar)**	T1.S4.1.2.1.2 Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.2.3 Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya **(277 Unit KK)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	18.200.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	277	Rekomendasi Kebijakan	6.547.835
				09-Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Perencanaan Kawasan Konservasi	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kawasan konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	30	Rekomendasi Kebijakan	14.300.000
		T1.S4.1.2.1.3 Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	T1.S4.1.2.1.3.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif **(12,10 Juta Hektar)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	14.100.000	Hektar	42.129.000
				04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	68.000	Hektar	1.358.000
				04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Pusat Konservasi Plasma Nutfah di IKN	1	unit	1.800.000
			T1.S4.1.2.1.3.2 Jumlah pusat perlindungan dan penyelamatan satwa liar yang dibangun **(-)**							
			T1.S4.1.2.1.3.3 Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati **(1 Mekanisme)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	1	layanan	810.000
		T1.S4.1.2.1.4 Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari	T1.S4.1.2.1.4.1 Jumlah entitas perlindungan dan Pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL **(300 entitas)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	300	Lembaga	3.600.000
			T1.S4.1.2.1.4.2 Jumlah penyelamatan satwa liar **(500 kejadian)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	13	Rekomendasi Kebijakan	10.290.000
				04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	REB-Konservasi Jenis/Spesies	001-Penyelamatan Satwa Liar	500	Lokasi	31.392.000
				04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Koridor Satwa dan Pengembangan WRU di IKN	2	Unit	10.000.000
		T1.S4.1.2.1.5 Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	T1.S4.1.2.1.5.1 Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati **(1 Mekanisme)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.2 Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi **(KSDAE)**	T1.S4.1.2.1 Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif **(12 Juta Hektar)**	T1.S4.1.2.1.6 Meningkatnya pemulihan ekosistem	T1.S4.1.2.1.6.1 Luas ekosistem yang dipulihkan **(45.000 Hektar)**	06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi dan ekosistem esensial	1	Rekomendasi Kebijakan	3.900.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	500	Hektar	4.559.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	002-Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	45.000	Hektar	39.700.000
				06-Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Pemulihan Ekosistem	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Forest Programme VI - Protection of Mangrove Forest	1	Lembaga	5.000.000
T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai **(PDASRH)**	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi **(14.025 Hektar)**	T1.S4.1.3.1.1 Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	T1.S4.1.3.1.1.1 Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan **(15.000 Hektar)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Rehabilitasi DAS	15.000	Hektar	1.500.000
				02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Fasilitasi Konservasi Tanah dan Air Provinsi Jambi melalui Forest Program II	2	Unit	20.019.629
		T1.S4.1.3.1.2 Menurunnya sedimentasi dalam DAS	T1.S4.1.3.1.2.1 Jumlah bangunan konservasi tanah dan air **(750 Unit)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	750	Unit	14.249.970
				02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Konservasi Tanah Dan Air	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Konservasi Tanah dan Air	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.500.000
		T1.S4.1.3.1.3 Tersedianya informasi baseline DAS	T1.S4.1.3.1.3.1 Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time **(108 DAS)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Perencanaan Dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	34	Sistem Informasi	13.600.000
			T1.S4.1.3.1.3.2 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya **(34 Lembaga/Forum)**	02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Perencanaan Dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.700.000
				02-Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Perencanaan Dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.000.000
		T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.1 Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif **(12.000 Hektar)**	12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	12.000	Hektar	615.350.608
				12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi hutan	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	2.000.000
				12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Palu dan Lariang Hulu Sulteng melalui Forest Program III	1	Unit	900.000
				12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Mamasa melalui Forest Program IV	3	Unit	54.164.441

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai **(PDASRH)**	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi **(14.025 Hektar)**	T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.2 Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan Das Sekitarnya **(500 Hektar)**	12-Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	500	Hektar	23.950.000
		T1.S4.1.3.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	T1.S4.1.3.1.5.1 Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi **(700 Hektar)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Mangrove	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Hutan Mangrove	700	Hektar	33.691.336
				13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Mangrove	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Rehabilitasi Mangrove	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.000.000
			T1.S4.1.3.1.5.2 Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya **(34 Lembaga/Forum)**	13-Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Rehabilitasi Mangrove	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkat Kapasitasnya	34	Lembaga/Unit Kerja/Tim	1.700.000
		T1.S4.1.3.1.6 Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	T1.S4.1.3.1.6.1 Luas sumber benih unggul yang dibangun **(10 Hektar)**	05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun	10	Hektar	3.520.000
			T1.S4.1.3.1.6.2 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif **(41.800.000 Batang)**	05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	41.800.000	Unit	221.000.000
			T1.S4.1.3.1.6.3 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat **(37.500.000 Butir)**	05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Benih Berkualitas	37.500.000	Unit	2.787.972
				05-Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	36	Lembaga	2.000.000
T1.S4.1.4 Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman **(PHLHK)**	T1.S4.1.4.1 Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman **(300.000 Hektar)**	T1.S4.1.4.1.1 Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	T1.S4.1.4.1.1.1 Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup **(51 Operasi)**	02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51	operasi	25.944.639
			T1.S4.1.4.1.1.2 Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya **(210 Orang)**	02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001- Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	210	Orang	3.200.000
			T1.S4.1.4.1.1.3 Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar **(25 Operasi)**	02-Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	25	operasi	16.890.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.5 Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan **(PKTL)**	T1.S4.1.5.1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **(583 Layanan)**	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP **(530 Peta)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	layanan	310.000
		T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan **(30 Layanan)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	layanan	200.000
			T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP **(2 Layanan)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3	layanan	270.000
			T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030 **(8 Dokumen)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3	Rekomendasi Kebijakan	544.000
			T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) **(4 Dokumen)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000
		T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial **(9 Rekomendasi)**	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1	layanan	500.000
		T1.S4.1.5.1.4 Terfasilitasinya rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	T1.S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH (-)		.	.	.	-	-	-

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T1.S4.1
Laju deforestasi dan degradasi hutan
(0,2 Juta Hektar/Tahun)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan **(PKTL)**	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan **(33 Layanan)**	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan **(3 Dokumen)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	layanan	950.000
			T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan **(2 Laporan)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	layanan	250.000
			T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH **(44 Klaster)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	44	layanan	2.961.008
			T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut **(2 SK & Peta)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	layanan	375.000
			T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia **(1 Dokumen)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi	1	layanan	125.000
			T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH **(22 Layanan)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22	layanan	2.311.425
		T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK **(1 Laporan)**	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	layanan	1.500.000
T1.S4.1.7 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas **(BRGM)**	T1.S4.1.7.1 Luas ekosistem mangrove di 9 provinsi prioritas yang direhabilitasi **(3.064 Hektar)**	T1.S4.1.7.1.1 Terwujudnya percepatan rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat pada areal kerja BRGM	T1.S4.1.7.1.1.1 Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi **(3.064 Hektar)**	05-Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	3.064	Hektar	71.667.076
T1.S4.1.8 Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan **(PSKL)**	T1.S4.1.8.1 Optimalisasi akses kelola perhutanan sosial **(140 Hektar)**	T1.S4.1.8.1.1 Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan perhutanan sosial	T1.S4.1.8.1.1.1 Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan **(304 Kelompok Masyarakat)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	304	Kelompok Masyarakat	3.040.000
		T1.S4.1.8.1.2 Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	T1.S4.1.8.1.2.1 Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial **(1.510 orang)**	04-Direktorat Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Lingkungan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	1.510	Orang	35.096.550

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S1
Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah

Indikator (IKU/IKP)

T2.S1.1
Kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)
(14,1 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S1.1.1 Meningkatnya nilai ekonomi pemanfaatan limbah B3 **(PSLB3)**	T2.S1.1.1.1 Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 **(20,84 Triliun Rupiah)**	T2.S1.1.1.1.1 Meningkatnya nilai ekonomi dari pemanfaatan limbah B3	T2.S1.1.1.1.1.1 Peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% dari baseline 2020 **(20,84 Triliun Rupiah)**	07-Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Non Bahan Berbahaya Dan Beracun	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Sirkular Ekonomi dari Pemanfaatan Limbah B3	1	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	600.000
T2.S1.1.2 Meningkatnya nilai omset pengelolaan sampah di Bank Sampah **(PSLB3)**	T2.S1.1.2.1 Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah **(4.921.472.000 Rupiah)**	T2.S1.1.2.1.1 Meningkatnya nilai omset pengelolaan sampah di bank sampah	T2.S1.1.2.1.1.1 Peningkatan jumlah omset bank sampah **(4.921.471.943 Rupiah)**	09-Direktorat Pengurangan Sampah	Pengelolaan Sampah	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Fasilitasi Pengembangan Manajemen Bank Sampah	1	layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp	950.000
T2.S1.1.3 Meningkatnya unit usaha yang melakukan pemanfaatan air limbah **(PPKL)**	T2.S1.1.3.1 Unit usaha pemanfaatan air limbah **(16 Perusahaan)**	T2.S1.1.3.1.1 Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	T2.S1.1.3.1.1.1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah **(3.375 Perusahaan)**	03-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	005-Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	16	Industri	100.000
T2.S1.1.4 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup **(BSI LHK)**	T2.S1.1.4.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang lingkungan hidup **(16 NSPK)**	T2.S1.1.4.1.1 Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	T2.S1.1.4.1.1.1 Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen LHK **(100 Lembaga)**	07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	051-Lembaga yang teregister dalam penerapan standar instrumen LHK	100	Lembaga	1.000.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	PEA-Koordinasi	051-Layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK	1	Kegiatan	200.000
				07-Pusat Standardisasi Intrumen Kualitas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen LHK	10	NSPK	800.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S2
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S2.1
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)
(118,6 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat **(PHL)**	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat **(57 Juta M3)**	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas **(370 Unit)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	32	Badan Usaha	3.687.874
				10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK pengendalian usaha pemanfaatan hutan	1	NSPK	182.310
			T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu **(425.000 Ton)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	52	Badan Usaha	9.806.491
			T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan **(15 Unit)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	26	Badan Usaha	7.213.455
		T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan **(10 Unit)**	09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	38	Dokumen	2.217.143
				09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK usaha pemanfaatan hutan	1	NSPK	300.000
			T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan **(235 juta US$)**	09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	39	Badan Usaha	5.324.766
				09-Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	40	Badan Usaha	4.890.160
T2.S2.1.2 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(PSKL)**	T2.S2.1.2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(1,1 Triliun Rupiah)**	T2.S2.1.2.1.1 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri	T2.S2.1.2.1.1.1 Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan **(640 Kelompok Masyarakat)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	640	Kelompok Masyarakat	34.176.000
			T2.S2.1.2.1.1.2 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum **(27 Kelompok Masyarakat)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	27	Kelompok Masyarakat	5.087.741

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S2
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S2.1
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)
(118,6 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S2.1.2 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(PSKL)**	T2.S2.1.2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial **(1,1 Triliun Rupiah)**	T2.S2.1.2.1.1 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri	T2.S2.1.2.1.1.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha PS **(3 Dokumen)**	06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
				06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Project FIP-I	2	Kelompok Masyarakat	8.246.909
				06-Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-III	1	Kelompok Masyarakat	3.416.860
		T2.S2.1.2.1.2 Meningkatnya Peran Mitra dalam penguatan kelompok perhutanan sosial	T2.S2.1.2.1.2.1 Meningkatnya kemitraan kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan **(40 Surat keterangan)**	04-Direktorat Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Lingkungan	PEE-Kemitraan	001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan	40	Kesepakatan	3.094.000
			T2.S2.1.2.1.2.2 Fasilitasi Kemitraan Lingkungan **(3 Dokumen)**	04-Direktorat Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Lingkungan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Kemitraan Lingkungan	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
T2.S2.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(BSI LHK)**	T2.S2.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(9 NSPK)**	T2.S2.1.3.1.1 Tersedianya standardisasi usaha dan produk yang berkualitas dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.1.1 Jumlah Standar Usaha/Produk Bidang Kehutanan **(4 NSPK)**	09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3	NSPK	1.500.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN)	7	NSPK	3.440.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	051-Fasilitasi dan Pembinaan lembaga melalui Forest Program VI	1	Lembaga	15.000.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	051-KHDTK sebagai laboratorium lapangan	38	Unit	4.247.334
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	CDK-OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	052-Laboratorium Kehutanan untuk menyiapkan standar kehutanan yang berkualitas	8	Unit	2.000.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	051-Standar Hasil hutan, Jasa Lingkungan, dan Keanekaragaman hayati Pengelolaan Hutan di KHDTK	6	Dokumen	2.700.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	QMA-Data dan Informasi Publik	051-Pemanfaatan Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) oleh stakeholder	1	layanan	120.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S2
Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S2.1
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)
(118,6 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S2.1.3 Meningkatnya standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(BSI LHK)**	T2.S2.1.3.1 Jumlah standar dan instrumen investasi dibidang kehutanan **(9 NSPK)**	T2.S2.1.3.1.2 Meningkatnya kualitas standar instrumen (skema,sistem prosedur dan standar) usaha dan produk dalam perizinan berusaha bidang kehutanan	T2.S2.1.3.1.2.1 Jumlah standar produk bidang Kehutanan yang ditingkatkan kualitasnya **(20 Produk)**	09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	ADA-Standarisasi Produk	051-Standar Produk yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	20	Produk	1.200.000
				09-Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	ADD-Standarisasi Lembaga	051-Standar Usaha yang Diterapkan melalui Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	20	Lembaga	1.200.000
T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan **(BP2SDM)**	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan **(0,3 Triliun Rupiah)**	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri) **(30 Kelompok Masyarakat)**	06-Pusat Penyuluhan	Peningkatan Penyuluhan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri	30	Kelompok Masyarakat	700.000
						BMA-Data dan Informasi Publik	001-Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	1	Laporan	100.000
			T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan **(20 Kelompok Masyarakat)**	06-Pusat Penyuluhan	Peningkatan Penyuluhan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	20	Kelompok Masyarakat	700.000
		T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya kapasitas Penyuluh	T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) **(1.000 Orang)**	06-Pusat Penyuluhan	Peningkatan Penyuluhan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.000	Orang	2.538.607

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S3
Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting

Indikator (IKU/IKP)

T2.S3.1
Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
(15 US$ Milyar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan **(PHL)**	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan **(10 U$D Milyar)**	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat VLK **(45 juta M3)**	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1	NSPK	223.310
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	1	Rekomendasi Kebijakan	348.956
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Fasilitasi/ Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	160	Badan Usaha	1.067.519
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	170	Badan Usaha	5.757.013
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	001-Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	37	Badan Usaha	537.168
		T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan **(16,5 Juta Ton)**	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	370	Badan Usaha	7.105.110
			T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/Penilikan SVLK **(100 UMKM)**	12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	25	UMKM	5.716.372
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	002-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	75	UMKM	8.773.399
				12-Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	160	Badan Usaha	4.738.897
T2.S3.1.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan **(2,15 Triliun Rupiah)**	T2.S3.1.2.1 Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan **(2,15 Triliun Rupiah)**	T2.S3.1.2.1.1 Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	T2.S3.1.2.1.1.1 Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL **(500 Entitas)**	04-Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	500	Lembaga	4.700.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S4
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S4.1
Nilai PNBP Fungsional KLHK
(5,2 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan **(PHL)**	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan **(3,233 Triliun Rupiah)**	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBP dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (WB) **(293 Wajib Bayar)**	11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	293	Badan Usaha	4.279.629
				11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1	NSPK	179.833
				11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	293	Badan Usaha	1.927.459
			T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT **(287 Unit)**	11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	85	Badan Usaha	3.327.200
				11-Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	002-Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	208	Badan Usaha	2.900.287
T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan **(PKTL)**	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku **(300 PKTL)**	T2.S4.1.2.1.1 Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan **(300 Dokumen)**	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300	layanan	1.888.575
			T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH **(100 unit)**	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	Badan usaha	5.477.852
			T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala **(12 kali Update)**	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	layanan	498.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S4
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S4.1
Nilai PNBP Fungsional KLHK
(5,2 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S4.1.3 Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari **(KSDAE)**	T2.S4.1.3.1 Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari **(230 milyar Rupiah)**	T2.S4.1.3.1.1 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	T2.S4.1.3.1.1.1 Jumlah destinasi wisata alam prioritas **(15 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	2	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	15	Unit	14.300.000
			T2.S4.1.3.1.1.2 Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon **(10 Entitas)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	2	Rekomendasi Kebijakan	900.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon yang Dikembangkan	10	layanan	1.200.000
			T2.S4.1.3.1.1.3 Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air **(10 Entitas)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001- Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP I)	2	Lembaga	408.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	5	Rekomendasi Kebijakan	800.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang Dikembangkan	10	layanan	1.500.000
			T2.S4.1.3.1.1.4 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education **(52 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	25	Kelompok Masyarakat	11.300.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	52	Unit	33.150.000
			T2.S4.1.3.1.1.5 Jumlah destinasi wisata alam bahari **(7 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	7	Unit	4.307.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T2.S4
Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator (IKU/IKP)

T2.S4.1
Nilai PNBP Fungsional KLHK
(5,2 Triliun Rupiah)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T2.S4.1.3 Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari **(KSDAE)**	T2.S4.1.3.1 Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari **(230.000 Ribu Rupiah)**	T2.S4.1.3.1.1 Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	T2.S4.1.3.1.1.4 Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education **(52 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	25	Kelompok Masyarakat	11.300.000
				05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	52	Unit	33.150.000
			T2.S4.1.3.1.1.5 Jumlah destinasi wisata alam bahari **(7 Destinasi)**	05-Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	7	Unit	4.307.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S1
Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate

Indikator (IKU/IKP)

T3.S1.1
Luas kawasan hutan dengan status penetapan
(14,9 Juta Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap **(PKTL)**	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) **(14,9 Juta Hektar)**	T3.S1.1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi **(14,9 Juta Hektar)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	10.764.901
			T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan **(1 Judul)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500.000
			T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga **(40.534 KM)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	22	Rekomendasi Kebijakan	295.486.444
			T3.S1.1.1.1.1.4 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH **(0 Dokumen)**							
	T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan **(31 Layanan)**	T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses **(30 Pemohon)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan	392.000
			T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN **(41,4 Ribu Hektar)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1	Layanan	1.000.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S2
Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan

Indikator (IKU/IKP)

T3.S2.1
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
(10,1 Ribu Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA **(PKTL)**	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA **(10,1 Ribu Hektar)**	T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA **(10,1 Ribu Hektar)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.600.000
			T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH **(4 Provinsi)**	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4	Rekomendasi Kebijakan	7.546.080

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S3
Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

Indikator (IKU/IKP)

T3.S3.1
Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
(150.000 Ribu Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S3.1.1 Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat **(PSKL)**	T3.S3.1.1.1 Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat **(150.000 Hektar)**	T3.S3.1.1.1.1 Meningkatnya penanganan konflik tenurial dan penetapan hutan adat	T3.S3.1.1.1.1.1 Pemetaan kasus konflik tenurial **(22 Kasus)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	22	Layanan	1.907.400
			T3.S3.1.1.1.1.2 Penanganan kasus konflik tenurial **(26 Kasus)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penangananya	26	Layanan	2.959.000
			T3.S3.1.1.1.1.3 Penetapan hutan adat dan hutan hak **(15 SK)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	15	Layanan	2.517.800
			T3.S3.1.1.1.1.4 Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat **(13 Kelompok Masyarakat)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Identifikasi MHA dan Calon Hutan Adat	13	Kelompok Masyarakat	1.084.200
			T3.S3.1.1.1.1.5 Fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat **(3 Dokumen)**	05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
				05-Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-V	3	Kelompok Masyarakat	35.900.000
		T3.S3.1.1.1.2 Meningkatnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat setiap tahun	T3.S3.1.1.1.2.1 Luas prakondisi persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS **(150 Ribu Hektar)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial	237	Kelompok Masyarakat	10.500.000
			T3.S3.1.1.1.2.2 Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat **(150 Ribu Hektar)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	237	Kelompok Masyarakat	4.500.000
			T3.S3.1.1.1.2.3 Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial **(40 SK)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003-Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi	40	Kelompok Masyarakat	880.000
			T3.S3.1.1.1.2.4 Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial **(3 Dokumen)**	02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	700.000
				02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project FP-II	1	Kelompok Masyarakat	7.362.001
				02-Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Project SSF	4	Kelompok Masyarakat	48.024.900

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T3.S3
Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

Indikator (IKU/IKP)

T3.S3.1
Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
(150.000 Ribu Hektar)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat **(PHL)**	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat **(15.000 Hektar)**	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat **(15.000 Hektar)**	10-Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	32	Kelompok Masyarakat	1.600.110
T3.S3.1.3 Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi **(KSDAE)**	T3.S3.1.3.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat **(1.000 Desa)**	T3.S3.1.3.1.1 Terjaminnya peningkatan kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi	T3.S3.1.3.1.1.1 Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat **(500 Desa)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	500	Lembaga	52.270.000
			T3.S3.1.3.1.1.2 Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi **(90.000 Hektar)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.400.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	90.000	Hektar	11.500.000
			T3.S3.1.3.1.1.3 Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam **(200 Orang)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	200	Orang	4.000.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Kebijakan kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan KK	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
			T3.S3.1.3.1.1.4 Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan **(500 Kelompok)**	10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Kebijakan Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	1	Rekomendasi Kebijakan	400.000
				10-Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya	500	Kelompok Masyarakat	14.000.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S1
Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas

Indikator (IKU/IKP)

T4.S1.1
Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
(78 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan **(BP2SDM)**	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya **(2.940 Orang)**	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan diklat non aparatur LHK **(690 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	690	Orang	3.025.000
			T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan diklat aparatur LHK **(660 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	660	Orang	3.115.288
			T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan pendidikan karya siswa **(10 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10	Orang	1.200.000
			T4.S1.1.1.1.1.4 Lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha **(690 Orang)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	690	Orang	2.760.000
		T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan SDM LHK	T4.S1.1.1.1.2.1 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (**5 jenis Jabatan)**	02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5	Dokumen	800.000
			T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Komponen SDM Non Aparatur LHK **(5 Jenis Jabatan)**	02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5	Dokumen	800.000
			T4.S1.1.1.1.2.3 Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi **(900 Orang)**	02-Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Dan Pengembangan Sdm	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK	900	Orang	1.400.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S1
Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas

Indikator (IKU/IKP)

T4.S1.1
Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
(78 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan **(BP2SDM)**	T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat **(473 Orang)**	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat **(473 Orang)**	04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	473	Orang	56.334.414
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah	5	Paket	4.821.667
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1	unit	26.986.840
				04-SMK Kehutanan	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4	unit	14.843.918
	T4.S1.1.1.3 Indeks efektifitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan **(69 Poin)**	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	T4.S1.1.1.3.1.1 Nilai KHDTK yang dikelola **(69 Poin)**	07-Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lhk	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7	Unit	2.805.000
	T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup **(247 Unit)**	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan **(247 Unit)**	08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	230	Lembaga	780.000
				08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17	Lembaga	480.000
		T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya jiwa kewirausahaan kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah orang yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas **(610 Orang)**	08-Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	610	Orang	1.855.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(78 Poin)**	T4.S2.1.1.1.1 Meningkatnya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang akuntabel	T4.S2.1.1.1.1.1 Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah **(78 Poin)**	03-Biro Perencanaan	Koordinasi Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12	Dokumen	19.683.187
			T4.S2.1.1.1.1.2 Tingkat kepuasan layanan perencanaan **(4 Poin)**	03-Biro Perencanaan	Koordinasi Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.239.143
		T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari **(82 Poin)**	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	17	Layanan/Laporan/Dokumen	16.408.712
			T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari **(4 Level)**	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	17	Layanan/Laporan/Dokumen	132.471.748
			T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	03-Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	287	Unit/m2/Paket	631.000
		T4.S2.1.1.1.3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	T4.S2.1.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan **(78 Poin)**	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Das Dan Rehabilitasi Hutan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	37	Layanan/Laporan/Dokumen	47.029.390
			T4.S2.1.1.1.3.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan **(4 Level)**	04-Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengengelolaan Das Dan Rehabilitasi Hutan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	37	Layanan/Laporan/Dokumen	271.681.459
			T4.S2.1.1.1.3.3 Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel **(- Dokumen)**							

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(78 Poin)**	T4.S2.1.1.1.4 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	T4.S2.1.1.1.4.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem **(78 Poin)**	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	75	Layanan	62.133.486
			T4.S2.1.1.1.4.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem **(3 Level)**	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	75	Layanan	1.014.613.159
			T4.S2.1.1.1.4.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	75	Unit	6.389.000
				05-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistem	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	75	Unit	9.583.000
		T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan **(82 Poin)**	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	33.344.400
			T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan **(3 Level)**	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	204.283.591
			T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	2	Unit	2.170.000
		T4.S2.1.1.1.6 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.6.1 Nilai SAKIP pada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(78 Poin)**	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	17	Layanan	12.404.323
			T4.S2.1.1.1.6.2 Level Maturitas SPIP Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(4 Level)**	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	17	Layanan	198.436.747

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(78 Poin)**	T4.S2.1.1.1.6 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.6.3 Laporan keuangan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	07-Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	11	Unit	196.800
		T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM **(78 poin)**	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	12	Layanan	17.075.825
			T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM **(4 Level)**	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	15	Layanan	151.188.391
			T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	8	Paket	1.085.000
				08-Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	4	Paket	760.000
		T4.S2.1.1.1.8 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	T4.S2.1.1.1.8.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan **(74 Poin)**	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan/Laporan /Dokumen	25.793.439
			T4.S2.1.1.1.8.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan **(4 Level)**	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	6	Layanan/Laporan /Dokumen	59.035.548
			T4.S2.1.1.1.8.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	09-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6	Unit/m2/Paket	4.100.000

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(78 Poin)**	T4.S2.1.1.1.9 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S2.1.1.1.9.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(78 Poin)**	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	16.846.009
			T4.S2.1.1.1.9.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan **(4 Level)**	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	6	Layanan	184.389.874
			T4.S2.1.1.1.9.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	10-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	2.666.000
		T4.S2.1.1.1.10 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	T4.S2.1.1.1.10.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim **(78 Poin)**	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	3.666.165
			T4.S2.1.1.1.10.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim **(4 Level)**	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	12	Layanan	101.752.493
			T4.S2.1.1.1.10.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang tertib dan akuntabel **(1 Dokumen)**	11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6	Layanan	800.000
				11-Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	1	Kegiatan	2.500.000
		T4.S2.1.1.1.11 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	T4.S2.1.1.1.11.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 **(78 Poin)**	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	32.575.568
			T4.S2.1.1.1.11.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 **(4 Level)**	12-Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	41.757.575
			T4.S2.1.1.1.11.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel **(-)**							

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK **(SETJEN (Rocan) dan Sekretariat UKE I)**	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(78 Poin)**	T4.S2.1.1.1.12 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	T4.S2.1.1.1.12.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan **(78 Poin)**	13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan	47.542.106
			T4.S2.1.1.1.12.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan **(3 Level)**	13-Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	13.612.797
			T4.S2.1.1.1.12.3 Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel **(-)**							
		T4.S2.1.1.1.13 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	T4.S2.1.1.1.13.1 Nilai SAKIP pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove **(78 Poin)**	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	27.793.068
			T4.S2.1.1.1.13.2 Level Maturitas SPIP Badan Restorasi Gambut dan mangrove **(4 Level)**	14-Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	28.393.881
			T4.S2.1.1.1.13.3 Laporan keuangan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang tertib dan akuntabel **(-)**							

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.2 Meningkatnya kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) **(Setjen (Roum))**	T4.S2.1.2.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK **(340 Poin)**	T4.S2.1.2.1.1 Meningkatnya reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang optimal	T4.S2.1.2.1.1.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN KLHK **(340 Poin)**	15-Biro Kepegawaian dan Organisasi	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian LHK	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	2.500	Orang	6.372.686
			T4.S2.1.2.1.1.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kepegawaian dan Organisasi **(4 Poin)**	15-Biro Kepegawaian dan Organisasi	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.791.198
				15-Biro Kepegawaian dan Organisasi	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.160.000
T4.S2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efesien, Efektif, dan Akuntabel **(Setjen (Rokeu dan Roum)**	T4.S2.1.3.1 Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK **(4 Poin)**	T4.S2.1.3.1.1 Meningkatnya pengelolaan dokumen BMN yang akuntabel	T4.S2.1.3.1.1.1 Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel **(6 Dokumen BMN)**	04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	5.901.387
		T4.S2.1.3.1.2 Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan KLHK	T4.S2.1.3.1.2.1 Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Seluruh Satker (Nilai Kerja Anggaran dalam SMART DJA) **(92 Poin)**	14-Biro Keuangan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	955-Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen	4.986.512
			T4.S2.1.3.1.2.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan keuangan **(4 Poin)**	14-Biro Keuangan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.427.275
	T4.S2.1.3.2 Survei Kepuasan Publik **(4 Poin)**	T4.S2.1.3.2.1 Meningkatnya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan KLHK	T4.S2.1.3.2.1.1 Tingkat kepuasan layanan perizinan KLHK **(4 Poin)**	04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	3	Layanan	20.654.085
				04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	2	Layanan	192.524.533
			T4.S2.1.3.2.1.2 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan umum KLHK **(4 pusat)**	04-Biro Umum	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan Dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	959-Layanan Protokoler	1	Layanan	54.259.633
T4.S2.1.4 Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK **(Setjen (Rohumas)**	T4.S2.1.4.1 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK **(86 Poin)**	T4.S2.1.4.1.1 Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	T4.S2.1.4.1.1.1 Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan hubungan antar Lembaga **(4 Poin)**	01-Biro Hubungan Masyarakat	Penyiaran Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	958-Layanan Hubungan Masyarakat	3	Layanan	7.263.125
			T4.S2.1.4.1.1.2 Pemberitaan positif di media massa **(3.750 Berita)**	01-Biro Hubungan Masyarakat	Penyiaran Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.401.758

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.5 Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK **(Setjen (Rokum)**	T4.S2.1.5.1 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan **(5 Poin)**	T4.S2.1.5.1.1 Meningkatnya layanan hukum, bantuan hukum dan penataan perundangundangan yang berkualitas	T4.S2.1.5.1.1.1 Tingkat kepuasan layanan hukum **(4 Poin)**	17-Biro Hukum	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.200.000
			T4.S2.1.5.1.1.2 Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani **(40 Perkara)**	17-Biro Hukum	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	969-Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	565.950
			T4.S2.1.5.1.1.3 Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan **(5 Poin)**	17-Biro Hukum	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	957-Layanan Hukum	1	Layanan	4.109.760
T4.S2.1.6 Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri bidang LHK **(Setjen (Biro KLN))**	T4.S2.1.6.1 Jumlah Dokumen Kerjasama **(30 Dokumen)**	T4.S2.1.6.1.1 Meningkatnya dukungan hubungan dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program KLHK	T4.S2.1.6.1.1.1 Dokumen hasil analisis kerja sama bilateral, multilateral, intra kawasan, dan ormas asing **(30 Dokumen)**	06-Biro Kerja Sama Luar Negeri	Pembinaan Dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	AEA-Koordinasi	001-Layanan Kerjasama Internasional	3	Kegiatan	7.232.176
			T4.S2.1.6.1.1.2 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan kerjasama luar negeri **(4 poin)**	06-Biro Kerja Sama Luar Negeri	Pembinaan Dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	2.100.000
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.1 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) **(3,65 Poin)**	T4.S2.1.7.1.1 Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK	T4.S2.1.7.1.1.1 Data dan informasi KLHK (IKLH, statistik, SLHI, status hutan) **(4 Dokumen)**	02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	3.896.451
			T4.S2.1.7.1.1.2 Tingkat kepuasan layanan data dan sistem informasi KLHK **(4 Poin)**	02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.050.000
				02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Layanan	779.479
			T4.S2.1.7.1.1.3 Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) **(3,65 Poin)**	02-Pusat Data dan Informasi	Penyelenggaraan Data Dan Informasi KLHK	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1	Sistem Informasi	12.858.499

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(77,5 Poin)**	T4.S2.1.7.2.1 Meningkatnya kualitas kebijakan strategis KLHK	T4.S2.1.7.2.1.1 Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis **(12 Dokumen Rancangan)**	18-Pusat Kebijakan Strategis	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang LHK	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH	6	Rekomendasi Kebijakan	2.114.704
				18-Pusat Kebijakan Strategis	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang LHK	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.645.352
			T4.S2.1.7.2.1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(80 Poin)**	18-Pusat Kebijakan Strategis	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.356.515
		T4.S2.1.7.2.2 Meningkatnya pengembangan, penerapan dan pelaksanaan keteknikan kehutanan dan lingkungan yang efektif dan efisien	T4.S2.1.7.2.2.1 NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya **(3 NSPK)**	19-Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH	3	NSPK	2.614.470
			T4.S2.1.7.2.2.2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penetapannya **(4 Poin)**	19-Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.277.602
		T4.S2.1.7.2.3 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Bali - Nusra	T4.S2.1.7.2.3.1 Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E **(4 Poin)**	08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	954.335
				08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	10.422.882
				08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	715.886
			T4.S2.1.7.2.3.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion (8 Pemda)	08-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	8	Daerah	1.670.221

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(77,5 Poin)**	T4.S2.1.7.2.4 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Jawa	T4.S2.1.7.2.4.1 Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E **(4 Poin)**	07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.088.806
				07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	11.557.169
				07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	59	Unit	816.605
			T4.S2.1.7.2.4.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion **(10 Pemda)**	07-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	11	Daerah	1.908.125
		T4.S2.1.7.2.5 Meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Kalimantan	T4.S2.1.7.2.5.1 Tingkat kepuasan publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.346.050
				09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	9.350.802
				09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	1.009.537
			T4.S2.1.7.2.5.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan Ekoregion **(5 Pemda)**	09-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	5	Daerah	2.555.251

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(77,5 Poin)**	T4.S2.1.7.2.6 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi Maluku	T4.S2.1.7.2.6.1 Tingkat kepuasan publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	11.058.412
				10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	6	Unit	1.179.894
				10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	2	Unit	1.415.920
			T4.S2.1.7.2.6.2 Jumlah layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan Ekoregion **(30 Pemda)**	10-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku	30	Daerah	2.123.997
		T4.S2.1.7.2.7 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua	T4.S2.1.7.2.7.1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	2.063.200
				12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	6.966.420
				12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	12	Unit	180.000
			T4.S2.1.7.2.7.2 Jumlah layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion **(8 Pemda)**	12-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	8	Daerah	3.364.941

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ALOKASI ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.7 Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK **(Setjen (Pusjakstra, Pustekhutling, P3E, Pusdatin))**	T4.S2.1.7.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK **(77,5 Poin)**	T4.S2.1.7.2.8 Meningkatnya pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sumatera	T4.S2.1.7.2.8.1 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E **(4 Poin)**	13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera I dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera II	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	11.728.314
				13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera I dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera II	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	20	Unit	1.794.641
			T4.S2.1.7.2.8.2 Jumlah layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion **(4 Pemda)**	13-Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera I dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera II	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	006-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	22	Daerah	2.991.871

Sasaraan Strategis/Sasaran Program :

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Indikator (IKU/IKP)

T4.S2.1
Nilai kinerja reformasi birokrasi
(83 Poin)

SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR (I UKE I)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKK)	UKE II	KEGIATAN	KRO	RO	PAGU ANGGARAN		
								TARGET	SATUAN	ALOKASI
T4.S2.1.8 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal **(Itjen)**	T4.S2.1.8.1 Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK (3 Poin)	T4.S2.1.8.1.1 Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	T4.S2.1.8.1.1.1 Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 **(75 %)**	02-Inspektorat Wilayah I	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	001-Layanan Manajemen Resiko	67	Laporan	7.363.035
	T4.S2.1.8.2 Nilai Maturitas SPIP KLHK (3,3 poin)	T4.S2.1.8.2.1 Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	T4.S2.1.8.2.1.1 persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5 **(50 %)**	02-Inspektorat Wilayah I	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	002-Layanan Pengendalian Internal	67	Laporan	5.725.470
	T4.S2.1.8.3 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK **(3,3 Poin)**	T4.S2.1.8.3.1 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	T4.S2.1.8.2.3.1 Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal **(85 Poin)**	01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10	Dokumen	800.000
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Dokumen	500.000
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.180.000
			T4.S2.1.8.2.3.2 Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal **(3,3 Poin)**	01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	3.644.422
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	33.290.196
			T4.S2.1.8.2.3.3 Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP **(3,3 Poin)**	01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	2.650.000
				01-Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	265	Unit	4.200.000
		T4.S2.1.8.3.2 Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	T4.S2.1.8.3.2.1 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen **(3,3 Poin)**	02-Inspektorat Wilayah I	Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	364	Laporan	24.977.405
	T4.S2.1.8.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK **(3 Poin)**	T4.S2.1.8.4.1 Meningkatnya upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi	T4.S2.1.8.4.1.1 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti **(100 %)**	06-Inspektorat Investigasi	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	3.600.000
			T4.S2.1.8.4.1.2 Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Kumulatif) b	06-Inspektorat Investigasi	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	3.900.000
										6.912.784.958